

LAPORAN PENELITIAN

Verifikasi Lapangan Peta Kemiskinan Indonesia 2010

Radi Negara
Mukhammad Fajar Rakhmadi
Meuthia Rosfadhila
Niken Kusumawardhani
Joseph Natanael Marshan
Mayang Rizky
Akhmadi
Hastuti
Mawardi
Nuraini Thalib

*Dokumen ini telah disetujui untuk pratinjau dalam jaringan, tetapi belum melewati proses *copyediting* dan *proofreading* sehingga dapat menyebabkan perbedaan antara versi ini dan versi final. Bila Anda mengutip dokumen ini, indikasikan sebagai "draf".

LAPORAN PENELITIAN

Verifikasi Lapangan Peta Kemiskinan Indonesia 2010

Radi Negara

Niken Kusumawardhani

Joseph Natanael Marshan

Mukhammad Fajar Rakhmadi

Mayang Rizky

Meuthia Rosfadhila

Akhmadi

Hastuti

Mawardi

Nuraini Thalib

Lembaga Penelitian SMERU

Jakarta

Januari 2014

Temuan, pandangan, dan interpretasi dalam laporan ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak berhubungan dengan atau mewakili lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan Lembaga Penelitian SMERU.

Studi dalam publikasi ini sebagian besar menggunakan metode wawancara dan kelompok diskusi terfokus. Semua informasi terkait direkam dan disimpan di kantor SMERU.

Untuk mendapatkan informasi mengenai publikasi SMERU, mohon hubungi kami di nomor telepon 62-21-31936336, nomor faks 62-21-31930850, atau alamat sur-el smeru@smeru.or.id; atau kunjungi situs web www.smeru.or.id.

Verifikasi Lapangan Peta Kemiskinan Indonesia 2010 / Radi Negara et al. -- Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU, 2014.

vi, 55 p. ; 30 cm. -- (Laporan Penelitian SMERU, Januari 2014)

362.57 / DDC 22

ABSTRAK

Verifikasi Lapangan Peta Kemiskinan Indonesia 2010

Radi Negara, Mukhammad Fajar Rakhmadi, Meuthia Rosfadhila, Niken Kusumawardhani, Joseph Natanael Marshan, Mayang Rizky, Akhmadi, Hastuti, Mawardi, Nuraini Thalib

Laporan studi verifikasi lapangan ini merupakan salah satu bagian dari studi Peta Kemiskinan dan Penghidupan Indonesia. Studi ini bertujuan untuk membuat estimasi angka kemiskinan di wilayah kecil, hingga tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, serta menyusun peta kemiskinan dan penghidupan masyarakat. Estimasi angka kemiskinan dibuat untuk seluruh Indonesia berdasarkan pendekatan pengeluaran rumah tangga dengan menggunakan data-data dari Survey Sosial-Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2010, Potensi Desa (PODES) 2011, dan Sensus Penduduk (SP) 2010.

Studi verifikasi lapangan peta kemiskinan Indonesia 2010 ini dilakukan untuk mengetahui apakah estimasi kemiskinan yang telah dilakukan sesuai dengan kondisi kemiskinan masyarakat sebenarnya. Studi ini dilakukan di tiga provinsi (Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Bangka Belitung) dan dilaksanakan pada tiga kabupaten/kota di setiap provinsi sebagai sampel (Kota Parepare, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Bangka Barat). Pengumpulan data dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa untuk mengetahui gambaran kondisi kemiskinan di masing-masing wilayah. Selain itu, juga dilakukan wawancara dengan aparat pemerintah, tokoh masyarakat dan penduduk desa/kelurahan untuk memperkaya informasi kondisi kemiskinan masyarakat. Analisis data dilakukan dengan menggunakan *rank correlation* dan *pairwise correlation* sebagai alat untuk mengetahui kesesuaian antara hasil estimasi kemiskinan dengan hasil FGD dan wawancara.

Secara rata-rata, lebih dari 55% ranking antardaerah berdasarkan estimasi kemiskinan 2010 sesuai dengan hasil FGD untuk kondisi tahun 2010 dan 2013. Tingkat kesesuaian ranking 2010 lebih baik dari pada tahun 2013. Di Kabupaten yang sama, kecamatan yang memiliki nilai *relative standard error* (RSE) yang tinggi memiliki *rank correlation* dan tingkat kesesuaian (*match*) yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kecamatan yang memiliki RSE rendah. Perbandingan antara kondisi kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional (GKN) dengan garis kemiskinan \$2 *Purchasing Power Parity* (PPP) pada 2010 dan 2013 memperlihatkan bahwa persepsi masyarakat terhadap proporsi penduduk miskin berdasarkan standar lokal lebih mendekati angka proporsi penduduk di bawah \$2PPP daripada proporsi penduduk di bawah GKN. Oleh karena itu, estimasi angka kemiskinan 2010 di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan ini perlu digunakan dengan kehati-hatian, dengan memperhatikan nilai RSE, perubahan kondisi saat ini dibandingkan dengan kondisi 2010 dan karakteristik lokal yang ada.

Kata kunci: Peta Kemiskinan, *Verifikasi*, *FGD*, *Rank Correlation*, *Pairwise Correlation*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Struktur Laporan	2
II. METODE VERIFIKASI	3
2.1. Lokasi dan Waktu	3
2.2. Pendekatan Studi dan Kegiatan Verifikasi Lapangan	4
2.3. Perbandingan Hasil Pemetaan Kemiskinan dengan FGD	4
III. PERBANDINGAN KEMISKINAN ANTAR KECAMATAN	6
3.1. Kabupaten Bangka Barat	6
3.2. Kabupaten Sumbawa Barat	10
3.3. Kota Parepare	14
3.4. Ringkasan: Perbandingan Kemiskinan Antarkecamatan	20
IV. PERBANDINGAN KEMISKINAN ANTARDESA	22
4.1. Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat	22
4.2. Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat	26
4.3. Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat	30
4.4. Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat	34
4.5. Kecamatan Ujung, Kota Parepare	38
4.6. Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare	42
4.7. Ringkasan: Perbandingan Kemiskinan Antardesa	46
V. PERBANDINGAN HASIL PEMETAAN KEMISKINAN DAN KLASIFIKASI KEKAYAAN MASYARAKAT	48
VI. KESIMPULAN	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Kondisi Kemiskinan di Kabupaten/Kota Sampel 2010	3
Tabel 2.	Lokasi Penelitian Verifikasi Lapangan Pemetaan Kemiskinan	3
Tabel 3.	Kondisi Persebaran Penduduk Kabupaten Bangka Barat, 2010	6
Tabel 4.	Perbandingan Urutan Kesejahteraan Antarkecamatan Hasil FGD dengan Pemetaan Kemiskinan berdasarkan GKN dan Garis Kemiskinan \$2 PPP di Kabupaten Bangka Barat, 2010 dan 2013	8
Tabel 5.	Peringkat Kecamatan Berdasarkan FGD dan Wawancara Mendalam di Tingkat Kabupaten Bangka Barat, 2010 dan 2013	9
Tabel 6.	Luas dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat	10
Tabel 7.	Perbandingan Urutan Kesejahteraan Antarkecamatan Hasil FGD dengan Pemetaan Kemiskinan berdasarkan GKN dan Garis Kemiskinan \$2 PPP di Kabupaten Sumbawa Barat, 2010 dan 2013	13
Tabel 8.	Kondisi Persebaran Penduduk Kota Parepare	15
Tabel 9.	Peringkat Kecamatan Berdasarkan FGD dan Wawancara Mendalam di Tingkat Kota Parepare, 2010 dan 2013	17
Tabel 10.	Hasil Pemeringkatan Kesejahteraan di Tingkat Kota - Tahun 2013	17
Tabel 11.	Perbandingan Urutan Kesejahteraan Antarkecamatan Hasil FGD dengan Pemetaan Kemiskinan berdasarkan GKN dan Garis Kemiskinan \$2 PPP di Kota Parepare, 2010 dan 2013	19
Tabel 12.	Ringkasan Perbandingan antara Peringkat Kecamatan FGD dan Pemetaan Kemiskinan berdasarkan GKN di Tiga Kabupaten Sampel, 2010 dan 2013	20
Tabel 13.	Ringkasan Perbandingan antara Peringkat Kecamatan FGD dan Pemetaan Kemiskinan berdasarkan GK \$2 PPP di Tiga Kabupaten Sampel, 2010 dan 2013	20
Tabel 14.	Perbandingan Urutan Kesejahteraan Antardesa Hasil FGD dengan Pemetaan Kemiskinan berdasarkan GKN dan Garis Kemiskinan \$2 PPP di Kecamatan Muntok, 2010 dan 2013	25
Tabel 15.	Perbandingan Urutan Kesejahteraan Antardesa Hasil FGD dengan Pemetaan Kemiskinan berdasarkan GKN dan Garis Kemiskinan \$2 PPP di Kecamatan Simpang Teritip, 2010 dan 2013	29
Tabel 16.	Persebaran Penduduk Kecamatan Poto Tano	31
Tabel 17.	Perbandingan Urutan Kesejahteraan Antardesa Hasil FGD dengan Pemetaan Kemiskinan berdasarkan GKN dan Garis Kemiskinan \$2 PPP di Kecamatan Poto Tano, 2010 dan 2013	34
Tabel 18.	Perbandingan Urutan Kesejahteraan Antardesa Hasil FGD dengan Pemetaan Kemiskinan berdasarkan GKN dan Garis Kemiskinan \$2 PPP di Kecamatan Maluku, 2010 dan 2013	37
Tabel 19.	Perbandingan Urutan Kesejahteraan Antardesa Hasil FGD dengan Pemetaan Kemiskinan berdasarkan GKN dan Garis Kemiskinan \$2 PPP di Kecamatan Ujung, 2010 dan 2013	41
Tabel 20.	Perbandingan Urutan Kesejahteraan Antardesa Hasil FGD dengan Pemetaan Kemiskinan berdasarkan GKN dan Garis Kemiskinan \$2 PPP di Kecamatan Bacukiki, 2010 dan 2013	45
Tabel 21.	Perbandingan Peringkat Kesejahteraan Antar Desa Berdasarkan FGD dan Poverty Map untuk 6 Kecamatan Sampel, 2010 dan 2013	46
Tabel 22.	Perbandingan Estimasi Kemiskinan berdasarkan Peta Kemiskinan dan Persepsi Masyarakat, 2010	49
Tabel 23.	Perbandingan Estimasi Kemiskinan berdasarkan Peta Kemiskinan dan Persepsi Masyarakat, 2013	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Contoh tiga kategori hasil perbandingan pasangan daerah	5
Gambar 2.	Perbandingan urutan kesejahteraan antarkecamatan berdasarkan estimasi peta kemiskinan GKN (kiri) dan \$2 PPP (kanan) dengan FGD di Kabupaten Bangka Barat, 2010 dan 2013	7
Gambar 3.	Perbandingan urutan kesejahteraan antarkecamatan berdasarkan estimasi peta kemiskinan GKN dengan FGD di Kabupaten Sumbawa Barat, 2010 dan 2013	13
Gambar 4.	Perbandingan urutan kesejahteraan antarkecamatan berdasarkan estimasi peta kemiskinan \$2 PPP dengan FGD di Kabupaten Sumbawa Barat, 2010 dan 2013	14
Gambar 5.	Perbandingan urutan kesejahteraan antarkecamatan berdasarkan estimasi peta kemiskinan GKN dengan FGD di Kota Parepare, 2010 dan 2013	18
Gambar 6.	Perbandingan urutan kesejahteraan antarkecamatan berdasarkan estimasi peta kemiskinan \$2 PPP dengan FGD di Kota Parepare, 2010 dan 2013	19
Gambar 7.	Perbandingan urutan kesejahteraan antardesa berdasarkan estimasi peta kemiskinan GKN dan FGD di Kecamatan Muntok, 2010 dan 2013	23
Gambar 8.	Perbandingan urutan kesejahteraan antardesa berdasarkan estimasi peta kemiskinan \$2 PPP dan FGD di Kecamatan Muntok, 2010 dan 2013	24
Gambar 9.	Perbandingan urutan kesejahteraan antardesa berdasarkan estimasi peta kemiskinan GKN dan FGD di Kecamatan Simpang Teritip, 2010 dan 2013	27
Gambar 10.	Perbandingan urutan kesejahteraan antardesa berdasarkan estimasi peta kemiskinan \$2 PPP dan FGD di Kecamatan Simpang Teritip, 2010 dan 2013	28
Gambar 11.	Perbandingan urutan kesejahteraan antardesa berdasarkan estimasi peta kemiskinan GKN dan FGD di Kecamatan Poto Tano, 2010 dan 2013	32
Gambar 12.	Perbandingan urutan kesejahteraan antardesa berdasarkan estimasi peta kemiskinan \$2 PPP dan FGD di Kecamatan Poto Tano, 2010 dan 2013	33
Gambar 13.	Perbandingan Urutan Kesejahteraan Antardesa Berdasarkan Estimasi Peta Kemiskinan GKN dan FGD di Kecamatan Maluk, 2010 dan 2013	36
Gambar 14.	Perbandingan urutan kesejahteraan antardesa berdasarkan estimasi peta kemiskinan \$2 PPP dan FGD di Kecamatan Maluk, 2010 dan 2013	37
Gambar 15.	Perbandingan urutan kesejahteraan antardesa berdasarkan estimasi peta kemiskinan GKN dan FGD di Kecamatan Ujung, 2010 dan 2013	40
Gambar 16.	Perbandingan urutan kesejahteraan antardesa berdasarkan estimasi peta kemiskinan \$2 PPP dan FGD di Kecamatan Ujung, 2010 dan 2013	40
Gambar 17.	Perbandingan urutan kesejahteraan antardesa berdasarkan estimasi peta kemiskinan GKN dan FGD di Kecamatan Bacukiki, 2010 dan 2013	44
Gambar 18.	Perbandingan urutan kesejahteraan antardesa berdasarkan estimasi peta kemiskinan \$2 PPP dan FGD di Kecamatan Bacukiki, 2010 dan 2013	45

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

ATM	: <i>Automated Teller Machine</i>
BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BPS	: Badan Pusat Statistik
FGD	: Focus Group Discussion
GK	: Garis Kemiskinan
GKN	: Garis Kemiskinan Nasional
IPTEK	: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
JAMKESDA	: Jaminan Kesehatan Daerah
KB	: Keluarga Berencana
KK	: Kepala Keluarga
KP	: Kuasa Pertambangan
MCK	: Mandi, Cuci dan Kakus
NNT	: Newmont Nusa Tenggara
NTB	: Nusa Tenggara Barat
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PELNI	: Pelayaran Nasional Indonesia
PEMDA	: Pemerintah Daerah
PHBS	: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
PKK	: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
POSKESDES	: Pos Kesehatan Desa
POSYANDU	: Pos Pelayanan Terpadu
PPP	: Purchasing Power Parity
PT	: Perusahaan Terbuka
PUSKESMAS	: Pusat Kesehatan Masyarakat
PUSTU	: PUSKESMAS Pembantu
RS	: Rumah Sakit
RSE	: <i>Relative Standard Error</i>
RT	: Rukun Tetangga
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
RUKO	: Rumah Toko
RW	: Rukun Warga
SAE	: Small Area Estimation
SD	: Sekolah Dasar
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SP	: Sensus Penduduk
STKIP	: Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
TK	: Taman Kanak-kanak
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
UMPAR	: Universitas Muhammadiyah Parepare

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemetaan kemiskinan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan di Indonesia idealnya dilakukan dengan menggunakan data pendapatan/pengeluaran rumah tangga dari survei ekonomi rumah tangga dengan jumlah sampel yang bisa mewakili jumlah penduduk desa/kelurahan dan kecamatan. Akan tetapi hal tersebut tidak mungkin dilakukan karena pengumpulan data pengeluaran dalam survey ekonomi rumah tangga yang dilakukan di Indonesia, dan juga di negara lain pada umumnya, hanya mampu menghitung tingkat kemiskinan untuk wilayah kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Di sisi lain, data sensus penduduk (SP) yang bisa diagregat ke tingkat desa/kelurahan dan kecamatan hanya berisi data karakteristik rumah tangga tanpa data pengeluaran rumah tangga.

Salah satu cara untuk mengatasi tidak tersedianya data pengeluaran rumah tangga dalam SP adalah dengan menghitung perkiraan pengeluaran berdasarkan metode *Small Area Estimation* (SAE) (Elbers, et. al., 2002). Metode ini telah diadaptasi di berbagai negara termasuk di Indonesia, yaitu yang digunakan oleh Lembaga Penelitian SMERU pada 2003-2005 dalam menyusun peta kemiskinan desa/kelurahan dan kecamatan tahun 2000. Dikarenakan sifatnya yang berupa proyeksi dan bergantung pada kualitas data survey dan sensus yang digunakan, metode SAE Elbers dkk ini perlu diinterpretasikan dan digunakan dengan kehati-hatian (Bank Dunia, 2007; Tarozzi dan Deaton, 2009). Untuk itu diperlukan pemeriksaan lanjutan atas hasil penghitungan guna menjadi patokan seberapa jauh tingkat ketepatan pengukuran kemiskinan desa/kelurahan dan kecamatan. Studi-studi yang banyak dilakukan umumnya bersifat kuantitatif seperti pemeriksaan *standard error* dan uji heterogenitas.

Selain metode kuantitatif, alat ukur reliabilitas hasil penghitungan kemiskinan juga dapat menggunakan metode kualitatif (White, 2002; Ravallion, 2002). Pada 2003 dan 2005, SMERU melakukan verifikasi di lapangan dengan metode penelitian kualitatif sebagai alat ukur tingkat akurasi pengukuran pemetaan kemiskinan Indonesia tahun 2000 yaitu penelitian pilot di provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta dan Kalimantan Timur pada 2003 dan penelitian lanjutan pada 2005 di provinsi Riau, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Barat (Suharyo et. al., 2005). Hasil verifikasi tersebut menunjukkan bahwa perbandingan ranking kecamatan antara estimasi kuantitatif dengan persepsi masyarakat adalah cukup konsisten sementara untuk ranking desa cukup bervariasi dan menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam menggunakan data peta kemiskinan (Suharyo et. al., 2005). Selain itu verifikasi di lapangan juga bermanfaat untuk memperkaya analisis hasil penghitungan kemiskinan dimana studi oleh Suharyo dkk (2005) menunjukkan perlunya perbaikan metode pemetaan kemiskinan terutama pemilihan variabel yang bisa lebih tepat mencerminkan kondisi kemiskinan di suatu wilayah.

Berdasarkan pengalaman tersebut, dalam studi pemetaan kemiskinan 2010 SMERU kembali melakukan verifikasi lapangan pada tahun 2013 dengan instrumen kualitatif yang tidak jauh berbeda dengan verifikasi pada 2005. Sejak diujicobakan pada 2003 instrumen penelitian kualitatif yang digunakan kemudian disempurnakan saat penelitian verifikasi tahun 2005 dengan menambahkan analisis *rank correlation* dan *pair-wise comparison*. Untuk 2013, instrumen yang digunakan tidak jauh berbeda dengan 2005, namun tingkat administrasi tertinggi untuk sampel penelitian ada di tingkat kabupaten/kota dan bukan tingkat provinsi. Berbeda dengan peta kemiskinan 2000 yang model penghitungan angka kemiskinannya dilakukan di tingkat provinsi dan membagi ke dalam kategori perkotaan dan perdesaan (66 model estimasi), peta kemiskinan 2010 menggunakan model penghitungan yang dilakukan di tingkat

kabupaten/kota (497 model estimasi). Penyempurnaan lainnya adalah garis kemiskinan yang menjadi acuan tidak hanya Garis Kemiskinan Nasional (GKN) tapi juga Garis Kemiskinan \$2 PPP sehingga akan dua kondisi kemiskinan di suatu wilayah yang akan diperbandingkan antara hasil kuantitatif dengan hasil kualitatif.

1.2. Tujuan

Verifikasi ditujukan untuk melihat apakah hasil penghitungan angka kemiskinan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi di lapangan berdasarkan persepsi masyarakat. Kesesuaian antara hasil estimasi angka kemiskinan dengan kondisi di lapangan diukur dengan cara membandingkan urutan kondisi kemiskinan suatu daerah dibandingkan daerah lainnya. Karena adanya perbedaan waktu yang cukup panjang antara tahun pengumpulan data yang dijadikan acuan penghitungan angka kemiskinan (tahun 2010) dengan pelaksanaan verifikasi (tahun 2013), maka dalam studi ini akan dilihat:

1. Perbandingan antara urutan kondisi kemiskinan daerah (kecamatan dan desa) hasil estimasi dengan kondisi kemiskinan saat ini (2013);
2. Perbandingan antara urutan kondisi kemiskinan daerah (kecamatan dan desa) hasil estimasi dengan kondisi kemiskinan pada tahun 2010;
3. Kecenderungan perubahan kondisi kemiskinan di berbagai daerah (kecamatan dan desa) antara tahun 2010 - 2013, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut.
4. Estimasi proporsi penduduk miskin di suatu desa pada saat ini dan pada tahun 2010 serta berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan kondisi kemiskinan tersebut, menurut pendapat masyarakat lokal.

1.3. Struktur Laporan

Laporan ini terdiri dari 6 Bab:

- Bab I memberikan latar belakang penelitian verifikasi lapangan, tujuan penelitian dan struktur laporan.
- Bab II menjelaskan metodologi penelitian verifikasi peta kemiskinan yang mencakup waktu dan lokasi penelitian, pendekatan yang digunakan dan aktivitas selama di lapangan, serta metode untuk menganalisis hasil penelitian.
- Bab III menyajikan hasil diskusi kelompok terfokus (FGD - *Focus Group Discussion*) di tingkat kabupaten/kota, dan membahas perbandingan antara ranking kecamatan berdasarkan pemetaan kemiskinan dan ranking kecamatan berdasarkan FGD.
- Bab IV menyajikan hasil FGD di tingkat kecamatan, dan membahas perbandingan antara ranking desa/kelurahan berdasarkan pemetaan kemiskinan dan ranking desa/kelurahan berdasarkan FGD.
- Bab V menyajikan hasil FGD di tingkat desa, dan membahas perbandingan antara proporsi penduduk miskin berdasarkan pemetaan kemiskinan dengan proporsi penduduk miskin berdasarkan persepsi masyarakat lokal.
- Bab VII adalah kesimpulan berupa poin-poin penting dari temuan penelitian verifikasi.

II. METODE VERIFIKASI

2.1. Lokasi dan Waktu

Studi verifikasi peta kemiskinan 2010 dilakukan di tiga propinsi, yaitu Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan, yang mewakili wilayah Indonesia Barat dan Timur. Di tiap propinsi akan dikunjungi 1 kabupaten, yaitu Kabupaten Bangka Barat (Bangka Belitung), Kabupaten Sumbawa (NTB), dan Kota Parepare (Sulawesi Selatan).

Tabel 1. Kondisi Kemiskinan di Kabupaten/Kota Sampel 2010

Wilayah	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Penduduk	Tingkat Kemiskinan (GKN)	Tingkat Kemiskinan (\$2 PPP)	Tingkat Ketimpangan (indeks Gini)
Kab. Bangka Barat	44.862	175.150	5,25%	37,42%	0,25
Kab. Sumbawa Barat	29.273	114.951	21,74%	52,89%	0,39
Kota Parepare	28.888	129.262	6,53%	38,07%	0,30

Daerah sampel tersebut dipilih untuk mewakili kategori tingkat kemiskinan dan jenis penghidupan. Kabupaten Bangka Barat mewakili Indonesia bagian barat dengan tingkat kemiskinan yang relatif rendah (5,25%) dan merupakan wilayah dengan tipe perdesaan. Kabupaten Sumbawa Barat mewakili Indonesia wilayah timur dengan tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional (21,74%) dengan karakteristik wilayah perdesaan. Kota Parepare mewakili Indonesia bagian timur dengan tingkat kemiskinan yang relatif rendah (6,53%) dengan karakteristik wilayah perkotaan.

Tabel 2. Lokasi Penelitian Verifikasi Lapangan Pemetaan Kemiskinan

Kabupaten/Kota	Kecamatan	RSE P0 GKN	Desa/Kelurahan	RSE P0 GKN
Bangka Barat	Muntok	0,32	Air Limau	1,33
			Air Putih	0,61
			Belo Laut	0,36
	Simpang Teritip	0,14	Simpang Gong	0,71
			Kundi	0,43
			Peradong	0,24
Sumbawa Barat	Poto Tano	0,19	Tua Nanga	0,34
			Kiantar	0,44
			Senayan	0,53
	Maluk	0,63	Maluk	0,67
			Pasir Putih	1,59
			Bukit Damai	1,08
Parepare	Ujung	0,16	Lappade	0,22
			Mallusetasi	0,58
			Ujung Bulu	0,31
	Bacukiki	0,07	Wattang Bacukiki	0,12
			Lompoe	0,15
			Galung Maloang	0,11

Di setiap kabupaten, sebanyak dua kecamatan dipilih yaitu yang memiliki nilai *relative standard error* (RSE) paling rendah dan paling tinggi untuk penghitungan tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional. Dari setiap kecamatan tersebut, tiga desa dipilih sebagai sampel berdasarkan nilai RSE desa mulai dari terendah, menengah dan tertinggi. RSE menjadi acuan pemilihan sampel karena rendah tingginya RSE menjadi salah satu ukuran presisi tidaknya hasil penghitungan kemiskinan. Oleh karena itu menjadi penting untuk melihat lebih dalam mengenai kondisi desa/kelurahan dan kecamatan yang nilai RSE nya berbeda jauh. Sehingga diharapkan ada penjelasan untuk bagaimana menginterpretasikan wilayah-wilayah dengan RSE yang bervariasi. Kegiatan lapangan dalam studi verifikasi ini dilaksanakan pada bulan Mei dan Juni 2013 dimana tim peneliti berada di lokasi penelitian selama 16 hari.

2.2. Pendekatan Studi dan Kegiatan Verifikasi Lapangan

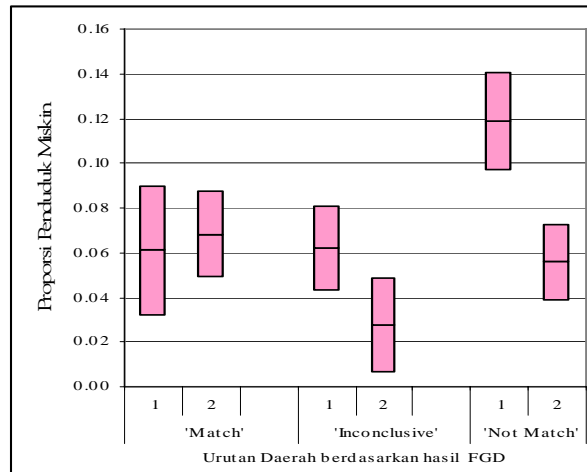
Untuk melihat kondisi kemiskinan di lapangan, digunakan pendekatan kualitatif melalui diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion* – FGD) yang melibatkan pemangku kepentingan yang relevan, pengamatan langsung dan wawancara. FGD dipilih untuk dapat menangkap pandangan pemangku kepentingan lokal secara kolektif, karena pemangku kepentingan lokal dianggap lebih memahami kondisi daerahnya, dibandingkan dengan anggota tim peneliti. Dibandingkan dengan wawancara terhadap individu-individu, adanya interaksi dalam FGD diharapkan dapat mengurangi subyektivitas penilaian perorangan. Dari hasil FGD diharapkan akan dihasilkan kesepakatan mengenai urutan kondisi kemiskinan daerah pada saat studi dilaksanakan dan pada tahun 2010.

Disamping itu, proses interaksi antar stakeholder dalam FGD juga akan membangun kesamaan cara-pandang dalam melihat fenomena kemiskinan di masyarakat. FGD akan dilaksanakan di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Dalam pelaksanaan FGD ini anggota tim peneliti berperan sebagai fasilitator. Untuk melengkapi hasil FGD dan untuk keperluan triangulasi, tim peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan, melakukan wawancara lanjutan untuk menggali berbagai informasi khusus yang dibutuhkan, dan mengamati kondisi masyarakat secara langsung di tingkat desa.

2.3. Perbandingan Hasil Pemetaan Kemiskinan dengan FGD

Untuk melihat apakah hasil pemetaan kemiskinan sesuai dengan kondisi lapangan, urutan daerah berdasarkan estimasi pemetaan kemiskinan diperbandingkan dengan urutan daerah yang disepakati dalam FGD. Cara paling sederhana untuk membandingkan dua urutan adalah dengan mengitung ‘rank correlation’. Jika nilai rank correlation satu (1) berarti urutan daerah berdasarkan kedua pendekatan, yaitu pemetaan kemiskinan dan FGD, sama. Jika nilai rank correlation makin mendekati nol (0) maka makin tidak ada kaitan antara urutan daerah berdasarkan kedua pendekatan tersebut. Meskipun nilai rank correlation dapat memberikan indikasi mengenai tingkat konsistensi antara hasil FGD dan hasil pemetaan kemiskinan, tetapi urutan daerah yang didasarkan pada pemetaan kemiskinan hanya megacu pada titik estimasi saja dan tidak memperhitungkan standar eror dari hasil pemetaan kemiskinan. Padahal, sebagaimana dikemukakan dalam laporan studi uji coba pemetaan kemiskinan, hasil pemetaan kemiskinan harus mempertimbangkan titik estimasi dan standar eror (Suryahadi et.al., 2005).

Mengingat pentingnya menggunakan titik estimasi dan standar eror sekaligus, maka juga dilihat perbandingan urutan pasangan daerah. Perbandingan urutan antara dua daerah dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu: (lihat Gambar 1.)



Gambar 1. Contoh tiga kategori hasil perbandingan pasangan daerah

1. Sesuai – ‘Match’, jika urutan daerah berdasarkan titik estimasi pemetaan kemiskinan sama dengan urutan daerah berdasarkan FGD;
2. Tidak dapat disimpulkan – ‘Inconclusive’, jika urutan daerah berdasarkan titik estimasi pemetaan kemiskinan tidak sama dengan urutan daerah berdasarkan FGD, tetapi ada ‘overlap’ dari kisaran estimasi hasil pemetaan kemiskinan kedua daerah tersebut;
3. Tidak sesuai – ‘Not-Match’, jika urutan daerah berdasarkan titik estimasi pemetaan kemiskinan tidak sama dengan urutan daerah berdasarkan FGD dan tidak ada ‘overlap’ dari kisaran estimasi hasil pemetaan kemiskinan kedua daerah tersebut.

Di tingkat desa, penelitian ini mencoba membandingkan antara proporsi penduduk miskin berdasarkan klasifikasi kesejahteraan yang dikemukakan oleh masyarakat dengan kisaran estimasi angka kemiskinan yang dihasilkan pemetaan kemiskinan.

III. PERBANDINGAN KEMISKINAN ANTARKECAMATAN

3.1. Kabupaten Bangka Barat

3.1.1. Gambaran Umum Kabupaten

Pada tahun 2010, Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 5 kecamatan yang secara keseluruhan mencakup 64 desa/kelurahan, 95 RW, 549 RT, dan 172 dusun dengan seluruh wilayahnya merupakan dataran dan pesisir pantai. Kabupaten ini merupakan daerah yang strategis ditinjau dari sudut geografisnya. Hal ini dikarenakan posisi Kabupaten Bangka Barat dekat dengan Pulau Sumatera sehingga menjadi pintu gerbang masuknya barang dan penumpang dari Pulau Sumatera yang melewati laut.

Tabel 3. Kondisi Persebaran Penduduk Kabupaten Bangka Barat, 2010

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km ²)
Muntok	505.94	46,748	92.40
Simpang Teritip	637.35	26,236	41.16
Kelapa	573.80	31,520	54.93
Tempilang	461.02	25,723	55.80
Jebus*	706.04	48,574	68.80
Total	2,883.70	178,801	62.00

*masih termasuk data Kecamatan Parit Tiga

Sumber: BPS (2011)

Tidak terjadi pemekaran wilayah di tingkat desa/kelurahan pada tahun 2010, namun terjadi pemekaran di tingkat kecamatan sehingga total seluruh kecamatan di kabupaten ini sebanyak 6 kecamatan. Pemekaran kecamatan terjadi di wilayah Jebus, yang kemudian mekar menjadi Parit Tiga dan Jebus. Seluruh wilayah daratan Kabupaten Bangka Barat terletak di Pulau Bangka dengan total luas wilayah lebih kurang 2,883.70 km² atau 288,370 Ha. Kecamatan Simpang Teritip merupakan wilayah kecamatan terluas di kabupaten ini dengan persentase mencapai 22.10 persen. Pada tahun 2010 jumlah penduduk sebanyak 178,801 jiwa dan sebaran penduduk yang paling banyak terdapat di Kecamatan Jebus yakni sebanyak 48,574 jiwa. Mata pencaharian penduduk pada umumnya adalah bertani dan menambang, baik petani karet, sawit maupun lada. Selain itu, sebagian besar juga menambang timah karena wilayah kabupaten ini merupakan salah satu wilayah yang menjadi pusat produksi timah yang ada di Provinsi Bangka Belitung.

3.1.2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Antarkecamatan

Berdasarkan hasil diskusi kelompok terpusat (FGD) dengan beberapa dinas yang ada di kantor Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat, antara lain dari Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, dan Bappeda, terdapat tujuh indikator yang digunakan untuk menentukan kesejahteraan masyarakat antarkecamatan, yaitu pendidikan, kesehatan, aset, penghasilan, sarana dan prasarana, ibadah, serta keamanan. Indikator yang digunakan ini hampir sama dengan indikator yang digunakan dalam melihat kesejahteraan masyarakat kabupaten dan kecamatan lainnya.

Indikator pendidikan, pendidikan didefinisikan sebagai kondisi tingkat pendidikan masyarakat di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Barat serta pembangunan fasilitas sekolahnya. Selain itu, indikator ini juga bermaksud untuk menilai tingkat kesadaran masyarakat mengenai pendidikan.

Indikator kesehatan, kesehatan dilihat dari kondisi sarana dan prasarana kesehatan termasuk ketersediaan fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK).

Indikator aset, aset merupakan gabungan dari beberapa indikator yakni kendaraan, kondisi lantai rumah, kepemilikan lahan, fasilitas komunikasi, kondisi rumah, sandan, pangan, dan pakaian.

Indikator penghasilan, penghasilan meliputi pendapatan, kebutuhan makan, makanan, serta kemampuan pemenuhan kebutuhan hidup.

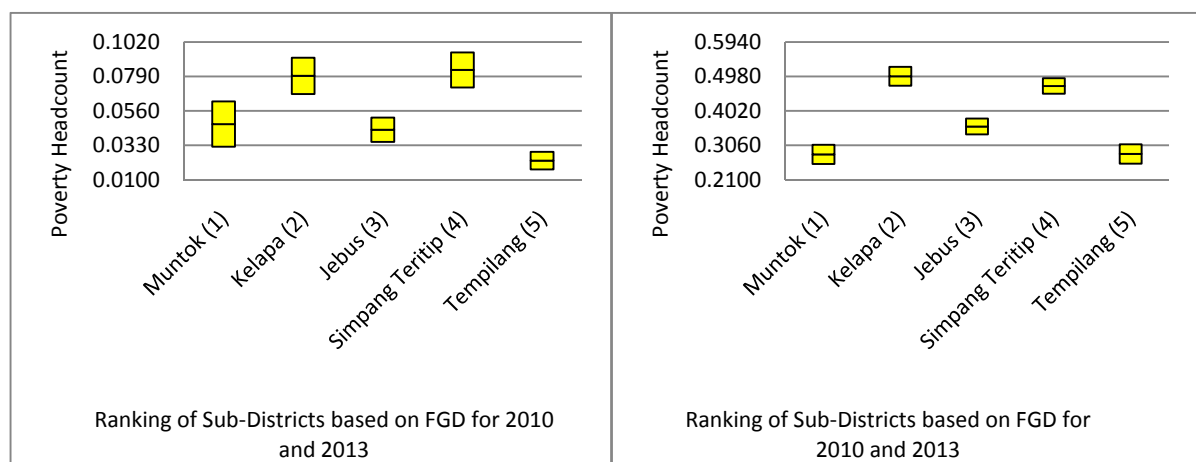
Indikator sarana dan prasarana, sarana dan prasarana didefinisikan sebagai kondisi jalan serta berbagai fasilitas umum yang saat ini sudah tersedia namun sebelumnya belum tersedia.

Indikator ibadah, ibadah dilihat sebagai suatu aset non-material yang dapat menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat, seperti misalnya di beberapa kecamatan yang mayoritas penduduknya etnis tertentu dengan keberadaan tempat ibadah tertentu yang selalu penuh jika ada acara-acara keagamaan, biasanya daerah tersebut lebih tinggi tingkat kesejahteraannya.

Indikator keamanan, kecamatan-kecamatan yang kondisi keamanannya kurang baik misalnya, dengan banyaknya kasus perkelahian, akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat meskipun daerah tersebut memiliki sumber daya alam yang lebih banyak dibandingkan dengan di daerah lain.

3.1.3. Perbandingan Urutan Kesejahteraan Antarkecamatan

Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2010 terdiri dari lima kecamatan yakni Kecamatan Muntok, Kelapa, Jebus, Simpang Teritip, dan Tempilang. Namun di awal tahun 2011, jumlah seluruh kecamatan berubah menjadi enam dengan ditambahkannya Kecamatan Parit Tiga yang berasal dari pemekaran Kecamatan Jebus. Pemekaran dilakukan atas usulan dari masyarakat yang ada di wilayah tersebut, lalu kemudian setelah dilakukan kajian, Parit Tiga kemudian memisahkan diri dari Kecamatan Jebus dan membentuk kecamatan baru.



Gambar 2. Perbandingan urutan kesejahteraan antarkecamatan berdasarkan estimasi peta kemiskinan GKN (kiri) dan \$2 PPP (kanan) dengan FGD di Kabupaten Bangka Barat, 2010 dan 2013

Dengan kondisi peringkat satu adalah kecamatan yang paling sejahtera, urutan kesejahteraan antarkecamatan di Kabupaten Bangka Barat berdasarkan penghitungan menggunakan GKN adalah Kecamatan Tempilang, Jebus, Muntok, Kelapa, dan Simpang Teritip.

Hasil FGD untuk kondisi tahun 2013 menunjukkan urutan kesejahteraan antarkecamatan bila diurutkan dari yang paling sejahtera diperoleh Kecamatan Muntok sebagai wilayah yang paling sejahtera, diikuti oleh Kelapa, kemudian Jebus, Simpang Teritip, dan Tempilang. Kondisi urutan kesejahteraan di tahun 2013 ini sama dengan urutan kesejahteraan pada tahun 2010. Masyarakat di tingkat kabupaten, dalam hal ini diwakilkan oleh peserta FGD, menilai bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan tetap berlangsung di seluruh kecamatan, meskipun tidak merubah urutan kesejahteraan antarkecamatan.

Dengan kondisi peringkat satu lebih sejahtera, urutan kesejahteraan antarkecamatan di Kabupaten Bangka Barat berdasarkan penghitungan pemetaan kemiskinan dengan menggunakan garis kemiskinan \$2 PPP adalah Kecamatan Muntok, Tempilang, Jebus, Simpang Teritip dan Kelapa. Urutan kesejahteraan antarkecamatan di Kabupaten Bangka Barat yang menggunakan GKN berubah pada saat garis kemiskinan yang digunakan adalah \$2 PPP. Seluruh kecamatan mengalami perubahan urutan jika disesuaikan dengan garis kemiskinan \$2 PPP. Jika dengan menggunakan GKN urutan pertama adalah Kecamatan Tempilang, maka pada saat menggunakan garis kemiskinan \$2 PPP urutan pertama menjadi Kecamatan Muntok. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah Kecamatan Muntok yang pendapatan per kapitanya terletak di antara GKN dan garis kemiskinan \$2 PPP relatif lebih besar jumlahnya jika dibandingkan dengan masyarakat di Kecamatan Tempilang. Perubahan urutan kesejahteraan yang terjadi di setiap kecamatan jika garis kemiskinan yang digunakan berubah disebabkan oleh variasi kondisi kesejahteraan masyarakat di setiap kecamatan yang cukup besar. Sehingga perubahan batas garis kemiskinan menyebabkan perubahan kondisi masyarakat yang tergolong miskin dan tidak miskin dengan sangat signifikan.

Perbandingan antara hasil penghitungan pemetaan kemiskinan berdasarkan GKN dengan hasil FGD untuk kondisi tahun 2010 dan 2013 menunjukkan bahwa adanya kesesuaian atau *match* sebesar 0.40, *inconclusive* sebesar 0.10, dan tidak sesuai atau *not match* sebesar 0.50. Dengan kata lain, urutan kesejahteraan antarkecamatan di Kabupaten Bangka Barat berdasarkan GKN memiliki korelasi yang menengah yaitu 0.40 untuk tahun 2010 dan 2013.

Tabel 4. Perbandingan Urutan Kesejahteraan Antarkecamatan Hasil FGD dengan Pemetaan Kemiskinan berdasarkan GKN dan Garis Kemiskinan \$2 PPP di Kabupaten Bangka Barat, 2010 dan 2013

Tahun	Jumlah Kecamatan	N	Rank Correlation	Match		Inconclusive		Not Match	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
GKN:									
2010	5	10	0.30	4	40	1	10	5	50
2013	5	10	0.30	4	40	1	10	5	50
\$2 PPP:									
2010	5	10	0.10	5	50	0	0	5	50
2013	5	10	0.10	5	50	0	0	5	50

Sementara itu, perbandingan antara hasil penghitungan pemetaan kemiskinan berdasarkan \$2 PPP dengan hasil FGD untuk kondisi tahun 2010 dan 2013 menunjukkan bahwa adanya

kesesuaian sebesar 0.50, inkonklusif sebesar 0, dan tidak sesuai sebesar 0.50. Dengan kata lain, urutan kesejahteraan antarkecamatan di Kabupaten Bangka Barat berdasarkan garis kemiskinan \$2 PPP memiliki korelasi yang menengah yakni 0.50 untuk tahun 2010 dan 2013.

Tingkat konsistensi urutan kecamatan antara hasil estimasi pemetaan kemiskinan dengan hasil FGD tergolong rendah, terlihat dari rank correlation sebesar 0.30 untuk pemetaan kemiskinan berdasarkan GKN dan sebesar 0.10 untuk pemetaan kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan \$2 PPP. Dengan konsistensi yang rendah ini, jumlah kasus atau pasangan daerah yang sesuai atau *match* juga menengah, yakni 4 kasus untuk pemetaan kemiskinan berdasarkan GKN (40%) dan 5 kasus jika berdasarkan garis kemiskinan \$2 PPP (50%) dari masing-masing 10 kombinasi pasangan daerah. Oleh karena itu, berdasarkan perbandingan ini, kondisi kesejahteraan antarkecamatan di Kabupaten Bangka Barat relatif memiliki kedekatan yang lebih sesuai dengan kondisi kesejahteraan berdasarkan garis kemiskinan \$2 PPP dibandingkan dengan GKN.

Untuk kasus *inconclusive*, tidak ada pasangan daerah yang tidak dapat disimpulkan hubungannya berdasarkan hasil estimasi pemetaan garis kemiskinan \$2 PPP. Sementara itu untuk kasus *inconclusive* berdasarkan hasil estimasi pemetaan GKN, hanya terjadi antara Kecamatan Muntok dengan Jebus. Berdasarkan hasil estimasi pemetaan kemiskinan GKN, Kecamatan Jebus menempati peringkat kesejahteraan lebih tinggi dibandingkan dengan Kecamatan Muntok, namun hal ini berbeda dengan menurut persepsi masyarakat di tingkat kabupaten. Kecamatan Muntok dianggap sebagai wilayah yang lebih sejahtera dibandingkan dengan Jebus dan relatif lebih sejahtera juga dibandingkan dengan kecamatan lain karena Kecamatan Muntok merupakan kota lama yang menjadi ibukota Kabupaten Bangka Barat. Selain itu, hal ini juga disebabkan karena pada akhir tahun 2010 dan awal tahun 2011 terjadi pemekaran Kecamatan Jebus menjadi Kecamatan Jebus dan Kecamatan Parit Tiga. Kecamatan Parit Tiga merupakan penghasil utama tambang timah di Kabupaten Bangka Barat, dan merupakan wilayah kuasa pertambangan (KP) utama dari perusahaan timah negara yakni PT Timah. Kondisi kesejahteraan di Kecamatan Parit Tiga saat ini memang lebih maju dan sejahtera dibandingkan dengan Kecamatan Muntok. Hal ini ditunjukkan dengan hasil utama timahnya, pertokoan, dan perbankuan yang telah banyak membuka cabang di Kecamatan Parit Tiga, sementara Kecamatan Muntok lebih berperan sebagai wilayah administratif pemerintahan kabupaten.

Tabel 5. Peringkat Kecamatan Berdasarkan FGD dan Wawancara Mendalam di Tingkat Kabupaten Bangka Barat, 2010 dan 2013

No.	Sub-District	FGD		Informan									
				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)	
		2010	2013	2010	2013	2010	2013	2010	2013	2010	2013	2010	2013
1	Muntok	1	1	3	3	2	2	2	2	4	4	1	1
2	Simpang Teritip	4	4	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5
3	Jebus	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
4	Kelapa	2	2	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3
5	Tempilang	5	5	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4

Untuk kasus *not match*, dari lima pasang yang tidak sesuai, empat diantaranya berkaitan dengan kecamatan-kecamatan yang diperbandingkan dengan Kecamatan Tempilang. Peserta FGD menilai kecamatan ini sebagai kecamatan yang tingkat kesejahteraannya paling rendah, hal ini disebabkan oleh:

- Kecamatan Tempilang dinilai memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah bila dilihat dari indikator kesehatan, aset, dan penghasilan. Bahkan beberapa peserta FGD memberikan nilai 5 (paling buruk).
- Hasil FGD menempatkan Kecamatan Tempilang sebagai kecamatan yang paling tidak sejahtera karena kondisi kecamatan ini yang letaknya berada di pelosok dan memiliki akses yang jauh dan sulit dijangkau. Kecamatan ini berada paling jauh dari ibukota kabupaten, yakni sekitar 100 km dari Kecamatan Mauntok. Kecamatan terdekat dari Tempilang ada Kecamatan Kelapa, dan jarak antara kedua kecamatan ini adalah sejauh 30 kilometer.
- Selain itu, peserta FGD memberikan nilai untuk kondisi sarana dan prasarana di wilayah Kecamatan Tempilang sebesar 2.92. Nilai ini merupakan nilai yang paling rendah yang ada di penilaian kecamatan berdasarkan indikator sarana dan prasarana.
- Kecamatan Tempilang merupakan wilayah perkebunan. Di wilayah Kabupaten Bangka Barat, dan menurut persepsi masyarakat di wilayah ini, wilayah yang sejahtera adalah yang memiliki tambang timah, kemudian diikuti dengan wilayah yang memiliki perkebunan lada dan karet
- Hasil penelusuran wawancara mendalam dengan informan di tingkat kabupaten, empat dari lima informan menempatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Tempilang berada di urutan ke-4, hanya satu informan yang menempatkan Tempilang di urutan ke-2.

3.2. Kabupaten Sumbawa Barat

3.2.1. Gambaran Umum Kabupaten

Kabupaten Sumbawa Barat terdiri dari 8 kecamatan yaitu Kecamatan Taliwang, Jereweh, Brang Rea, Sekongkang, Seteluk, Brang Ene, Maluk dan Kecamatan Poto Tano. Pada saat berdiri pada tahun 2004 Kabupaten Sumbawa Barat terdiri dari 5 kecamatan yaitu Kecamatan Taliwang, Jereweh, Brang Rea, Sekongkang dan Kecamatan Seteluk. Kemudian pada tahun 2007, 3 kecamatan mengalami pemekaran yaitu Kecamatan Taliwang, Seteluk dan Jereweh. Kecamatan Taliwang mekar kemudian terbentuk Kecamatan Brang Ene. Kecamatan Jereweh mekar membentuk Kecamatan Maluk dan Kecamatan Seteluk mekar kemudian terbentuk Kecamatan Poto Tano.

Tabel 6. Luas dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat

Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk
1. Sekongkang (6 Desa)	372,42	8.295
2. Jereweh (4 Desa)	260,19	8.489
3. Maluk (5 Desa)	92,42	12.098
4. Taliwang (14 Desa)	375,93	44.578
5. Brang Ene (5 Desa)	140,90	5.139
6. Brang Rea (9 Desa)	212,07	12.623
7. Seteluk (8 Desa)	236,21	15.511
8. Poto Tano (8 Desa)	158,88	9.379

Luas wilayah Kabupaten Sumbawa Barat 1.849,02 Km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 116.112 jiwa. Dari 8 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Sumbawa Barat, Kecamatan Taliwang memiliki wilayah terluas dan jumlah penduduk terbanyak dengan tingkat kepadatan 119 jiwa/km². Sedangkan Kecamatan Maluk memiliki luas terkecil dengan kepadatan tertinggi 131 jiwa/km².

Matapencarian sebagian besar masyarakat adalah bertani padi dan palawija. Tanaman palawija yang paling banyak ditanam adalah jagung, kedelai dan kacang hijau. Pertanian padi banyak terdapat di Kecamatan Taliwang sedangkan pertanian jagung banyak terdapat di Kecamatan Poto Tano. Terbatasnya sarana irigasi menyebabkan hasil panen masyarakat tidak maksimal. Sebagian besar lahan pertanian masih menggunakan sistem tadah hujan dengan rata-rata panen setahun sekali. Selain bertani, masyarakat juga berternak sapi, kerbau, kambing dan ayam.

Selain itu terdapat juga masyarakat yang bekerja sebagai TKI di luar negeri dengan jumlah yang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Adanya pilihan usaha lain dan banyaknya terjadi kekerasan terhadap TKI di luar negeri menyebabkan keinginan untuk menjadi TKI menurun. Umumnya mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Saudi Arabia untuk tenaga kerja wanita sedangkan tenaga kerja laki-laki bekerja di perkebunan yang banyak terdapat di Malaysia.

Adanya sumber daya alam tambang emas dan tembaga yang dikelola oleh PT Newmont memberikan dampak ekonomi yang cukup besar di Kabupaten Sumbawa Barat, terutama di 3 kecamatan lingkaran tambang yaitu Kecamatan Sekongkang, Maluk dan Jereweh. Penambangan tersebut banyak menyerap tenaga kerja yang tidak hanya berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat tetapi juga dari luar kabupaten.

3.2.2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Antarkecamatan

Dari hasil diskusi kelompok terarah di tingkat kabupaten yang diikuti oleh Bappeda, dinas-dinas pemerintahan dan universitas, ada 7 indikator yang dianggap paling menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu (tidak berdasarkan urutan ranking):

Indikator pendidikan dilihat dari tingkat pendidikan orang tua dan anak, akses dan fasilitas pendidikan, kemampuan orang tua menyekolahkan anak mereka dan penguasaan dan akses masyarakat terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Fasilitas pendidikan meliputi sarana dan prasarana pendidikan. Kelompok masyarakat yang sejahtera ditandai dengan tingkat pendidikan orang tua dan anak sampai tingkat SMA dan universitas.

Pendidikan di Kecamatan Sekongkang dinilai rendah karena masih ada desa yang aksesnya tidak memadai seperti di Desa Tatar, dan Talonang Baru walaupun sarana dan prasarana pendidikan di kecamatan tersebut sudah memadai. Sedangkan di Kecamatan Taliwang mendapat nilai paling tinggi karena tidak ada hambatan sama sekali untuk akses pendidikan dan sarana prasarana pendidikan.

Indikator penghasilan terdiri atas sumber penghasilan masyarakat, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan, mata uang dan daya beli. Sumber penghasilan terbesar di Kabupaten Sumbawa Barat berasal dari sektor pertambangan. Masyarakat yang bekerja sebagai karyawan di sektor pertambangan seperti PT Newmont atau di perusahaan-perusahaan pengelolaan tambang lainnya dinilai lebih sejahtera daripada yang bekerja di sektor lainnya. Selain itu TKI yang

bekerja di luar negeri juga dianggap lebih sejahtera karena memiliki penghasilan dengan mata uang yang berbeda yang nilainya lebih tinggi daripada rupiah. Banyaknya masyarakat di Kecamatan Maluku yang bekerja sebagai karyawan PT Newmont menyebabkan penghasilan masyarakat di kecamatan ini mendapat nilai paling tinggi. Sedangkan kecamatan yang masyarakatnya bekerja di sektor pertanian mendapat nilai rendah. Kecamatan Sekongkang dinilai rendah penghasilannya karena wilayah tersebut masih memiliki daerah transmigrasi yang penghasilannya dinilai masih rendah.

Indikator SDA, tidak hanya dilihat dari hasil mineral/tambang yang dimiliki wilayah tersebut tetapi juga tingkat kesuburan tanah, ketersediaan irigasi, hasil bumi, jenis komoditas yang bisa ditanam, topografi, dan curah hujan. Sekitar 70% wilayah di Kabupaten Sumbawa Barat adalah hutan. Daerah pegunungan cenderung terisolir dan tingkat kemiskinannya cenderung tinggi karena tingkat pemanfaatan lahannya rendah. Daerah pesisir juga dinilai lebih miskin daripada daratan karena, pendapatan masyarakat di wilayah tersebut tidak rutin.

Tingginya kandungan SDA yang dimiliki oleh Kecamatan Sekongkang, Jereweh dan Brang Rea menyebabkan ketiga kecamatan ini mendapat nilai tertinggi. Sedangkan Kecamatan Maluku walaupun memiliki penghasilan tertinggi tetapi sumber daya alamnya dinilai rendah.

Indikator kesehatan, dinilai berdasarkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap kesehatan termasuk kepercayaan masyarakat terhadap sandro atau dukun, pola konsumsi pangan, pola hidup sehat, fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, jenis penyakit dan akses. Kesehatan masyarakat Poto Tano dinilai rendah karena kecamatan ini sering terserang penyakit.

Indikator sosial budaya, di masyarakat dinilai berdasarkan ikatan sosial yang terdapat di masyarakat seperti kegiatan gotong-royong. Tingginya tingkat gotong royong masyarakat mencerminkan tingginya tingkat kesejahteraan mereka. Selain itu budaya kerja masyarakat yang dapat dinilai melalui produktivitas dan motivasi kerja mereka juga dinilai berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Rendahnya budaya gotong royong di Kecamatan Maluku, Sekongkang dan Poto Tano menyebabkan nilai sosial budaya di kecamatan tersebut rendah.

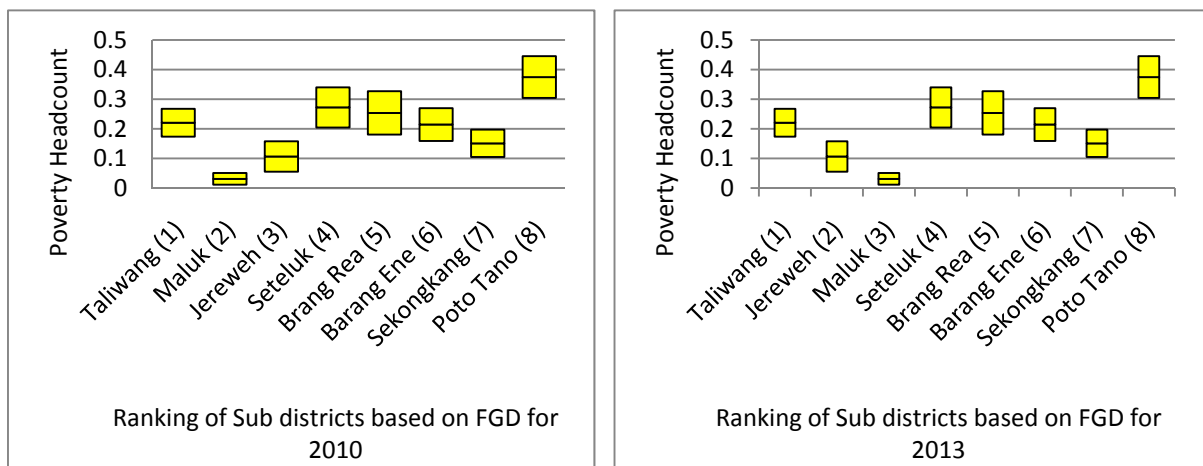
Indikator infrastruktur, kesenjangan wilayah, transportasi, irigasi, pasar, air bersih, listrik dan ATM adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian untuk indikator infrastruktur. Kecamatan Maluku mendapat nilai paling tinggi karena memiliki infrastruktur yang lengkap dan sudah memiliki bandara. Kecamatan Poto Tano walaupun memiliki dermaga, dinilai rendah karena tidak memiliki pasar. Sedangkan Kecamatan Sekongkang mendapat nilai rendah karena di wilayah Talonang masih memiliki wilayah yang akses jalannya jelek.

Indikator agama, dapat dinilai berdasarkan tingkat iman dan taqwa masyarakat, dan tingkat pengetahuan dan pengamalan keagamaan terhadap kehidupan sehari-hari. Akan tetapi karena sulitnya mengukur tingkat keimanan dan ketaqwaan masyarakat menyebabkan setiap kecamatan mendapat nilai yang sama.

3.2.3. Perbandingan Urutan Kesejahteraan Antarkecamatan

Berdasarkan hasil FGD urutan tingkat kesejahteraan yang sesuai dengan perhitungan statistik yang menggunakan garis kemiskinan nasional hanya Poto Tano yang berada pada urutan terendah baik untuk keadaan tahun 2010 dan 2013. Hasil pemeringkatan FGD 2010 lebih mendekati perhitungan statistik dibandingkan dengan FGD tahun 2013 dengan nilai korelasi 0.43 dan 0.4 untuk tahun 2010 dan 2013. Hal ini diikuti dengan nilai kesuaian (match) yang

lebih tinggi untuk FGD 2010 dibandingkan dengan FGD 2013 dengan nilai masing-masing 64% dan 57% dan ketidaksesuaian (not match) sebesar 11% dan 14% untuk masing-masing tahun.



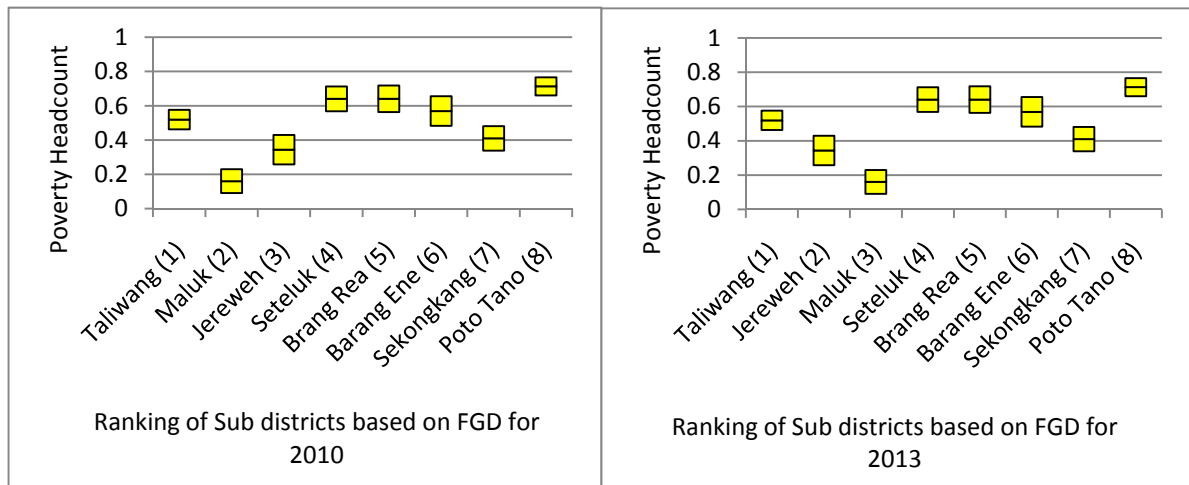
Gambar 3. Perbandingan urutan kesejahteraan antarkecamatan berdasarkan estimasi peta kemiskinan GKN dengan FGD di Kabupaten Sumbawa Barat, 2010 dan 2013

Tahun 2013, Kecamatan Taliwang dinilai paling sejahtera karena memiliki akses, sarana dan prasarana pendidikan yang lebih baik. Selain itu sebagai ibukota kabupaten, Taliwang memiliki infrastruktur yang baik. Kecamatan Maluk, walaupun berdasarkan fasilitas infrastruktur dan tingkat penghasilan masyarakatnya paling tinggi akan tetapi kurangnya SDA dan budaya gotong-royong di kecamatan tersebut menyebabkan kecamatan ini menempati peringkat ketiga dibawah Kecamatan Taliwang dan Jereweh. Dibandingkan dengan Kecamatan Maluk, Kecamatan Jereweh lebih sejahtera karena memiliki SDA yang melimpah. Kecamatan Sekongkang dan Poto Tano dinilai paling rendah tingkat kesejahteraannya karena masih memiliki desa yang aksesnya sulit dan infrastruktur yang kurang memadai seperti Desa Tatar di Kecamatan Sekongkang dan Desa Mantar di Kecamatan Poto Tano.

Tabel 7. Perbandingan Urutan Kesejahteraan Antarkecamatan Hasil FGD dengan Pemetaan Kemiskinan berdasarkan GKN dan Garis Kemiskinan \$2 PPP di Kabupaten Sumbawa Barat, 2010 dan 2013

Tahun	Jumlah Kecamatan	N	Rank Correlation	Match		Inconclusive		Not Match	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
GKN:									
2010	8	28	0.43	18	64	7	25	3	11
2013	8	28	0.40	16	57	8	29	4	14
\$2 PPP:									
2010	8	28	0.55	20	71	3	11	5	18
2013	8	28	0.52	19	68	3	11	6	21

Jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2010, perubahan tingkat kesejahteraan hanya terjadi pada Kecamatan Maluku dan Jereweh. Kecamatan Maluku yang pada tahun 2013 menempati peringkat ketiga, pada tahun 2010 menempati urutan kedua lebih tinggi dari Kecamatan Jereweh. Pada tahun 2010, tingkat penghasilan masyarakat Maluku lebih tinggi dan tahun tersebut dinilai sebagai masa kejayaan kecamatan tersebut.



Gambar 4. Perbandingan urutan kesejahteraan antarkecamatan berdasarkan estimasi peta kemiskinan \$2 PPP dengan FGD di Kabupaten Sumbawa Barat, 2010 dan 2013

Tingkat korelasi antara FGD tingkat kesejahteraan dan hasil perhitungan statistik yang menggunakan garis \$2 PPP lebih baik daripada dengan menggunakan garis kemiskinan nasional. Nilai korelasi tahun 2010 lebih baik dari tahun 2013 yaitu 0.55 dan 0.52 untuk masing-masing tahun. 71% kombinasi pasangan kecamatan sesuai, 11% inconclusive dan 18% tidak sesuai pada tahun 2010 dan 68% sesuai, 11% inconclusive, 21% tidak sesuai pada tahun 2013. Berdasarkan peringkat nilai tingkat kesejahteraan yang berbeda dengan hasil perhitungan garis kemiskinan nasional hanya Kecamatan Taliwang dan Brang Ene. Urutan kesejahteraan dengan menggunakan garis \$2 PPP lebih sesuai (match) dengan hasil FGD jika dibandingkan dengan garis kemiskinan nasional.

3.3. Kota Parepare

3.3.1. Gambaran Umum Kota

Parepare merupakan kota dengan luas 99,33 kilometer persegi yang terletak 155 kilometer dari ibukota Sulawesi Selatan, yakni Makassar¹. Sisi bagian barat Kota Parepare berbatasan dengan laut, tepatnya Selat Makassar dan tiga kabupaten yaitu Kabupaten Barru (di selatan), Kabupaten Sidenreng Rappang (di utara), dan Kabupaten Pinrang (di sebelah timur). Keistimewaan Parepare adalah keberadaan Pelabuhan Nusantara milik PT PELNI yang akhirnya membuat Parepare tumbuh sebagai kota perdagangan dan jasa. Hal ini diperkuat oleh lokasi Parepare yang strategis, yakni sebagai penghubung ibukota provinsi Makassar dengan bagian utara Sulawesi Selatan seperti Sidrap dan Pinrang. Kondisi ini mendorong Parepare menjadi tempat persinggahan dan perlintasan. Faktor lokasi ini menjadi sangat penting

¹Data dari Kota Parepare Dalam Angka 2012, BPS (2012)

mengingat terbatasnya sumber daya alam yang potensial untuk dijadikan tumpuan perekonomian. Parepare terbagi dalam 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Ujung, Soreang, Bacukiki, dan Bacukiki Barat. Hampir semua kecamatan memiliki daerah pesisir, kecuali Kecamatan Bacukiki yang merupakan daerah perbukitan.

Secara demografis (Tabel 8), penduduk Parepare terkonsentrasi di dua kecamatan utama yaitu Soreang dan Ujung. Kecamatan Ujung merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak, sekaligus terpadat. Sementara itu, Kecamatan Bacukiki merupakan daerah dengan jumlah penduduk paling sedikit, dengan tingkat kepadatan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Persebaran ini juga terkait dengan karakteristik wilayah masing-masing kecamatan. Kecamatan Ujung dan Soreang merupakan pusat kegiatan utama Parepare, dimana terdapat pelabuhan, perhotelan, dan daerah pertokoan. Sedangkan daerah Bacukiki Barat dan terutama Bacukiki masih memiliki ciri-ciri perdesaan. Kecamatan Bacukiki merupakan kecamatan terluas yang masih didominasi persawahan dan perkebunan dengan topografi wilayah perbukitan. Sedangkan di Kecamatan Bacukiki Barat, yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Bacukiki pada tahun 2008, sudah mulai terjadi urbanisasi dalam bentuk pembangunan perumahan sehingga karakteristik perdesaan semakin berkurang.

Tabel 8. Kondisi Persebaran Penduduk Kota Parepare

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km ²)
Bacukiki	66,70	14.622	219
Bacukiki Barat	13,00	39.486	3.037
Soreang	11,30	32.562	2.881
Ujung	8,33	43.912	5.271
Total (2011)	99,33	130.582	1.314
(2007)	99,33	116.309	1.170

Sumber: BPS (2013)

Secara umum perekonomian Parepare ditopang oleh sektor jasa dan perdagangan. Namun, perbedaan kondisi demografi dan geografi yang disebutkan sebelumnya turut mempengaruhi variasi kegiatan ekonomi di masing-masing kecamatan. Hal ini juga berperan dalam membentuk tingkat dan kondisi kesejahteraan di Parepare. Kecamatan Ujung dan Soreang merupakan daerah perkotaan di pesisir pantai yang menjadi lokasi pertokoan, perhotelan, dan fasilitas umum seperti sekolah, perbankan, kesehatan, dan hiburan. Aktivitas Pelabuhan Nusantara yang terletak di Kecamatan Soreang turut menunjang perekonomian setempat. Sebagai daerah transit, kedatangan orang-orang di Pelabuhan Nusantara menciptakan kebutuhan akan tempat penginapan.

Perdagangan komoditas antar pulau menciptakan kebutuhan akan tenaga buruh dan akses terhadap pasar di sekitar pelabuhan. Salah satu contoh kegiatan ekonomi khas Parepare adalah keberadaan Pasar Cakar di Kecamatan Ujung. Pasar Cakar (cap karung) menyediakan barang-barang hasil sisa ekspor ataupun impor yang dijual dengan harga murah. Sementara di Kecamatan Soreang terdapat Pasar Lakessi yang juga menjadi pusat kegiatan ekonomi. Perkantoran pemerintahan juga terkonsentrasi di dua kecamatan ini sehingga jumlah PNS cukup banyak.

Di sisi lain, di Kecamatan Bacukiki kondisinya sangat berbeda dengan situasi di perkotaan. Di Bacukiki, mayoritas penduduk bekerja sebagai petani baik sawah maupun kebun, dan sebagian kecil tambak. Jumlah masyarakat yang kurang sejahtera di daerah ini masih tinggi. Meskipun demikian, akses transportasi dalam hal ini jalan dan moda transportasi sudah memadai untuk menghubungkan daerah ini ke pusat kota. Rata-rata waktu tempuh dari satu kecamatan ke kecamatan lain kurang dari 30 menit. Infrastruktur dasar seperti transportasi dan jalan di Parepare sudah sangat baik dan merata di seluruh kecamatan. Jalan-jalan utama kota dan kecamatan sudah diaspal sehingga memudahkan angkutan umum (*pete-pete*) dan ojek untuk melintas. Aspek infrastruktur jalan ini menjadi faktor utama pendukung pembangunan di Parepare. Pembangunan jalan secara masif ini sudah dilakukan sejak 2006* sehingga dampak positifnya sudah dirasakan cukup lama oleh masyarakat.

Perubahan arah pembangunan di Parepare mulai dirasakan sejak tahun 2010. Realitas masih adanya daerah yang relatif kurang berkembang seperti di Bacukiki dan makin padatnya daerah Ujung dan Soreang mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) merubah arah kebijakan. Setelah 2010, pembangunan mulai difokuskan di daerah Bacukiki terutama Bacukiki Barat melalui perubahan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang mengatur agar pembangunan perumahan dan fasilitas umum difokuskan di wilayah Bacukiki Barat dan sebagian Bacukiki. Sejak 2010, pembangunan perumahan ramai dilakukan di Bacukiki Barat dan juga sebagian wilayah Bacukiki. Perumahan-perumahan baru ini biasanya ditempati oleh PNS (termasuk guru dan petugas kesehatan) dan juga pemilik-pemilik usaha.

3.3.2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Antarkecamatan

Peringkat kesejahteraan antar kecamatan diperoleh melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara dengan beberapa narasumber di tingkat kota. Berdasarkan hasil FGD dengan berbagai elemen pemerintah daerah dan masyarakat, ditemukan 4 indikator yang digunakan untuk memberi peringkat kesejahteraan antar kecamatan, yaitu:

Indikator pendapatan, dalam memberikan peringkat kesejahteraan berdasarkan pendapatan, peserta FGD mempertimbangkan beberapa aspek, seperti jenis lapangan kerja, pendapatan per kapita, status aset, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Indikator infrastruktur, aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam indikator ini adalah sarana MCK/ sanitasi, sarana transportasi, kondisi jalan, fasilitas listrik dan air, kondisi perumahan, pasar, sarana kesehatan, sarana pendidikan, dan sarana komunikasi.

Indikator kebijakan, peserta FGD berpendapat bahwa indikator kebijakan turut menentukan peringkat kesejahteraan kecamatan. Kebijakan yang dimaksud meliputi jumlah anggaran, rencana tata ruang, strategi pembangunan wilayah, dan usulan prioritas pembangunan.

Indikator tingkat pelayanan, pelayanan yang dimaksud oleh peserta FGD meliputi penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan.

Hasil pemeringkatan kesejahteraan antar kecamatan di Parepare untuk tahun 2013 dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 9. Peringkat Kecamatan Berdasarkan FGD dan Wawancara Mendalam di Tingkat Kota Parepare, 2010 dan 2013

Nama Kecamatan	FGD		Informan			
	2013	2010	(1)	(2)	(3)	(4)
Ujung	2	1	1	1	1	1
Soreang	3	2	2	2	2	2
Bacukiki Barat	1	3	2	2	3	2
Bacukiki	4	4	3	3	4	3

Peserta FGD memberi peringkat 2 untuk Kecamatan Ujung di tahun 2013, sementara keempat narasumber secara terpisah masing-masing memberikan peringkat pertama untuk Kecamatan Ujung. Beberapa narasumber tidak dapat memberikan peringkat yang berbeda untuk Kecamatan Soreang dan Bacukiki Barat karena mereka menilai tingkat kesejahteraan diantara kedua kecamatan tersebut hampir sama. Peserta FGD dan keempat narasumber sepakat untuk menempatkan Kecamatan Bacukiki pada urutan terakhir berdasarkan tingkat kesejahteraannya.

Peringkat kesejahteraan antar kecamatan berdasarkan hasil FGD untuk tahun 2010 terlihat konsisten dengan opini para narasumber. Peserta FGD menilai dalam 3 tahun terakhir terjadi perubahan arah kebijakan dari Pemerintah Kota Parepare yang tengah memfokuskan kegiatan pembangunannya pada dua wilayah yang selama ini dinilai paling kurang sejahtera, yakni Kecamatan Bacukiki Barat dan Kecamatan Bacukiki. Masuknya indikator kebijakan di akhir FGD sebenarnya sempat ditolak oleh beberapa peserta karena dianggap bukanlah indikator yang dapat digunakan untuk menentukan peringkat kesejahteraan kecamatan. Hasil FGD untuk pemeringkatan kesejahteraan antar kecamatan dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 10. Hasil Pemeringkatan Kesejahteraan di Tingkat Kota - Tahun 2013

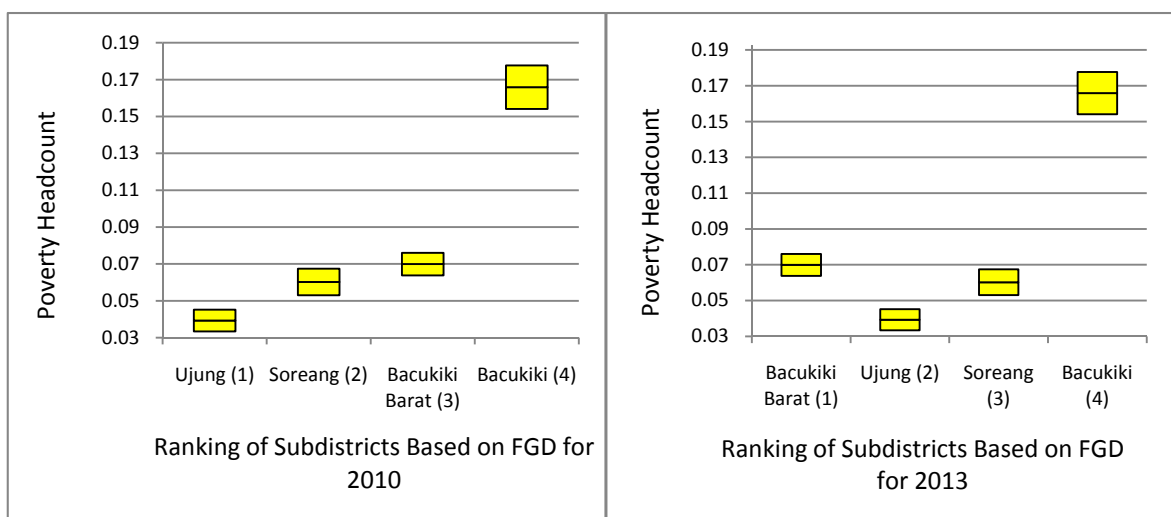
Nama Kecamatan	Pendapatan	Infrastruktur	Kebijakan	Pelayanan	Rata-rata	Peringkat
Ujung	4	4	3	4	3.75	2
Soreang	4	4	3	3	3.5	3
Bacukiki Barat	4	4	4	5	4.25	1
Bacukiki	3	3	4	2	3	4

Kecamatan Bacukiki Barat dan Kecamatan Bacukiki mendapat nilai cukup tinggi (4) untuk indikator kebijakan karena arah pembangunan Pemerintah Kota Parepare yang kini sedang berfokus ke dua wilayah tersebut. Contohnya kebijakan RTRW yang mengkhhususkan pemanfaatan lahan di Bacukiki Barat dan Bacukiki untuk perumahan, mengingat kondisi di Ujung dan Soreang yang sudah sangat padat penduduk. Masuknya perumahan di kedua kecamatan tersebut juga mendorong peningkatan pelayanan masyarakat dan masuknya fasilitas umum seperti kesehatan, keuangan, dan pendidikan. Sebaliknya, Kecamatan Ujung dan Kecamatan Soreang mendapat nilai 3 karena Pemerintah Kota Parepare tidak lagi terlalu memfokuskan pembangunan di kedua wilayah tersebut, mengingat keduanya sudah relatif lebih maju dan berkembang.

Kecamatan Ujung dan Soreang dinilai memiliki pertumbuhan yang statis dalam 3 tahun terakhir dan ketimpangan yang ada semakin meningkat. Ada catatan menarik untuk hasil pemeringkatan kesejahteraan, yakni peserta FGD telah memasukkan aspek *inequality* dalam melakukan pemeringkatan kesejahteraan antar kecamatan. Peserta FGD sepakat bahwa Kecamatan Ujung dan Soreang memang memiliki jumlah penduduk miskin yang sedikit, tetapi jumlah pendapatannya sangat timpang antara penduduk sejahtera dan miskin. Berdasarkan hal itu, peserta FGD menganggap tingkat kesejahteraan di Kecamatan Ujung dan Soreang tidak lebih baik dari Kecamatan Bacukiki Barat. Sementara Kecamatan Bacukiki masih menempati peringkat terbawah untuk tahun 2010 maupun tahun 2013 meskipun Pemerintah Kota Parepare sudah berusaha mengarahkan pembangunan kesana. Menurut peserta FGD, hal ini terjadi karena awalnya Kecamatan Bacukiki merupakan daerah yang paling rendah kesejahteraannya sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membenahi pembangunan dan melihat dampak positif dari kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Parepare.

3.3.3. Perbandingan Urutan Kesejahteraan Antarkecamatan

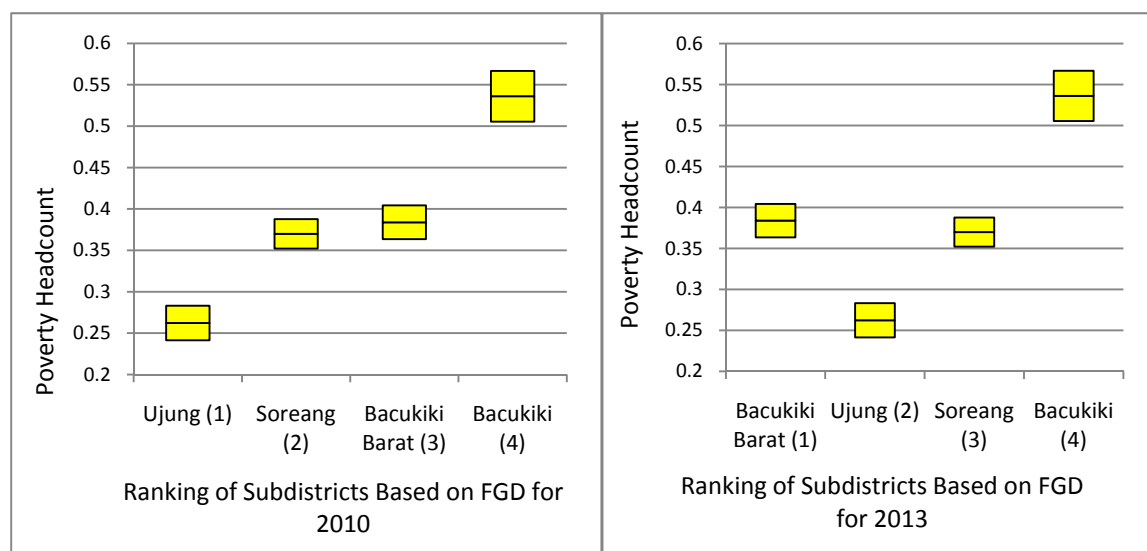
Gambar 5 dan 6 menyajikan perbandingan antara peringkat kesejahteraan hasil diskusi di FGD untuk tahun 2010 dan 2013 dengan peringkat kesejahteraan hasil Poverty Map baik dengan menggunakan Garis Kemiskinan Nasional (GKN) maupun garis kemiskinan \$2 PPP. *Rank correlation* antara peringkat hasil Poverty Map-GKN dan Poverty Map-\$2 PPP menunjukkan angka korelasi yang cukup rendah, yakni 0.40. Namun, berdasarkan hasil *pairwise correlation* antar keempat kecamatan dengan mengikutsertakan *standard error* hasil Poverty Map, hasil estimasi menunjukkan korelasi yang lebih baik dengan hasil FGD 2013. Perbandingan dari keseluruhan 6 pasang kecamatan di tahun 2013 menghasilkan 67% kasus *match*, 17% kasus *inconclusive*, dan hanya 17% saja kasus yang *not match*.



Gambar 5. Perbandingan urutan kesejahteraan antarkecamatan berdasarkan estimasi peta kemiskinan GKN dengan FGD di Kota Parepare, 2010 dan 2013

Korelasi yang rendah untuk peringkat kecamatan hasil estimasi Poverty Map dengan hasil FGD untuk tahun 2013 disebabkan karena kesulitan dalam menyamakan persepsi antar peserta FGD mengenai tingkat kesejahteraan. Peserta FGD juga mengalami kesulitan dalam menyepakati indikator kesejahteraan karena latar belakang instansi yang berbeda-beda. Selain itu, beberapa peserta juga menolak untuk berpendapat karena menganggap pemeringkatan harus didasarkan pada data dan bila didasarkan pada persepsi individu maka hasilnya tidak akan valid.

Ketidaksesuaian antara hasil estimasi Poverty Map (baik GKN maupun \$2 PPP) dengan FGD untuk tahun 2013 diduga terjadi karena beberapa sebab: (1) masuknya faktor kebijakan yang dianggap sangat berpengaruh dan baru terimplementasi selama 3 tahun terakhir, dan (2) adanya perbedaan persepsi kesejahteraan. Namun demikian, perbedaan peringkat kesejahteraan antara Poverty Map dengan hasil FGD hanya terjadi pada tahun 2013, dimana hasil tersebut sebenarnya tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan hasil estimasi mengingat Poverty Map menggunakan data tahun 2010.



Gambar 6. Perbandingan urutan kesejahteraan antarkecamatan berdasarkan estimasi peta kemiskinan \$2 PPP dengan FGD di Kota Parepare, 2010 dan 2013

Rank correlation antara peringkat hasil Poverty Map-GKN dan Poverty Map-\$2 PPP menunjukkan angka korelasi yang sempurna, yakni 1.00. Dalam hal ini estimasi Poverty Map menghasilkan peringkat kesejahteraan antar kecamatan yang sesuai dengan persepsi para peserta FGD untuk tahun 2010. Perbandingan dari keseluruhan 6 pasang kecamatan di tahun 2010 menghasilkan 100% kasus *match*. Secara keseluruhan, hasil korelasi dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 11. Perbandingan Urutan Kesejahteraan Antarkecamatan Hasil FGD dengan Pemetaan Kemiskinan berdasarkan GKN dan Garis Kemiskinan \$2 PPP di Kota Parepare, 2010 dan 2013

Tahun	Jumlah Kecamatan	N	Rank Correlation	Match		Inconclusive		Not Match	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
GKN:									
2010	4	6	1.00	6	100	0	0	0	0
2013	4	6	0.40	4	67	1	17	1	17
\$2 PPP:									
2010	4	6	1.00	6	100	0	0	0	0
2013	4	6	0.40	4	67	1	17	1	17

3.4. Ringkasan: Perbandingan Kemiskinan Antarkecamatan

Tabel 12 dan 13 menyajikan perbandingan ranking kecamatan berdasarkan hasil FGD dan hasil perhitungan poverty map dengan menggunakan Garis Kemiskinan Nasional (GKN) dan garis kemiskinan \$ 2 PPP. Berdasarkan perbandingan hasil FGD dan perhitungan poverty map baik menggunakan GKN atau garis kemiskinan \$ 2 PPP, hasil *rank correlation* dan *pairwise correlation* kecamatan di ketiga kabupaten/kota memperlihatkan angka yang cukup bervariasi. *Rank correlation* tahun 2010 lebih baik daripada tahun 2013 dengan nilai yang tidak jauh berbeda kecuali di Kota Parepare yang menunjukkan korelasi yang sempurna pada tahun 2010 dan korelasi yang rendah pada tahun 2013.

Tabel 12. Ringkasan Perbandingan antara Peringkat Kecamatan FGD dan Pemetaan Kemiskinan berdasarkan GKN di Tiga Kabupaten Sampel, 2010 dan 2013

Kabupaten	Jumlah Kecamatan	N	Rank Correlation		Pair Wise Comparisons dari Ranking berdasarkan Poverty Mapping dan					
					FGD Ranking 2010			FGD Ranking 2013		
			2010	2013	Match	Incon-clusive	Not Match	Match	Incon-clusive	Not Match
Bangka Barat	5	10	0.30	0.30	40%	10%	50%	40%	10%	50%
Sumbawa Barat	8	28	0.43	0.40	64%	25%	11%	57%	29%	14%
Parepare	4	6	1.00	0.40	100%	0%	0%	67%	17%	17%
Total	17	44			64%	18%	18%	55%	23%	23%

Rata-rata perbandingan ranking FGD dengan GKN antar kecamatan di seluruh kabupaten sampel tahun 2010 menunjukkan akurasi yang cukup baik dimana terdapat 64% kombinasi pasangan kecamatan yang sesuai, 18% inconclusive dan 20% tidak sesuai. Akurasi pemetaan kemiskinan menurun untuk kondisi 2013, namun angka kesesuaiannya masih di atas 50%.

Perbaikan akurasi hitungan peta kemiskinan terjadi jika membandingkan ranking FGD dengan versi \$2 PPP dimana untuk kondisi 2010 terdapat 70% kombinasi pasangan yang sesuai, 7% inconclusive dan 23% tidak sesuai. Meski akurasinya juga menurun pada 2013, angka kesesuaian ranking kecamatan masih di atas 60%. Lebih besarnya persentase kombinasi pasangan kecamatan yang sesuai untuk \$2 PPP dibandingkan dengan GKN menandakan bahwa hasil ranking berdasarkan FGD lebih konsisten terhadap perhitungan peta kemiskinan menggunakan garis kemiskinan \$2 PPP daripada menggunakan GKN.

Tabel 13. Ringkasan Perbandingan antara Peringkat Kecamatan FGD dan Pemetaan Kemiskinan berdasarkan GK \$2 PPP di Tiga Kabupaten Sampel, 2010 dan 2013

Kabupaten	Jumlah Kecamatan	N	Rank Correlation		Pair Wise Comparisons of the Ranking berdasarkan Poverty Mapping dan					
					FGD Ranking for 2010			FGD Ranking for 2013		
			2010	2013	Match	Incon-clusive	Not Match	Match	Incon-clusive	Not Match
Bangka Barat	5	10	0.10	0.10	50%	0%	50%	50%	0%	50%
Sumbawa Barat	8	28	0.55	0.52	71%	11%	18%	68%	11%	21%
Parepare	4	6	1.00	0.40	100%	0%	0%	67%	17%	17%
Total	17	44			70%	7%	23%	64%	9%	25%

Kota Parepare adalah satu-satunya daerah yang memiliki tingkat korelasi ranking yang tinggi/semipurnya pada tahun 2010, sedangkan Kabupaten Bangka Barat dan Sumbawa Barat memiliki nilai korelasi yang rendah. Rendahnya nilai korelasi di Kabupaten Bangka Barat dan Sumbawa Barat dapat disebabkan karena model yang digunakan dalam poverty map kurang menggambarkan karakteristik lokal dari kemiskinan di kabupaten tersebut. Selain itu ketidaksesuaian dapat juga disebabkan karena peserta FGD memiliki persepsi bahwa wilayah yang memiliki tambang cenderung lebih sejahtera daripada daerah perkebunan. Ibukota kabupaten juga dianggap lebih sejahtera dan memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Sedangkan berdasarkan poverty map daerah tersebut ternyata juga memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi.

IV. PERBANDINGAN KEMISKINAN ANTARDESA

4.1. Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat

4.1.1. Gambaran Umum Kecamatan

Kecamatan Muntok terdiri dari 7 desa/kelurahan yang secara keseluruhan mencakup 33 RW, 128 RT, dan 17 dusun dengan seluruh wilayahnya merupakan dataran dan pesisir pantai, sebagian besar wilayahnya datar dan sedikit yang berbukit. Seluruh desa/kelurahan memiliki pesisir pantai kecuali Kelurahan Sungai Daeng. Desa-desa di Kecamatan Muntok terdiri atas desa-desa asli. Kecamatan ini berada pada pesisir sebelah barat Pulau Bangka yang menghubungkan ibukota Kabupaten Bangka Barat, Muntok, dengan kecamatan lainnya.

Selama tahun 2010 hingga 2013, tidak terjadi pemekaran di Kecamatan Muntok sehingga total seluruh desa di kecamatan sebanyak 7 desa/kelurahan. Dengan adanya sejumlah 7 desa/kelurahan tersebut, luas wilayah Kecamatan Muntok adalah 404 km² dan pada 2011 jumlah penduduk Kecamatan Muntok sebanyak 43.742 jiwa, dan sebaran yang paling banyak ada di Kelurahan Tanjung sebanyak 14.127 jiwa. Sedang kepadatan penduduk Kecamatan Muntok adalah 108 jiwa per km². Mata pencaharian penduduk pada umumnya adalah bertani dan menambang, baik petani karet, sawit, maupun lada, serta menambang timah. Selain itu, sebagian besar warga bekerja di sektor pemerintahan mengingat Kecamatan Muntok adalah ibukota Kabupaten Bangka Barat.

4.1.2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Antardesa

Berdasarkan hasil diskusi FGD dengan para aparat kecamatan, penyuluh KB, kepala puskesmas, penyuluh statistik, serta kader PKK di Kecamatan Muntok, terdapat enam indikator yang digunakan untuk menentukan kesejahteraan masyarakat antardesa, yaitu pendidikan, kesehatan, interaksi sosial, kondisi rumah, lapangan pekerjaan, dan akses jalan. Indikator yang dikemukakan ini hampir sama dengan indikator yang digunakan dalam melihat kesejahteraan masyarakat kabupaten dan kecamatan lainnya.

Indikator pendidikan, aspek pendidikan yang dimaksud adalah tingkat pendidikannya, rata-rata penduduk yang lebih sejahtera tingkat pendidikannya lebih tinggi. Untuk masyarakat di Kecamatan Muntok, rata-rata sudah tamat SMA.

Indikator kesehatan, dilihat dari peningkatan pemahaman mengenai kesehatan, penurunan angka kelahiran, serta kualitas lingkungan fisik yang berpengaruh bagi kesehatan seperti sistem drainase dan sanitasi, serta berbagai akses terhadap kesehatan.

Indikator interaksi sosial, antara lain dilihat dari ketersediaan fasilitas pilihan hiburan yang lebih banyak, selain itu juga kondisi kesejahteraan yang tinggi ditunjukkan dengan kondisi masyarakatnya yang sudah dapat berproses dan bertoleransi antara satu dengan yang lain, gotong-royong, hiburan dan bakti sosial.

Indikator kondisi rumah, masyarakat menilai bahwa kondisi rumah dilihat dari kondisi tempat tinggalnya, jika sudah sejahtera biasanya dinding rumah sudah terbuat dari beton.

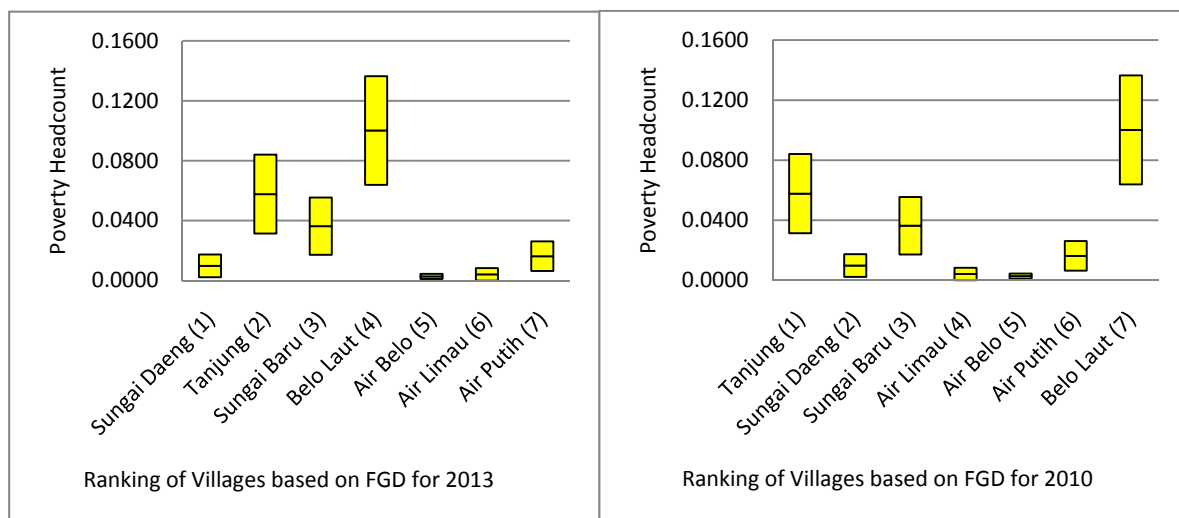
Indikator lapangan pekerjaan, masyarakat membandingkan kondisi kesejahteraan melalui tingkat daya beli masyarakat, termasuk di dalamnya aset dan pendapatan. Rata-rata penduduk yang lebih

sejahtera memiliki kendaraan minimal roda dua dan untuk karakteristik masyarakat di Bangka Barat, biasanya setiap rumah masing-masing memiliki minimal satu kendaraan roda dua.

Indikator akses jalan, dilihat dari kondisi infrastruktur jalan, termasuk akses ke jalan raya kabupaten dan jalan desa di dalam kecamatan.

4.1.3. Perbandingan Urutan Kesejahteraan Antardesa

Kecamatan Muntok terdiri atas 7 desa/kelurahan yaitu Kelurahan Tanjung, Kelurahan Sungai Baru, Kelurahan Sungai Daeng, Desa Air Putih, Desa Air Limau, Desa Air Belo, dan Desa Belo Laut.



Gambar 7. Perbandingan urutan kesejahteraan antardesa berdasarkan estimasi peta kemiskinan GKN dan FGD di Kecamatan Muntok, 2010 dan 2013

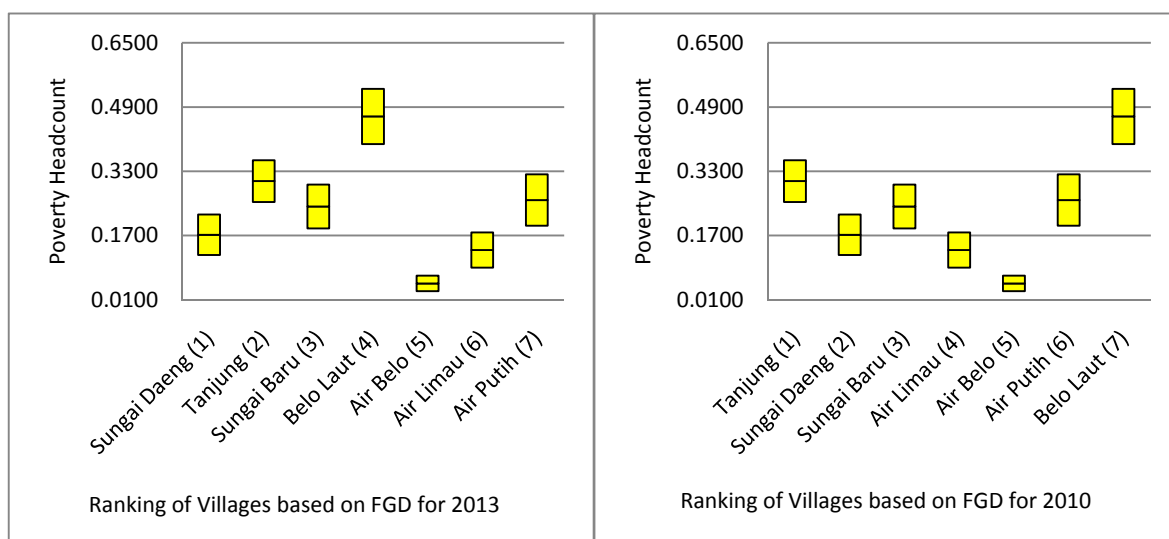
Dengan kondisi peringkat satu adalah desa/kelurahan yang paling sejahtera, urutan kesejahteraan antardesa di Kecamatan Muntok berdasarkan penghitungan pemetaan kemiskinan dengan menggunakan GKN adalah Desa Air Belo, Desa Air Limau, Kelurahan Sungai Daeng, Desa Air Putih, Kelurahan Sungai Baru, Kelurahan Tanjung, dan Desa Belo Laut.

Hasil FGD untuk kondisi tahun 2013 menunjukkan urutan kesejahteraan antardesa bila diurutkan dari yang paling sejahtera diperoleh Kelurahan Sungai Daeng sebagai desa/kelurahan yang paling sejahtera, diikuti oleh Kelurahan Tanjung, Kelurahan Sungai Baru, Desa Belo Laut, Desa Air Belo, Desa Air Limau, dan Desa Air Putih. Sementara itu, untuk hasil FGD kondisi kesejahteraan masyarakat pada tahun 2010 menunjukkan bahwa Kelurahan Tanjung sebagai desa/kelurahan yang paling sejahtera, diikuti oleh Kelurahan Sungai Daeng, Kelurahan Sungai Baru, Desa Air Limau, Desa Air Belo, Desa Air Putih, dan Desa Belo Laut.

Perbedaan antara hasil FGD urutan kesejahteraan antardesa di Kecamatan Muntok pada tahun 2013 dengan 2010 terletak pada perubahan urutan antara Kelurahan Sungai Daeng dan Tanjung sebagai peringkat pertama urutan kesejahteraan, serta meningkat drastisnya urutan kesejahteraan untuk Desa Belo Laut dan menurun drastisnya urutan kesejahteraan masyarakat di Desa Air Limau. Perubahan urutan antara Kelurahan Sungai Daeng dan Tanjung menurut masyarakat terjadi karena saat ini konsentrasi pembangunan kelurahan lebih difokuskan ke Kelurahan Sungai Daeng terutama dengan adanya pembangunan rumah dan toko (ruko) dan swalayan. Selain itu

juga karena adanya industri besar elpiji serta air minum yang menyerap tenaga kerja menyebabkan Kelurahan Sungai Daeng menempati urutan pertama.

Menurun drastisnya peringkat kesejahteraan Desa Air Limau di tahun 2013 disebabkan oleh kondisi stagnan desa ini, sementara daerah lain lebih maju, selain itu juga desa ini memiliki wilayah yang kecil serta jumlah KK yang relatif sedikit dibanding desa/kelurahan lainnya. Meningkatkan drastisnya kondisi kesejahteraan Desa Belo Laut di tahun 2013, menurut masyarakat di tingkat kecamatan, disebabkan oleh konsentrasi pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten yang mengarahkan pembangunan infrastrukturnya ke Desa Beo Laut. Pada tahun 2011, desa ini merupakan kota baru dengan kawasan strategis adanya kompleks kodim, Pemda, dan rumah sakit. Kawasan ini juga merupakan kawasan pemekaran daerah dengan banyaknya penduduk pendatang dari Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi PNS dan dari Provinsi Jawa Barat yang bekerja sebagai penambang timah.



Gambar 8. Perbandingan urutan kesejahteraan antardesa berdasarkan estimasi peta kemiskinan \$2 PPP dan FGD di Kecamatan Muntok, 2010 dan 2013

Dengan kondisi peringkat satu lebih sejahtera, urutan kesejahteraan antardesa di Kecamatan Muntok berdasarkan penghitungan pemetaan kemiskinan dengan menggunakan garis kemiskinan \$2 PPP adalah Desa Air Belo, Desa Air Limau, Kelurahan Sungai Daeng, Kelurahan Sungai Baru, Desa Air Putih, Kelurahan Tanjung, Desa Belo Laut. Urutan kesejahteraan antardesa di Kecamatan Muntok yang menggunakan GKN berubah pada saat garis kemiskinan yang digunakan adalah \$2 PPP. Namun, perubahan ini hanya terjadi pada urutan kesejahteraan antar dua desa/kelurahan yakni Kelurahan Sungai Baru dan Desa Air Putih. Menurut hasil pemetaan kemiskinan berdasarkan GKN, Desa Air Putih lebih sejahtera dibandingkan dengan Kelurahan Sungai Baru, namun sebaliknya menurut pemetaan kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan \$2 PPP. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat yang terletak di antara garis kemiskinan \$2 PPP dan GKN lebih banyak berada di Desa Air Putih dibandingkan dengan di Kelurahan Sungai Baru.

Perbandingan antara hasil penghitungan pemetaan kemiskinan berdasarkan GKN dengan hasil FGD untuk kondisi tahun 2010 menunjukkan bahwa adanya kesesuaian atau *match* sebesar 0.48, *inconclusive* sebesar 0.24, dan tidak sesuai atau *not match* sebesar 0.29. Dengan kata lain, urutan kesejahteraan antardesa di Kecamatan Muntok berdasarkan GKN memiliki korelasi yang menengah yaitu 0.48 untuk tahun 2010.

Sementara itu, perbandingan antara hasil penghitungan pemetaan kemiskinan berdasarkan \$2 PPP dengan hasil FGD untuk kondisi tahun 2010 menunjukkan bahwa adanya kesesuaian sebesar 0.52, inkonklusif sebesar 0.14, dan tidak sesuai sebesar 0.33. Dengan kata lain, urutan kesejahteraan antardesa di Kecamatan Muntok berdasarkan garis kemiskinan \$2 PPP memiliki korelasi yang menengah yakni 0.52 untuk tahun 2010.

Tabel 14. Perbandingan Urutan Kesejahteraan Antardesa Hasil FGD dengan Pemetaan Kemiskinan berdasarkan GKN dan Garis Kemiskinan \$2 PPP di Kecamatan Muntok, 2010 dan 2013

Tahun	Jumlah Desa	N	Rank Correlation	Match		Inconclusive		Not Match	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
GKN:									
2010	7	21	0.04	10	48	5	24	6	28
2013	7	21	0.32	9	43	3	14	9	43
\$2 PPP:									
2010	7	21	0.14	11	53	3	14	7	33
2013	7	21	0.18	10	48	3	14	8	38

Tingkat konsistensi urutan desa antara hasil estimasi pemetaan kemiskinan dengan hasil FGD tergolong sangat rendah, terlihat dari *rank correlation* sebesar 0.04 untuk pemetaan kemiskinan berdasarkan GKN dan sebesar 0.14 untuk pemetaan kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan \$2 PPP. Walaupun konsistensinya sangat rendah, namun jumlah kasus atau pasangan daerah yang sesuai atau *match* cukup menggambarkan karena setengah dari seluruh kasus bersesuaian, yakni 10 kasus untuk pemetaan kemiskinan berdasarkan GKN (58%) dan 11 kasus jika berdasarkan garis kemiskinan \$2 PPP (52%) dari masing-masing 21 kombinasi pasangan daerah. Oleh karena itu, berdasarkan perbandingan ini, kondisi kesejahteraan antardesa di Kecamatan Muntok relatif memiliki kedekatan yang lebih sesuai dengan kondisi kesejahteraan berdasarkan garis kemiskinan \$2 PPP dibandingkan dengan GKN.

Untuk kasus *inconclusive*, salah satu kasusnya terjadi antara Kelurahan Tanjung dan Desa Sungai Baru, serta Kelurahan Sungai Daeng dan Desa Air Limau. Berdasarkan hasil estimasi pemetaan kemiskinan \$2 PPP, Kelurahan Sungai Baru menempati peringkat kesejahteraan lebih tinggi dibandingkan dengan Kelurahan Tanjung, namun hal ini berbeda dengan menurut persepsi masyarakat di tingkat kecamatan. Kelurahan Tanjung dianggap sebagai kelurahan yang merupakan wilayah perkotaan karena banyaknya fasilitas termasuk kantor kecamatan dan pasar sehingga perekonomiannya lebih baik dibandingkan dengan Kelurahan Sungai Daeng.

Dalam kasus antara Kelurahan Sungai Daeng dan Desa Air Limau, berdasarkan hasil pemetaan kemiskinan menurut GKN dan \$2 PPP, Desa Air Limau menempati peringkat lebih tinggi dibandingkan dengan Kelurahan Sungai Daeng, namun peringkat berbalik jika dibandingkan dengan hasil persepsi masyarakat di tingkat kecamatan. Hal ini terjadi karena menurut masyarakat, pendidikan di Desa Air Limau sangat rendah dan tergolong paling rendah dibandingkan dengan desa/kelurahan lainnya, bahkan nilai rata-ratanya hanya 2. Sehingga jika dibandingkan dengan Kelurahan Sungai Daeng yang merupakan wilayah perkotaan, maka tingkat kesejahteraan di kelurahan ini lebih baik dibandingkan dengan Desa Air Limau.

Untuk kasus *not match*, sebagian besar terjadi akibat keterkaitannya dengan Kelurahan Tanjung dan Sungai Baru. Berdasarkan hasil FGD dengan masyarakat di tingkat kecamatan, kebanyakan peserta menganggap bahwa kondisi kelurahan lebih baik dari kondisi perdesaan. Sehingga tidak heran jika seluruh hasil FGD, baik untuk tahun 2010 ataupun 2013, menunjukkan kelurahan memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan dengan desa. Seperti salah satu contoh pernyataan dari aparat kecamatan bahwa Kelurahan Sungai Baru dan Tanjung harusnya merupakan wilayah dengan peringkat kesejahteraan tertinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya, karena kelurahan kondisinya (untuk seluruh indikator) lebih baik daripada perdesaan.

4.2. Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat

4.2.1. Gambaran Umum Kecamatan

Kecamatan Simpang Teritip terdiri dari 13 desa yang secara keseluruhan mencakup 3 RW, 58 RT, dan 35 dusun dengan seluruh wilayahnya memiliki wilayah pantai, sebagian besar wilayahnya datar dan sedikit yang berbukit. Beberapa desa juga memiliki kondisi geografis berupa pesisir. Desa-desa di Kecamatan Simpang Teritip terdiri atas desa-desa asli. Kecamatan ini berada pada pesisir sebelah barat Pulau Bangka yang menghubungkan ibukota Kabupaten Bangka Barat, Muntok, dengan kecamatan lainnya.

Selama tahun 2010 hingga 2013, tidak terjadi pemekaran di Kecamatan Simpang Teritip sehingga total seluruh desa di kecamatan sebanyak 13 desa. Dengan adanya sejumlah 13 desa tersebut, luas wilayah Kecamatan Simpang Teritip adalah 372 km² dan pada 2011 jumlah penduduk Kecamatan Simpang Teritip sebanyak 24,001 jiwa, dan sebaran yang paling banyak ada di Desa Berang sebanyak 2,648 jiwa. Sedang kepadatan penduduk Kecamatan Simpang Teritip adalah 64.52 per km². Mata pencaharian penduduk pada umumnya adalah bertani dan menambang, baik petani karet, sawit, maupun lada, serta menambang timah. Sementara itu, hanya sebagian kecil masyarakat yang bekerja di bidang jasa ataupun sebagai pegawai dan buruh.

4.2.2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Antardesa

Berdasarkan hasil diskusi kelompok terpumpun (FGD) dengan para aparat kecamatan, tokoh masyarakat, fasilitator PNPM, serta kader PKK di Kecamatan Simpang Teritip, terdapat delapan indikator yang digunakan untuk menentukan kesejahteraan masyarakat antardesa, yaitu hiburan/rekreasi, pendidikan, pendapatan, kesehatan, kebutuhan primer, lapangan kerja, infrastruktur, serta keamanan. Indikator yang dikemukakan ini hampir sama dengan indikator yang digunakan dalam melihat kesejahteraan masyarakat kabupaten dan kecamatan sebelumnya.

Untuk indikator hiburan/rekreasi, masyarakat mengidentifikasi bahwa ketersediaan fasilitas hiburan beserta intensitas penggunaan fasilitas tersebut menjadi salah satu indikator dari kesejahteraan masyarakat yang ada di Kecamatan Simpang Teritip. Masyarakat yang tingkat kesejahteraannya lebih tinggi cenderung memiliki waktu untuk hiburan/rekreasi, misalnya ke pantai, mengingat kondisi dari rumah tangga tersebut yang tergolong mampu untuk menjangkau biaya hiburan.

Indikator pendidikan, tingkat pendidikan, mutu pendidikan, serta akses informasi dan hukum menjadi indikator dari kesejahteraan masyarakat di kecamatan ini.

Indikator pendapatan, kondisi dan taraf ekonomi menjadi indikator dari kesejahteraan masyarakat karena hal ini berkaitan dengan penghasilan rumah tangga beserta kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga.

Indikator kesehatan, tingkat kesehatan, mitos atau kepercayaan terhadap dukun, serta cara hidup sehat merupakan penentu kesejahteraan masyarakat di kecamatan ini karena dengan tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan mengindikasikan bahwa masyarakat sudah memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi.

Indikator kebutuhan primer, rumah yang layak untuk dihuni serta konsumsi energi listrik dan BBM menjadi penentu kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Simpang Teritip.

Indikator lapangan kerja, masyarakat di tingkat kecamatan ini mengindikasikan bahwa lapangan kerja menjadi faktor penentu kesejahteraan karena ketersediaan lapangan kerja beserta rendahnya tingkat pengangguran akan berpengaruh pada penghasilan.

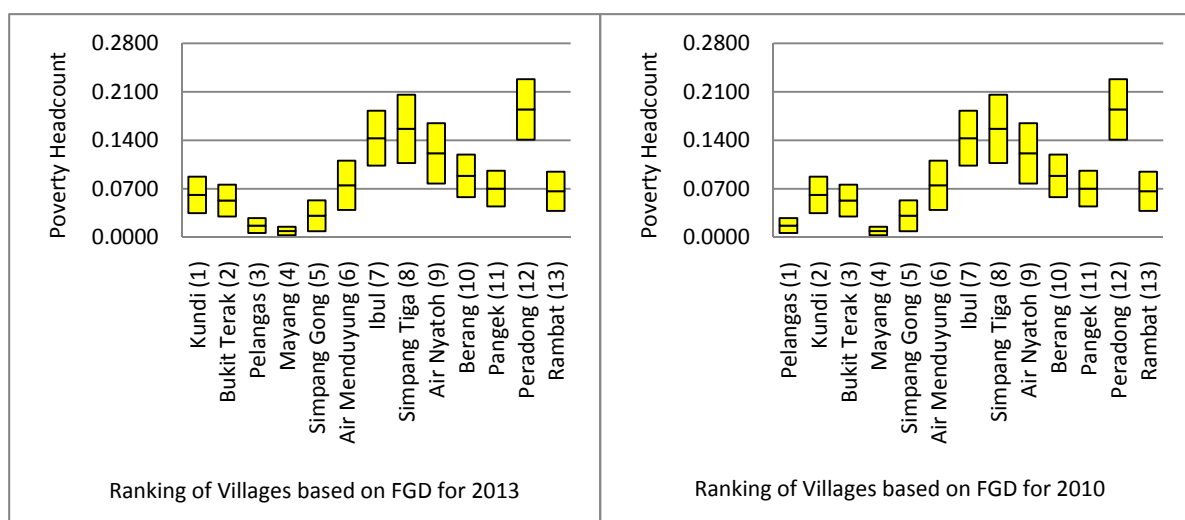
Indikator infrastruktur, termasuk akses jalan dan ketersediaan sumber daya alam di desa merupakan indikator dari kesejahteraan masyarakat karena adanya akses jalan yang baik serta sumber daya alam yang melimpah menggambarkan kondisi dari kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Indikator keamanan, kualitas hidup berupa keamanan merupakan penentu dari kesejahteraan masyarakat yang ada di Kecamatan Simpang Teritip karena dengan kondisi lingkungan yang aman maka akan tercipta suasana kehidupan yang lebih baik dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup serta dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

4.2.3. Perbandingan Urutan Kesejahteraan Antardesa

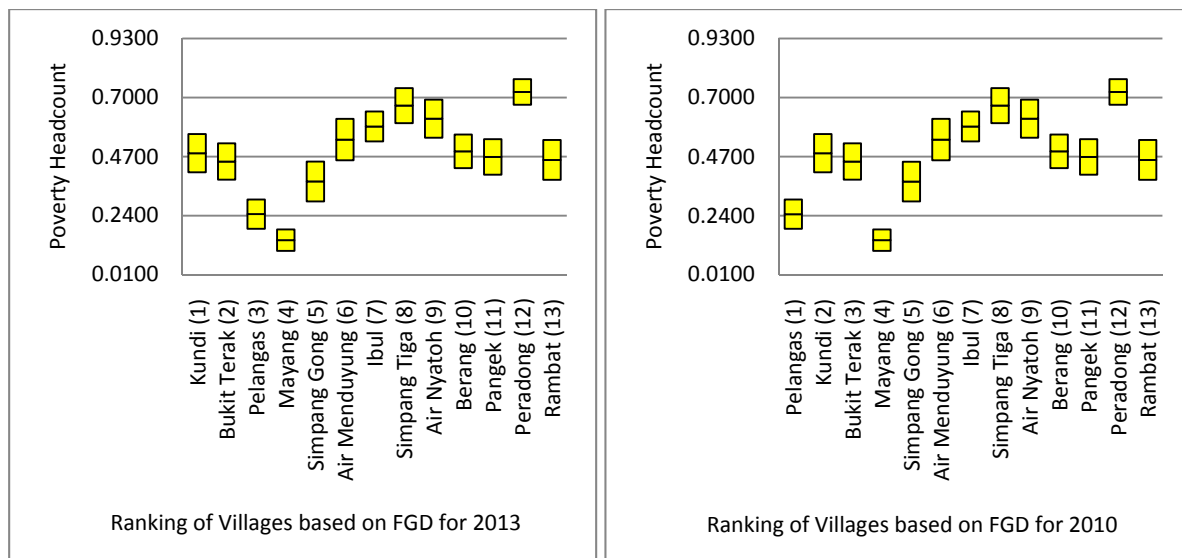
Kecamatan Simpang Teritip terdiri atas 13 desa yaitu Desa Kundi, Bukit Terak, Pelangas, Mayang, Simpang Gong, Air Menduyung, Ibul, Simpang Tiga, Air Nyatoh, Berang, Pangek, Peradong, dan Rambat.

Dengan kondisi peringkat satu lebih sejahtera, urutan kesejahteraan antardesa di Kecamatan Simpang Teritip berdasarkan penghitungan pemetaan kemiskinan dengan menggunakan GKN adalah Desa Mayang, Pelangas, Simpang Gong, Bukit Terak, Kundi, Rambat, Pangek, Air Menduyung, Berang, Air Nyatoh, Ibul, Simpang Tiga, dan Peradong.



Gambar 9. Perbandingan urutan kesejahteraan antardesa berdasarkan estimasi peta kemiskinan GKN dan FGD di Kecamatan Simpang Teritip, 2010 dan 2013

Hasil FGD untuk kondisi tahun 2013 menunjukkan urutan kesejahteraan antardesa berupa Desa Kundi sebagai desa yang paling sejahtera, diikuti oleh Bukit Terak, Pelangas, Mayang, Simpang Gong, Air Menduyung, Ibul, Simpang Tiga, Air Nyatoh, Berang, Pangek, Peradong, dan Rambat. Sementara itu, hasil FGD untuk kondisi tahun 2010 menunjukkan urutan kesejahteraan antardesa berupa Desa Pelangas, Kundi, Bukit Terak, Mayang, Simpang Gong, Air Menduyung, Ibul, Simpang Tiga, Air Nyatoh, Berang, Pangek, Peradong, dan Rambat.



Gambar 10. Perbandingan urutan kesejahteraan antardesa berdasarkan estimasi peta kemiskinan \$2 PPP dan FGD di Kecamatan Simpang Teritip, 2010 dan 2013

Perbedaan antara hasil FGD urutan kesejahteraan antardesa di Kecamatan Simpang Teritip untuk tahun 2013 dengan 2010 terletak pada dinamika perubahan urutan kesejahteraan yang ada di desa-desa, yang menurut persepsi masyarakat, memiliki tingkat kesejahteraan lebih tinggi dibandingkan dengan desa lainnya, yakni Desa Kundi, Bukit Terak, dan Pelangas. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan persepsi masyarakat di tingkat kecamatan, tidak ada perubahan signifikan yang terjadi selama kurun waktu tiga tahun dari tahun 2010 hingga tahun 2013 kecuali untuk desa-desa yang tingkat kesejahteraannya tinggi. Desa Pelangas mengalami penurunan tingkat kesejahteraan di tahun 2013 karena pada tahun 2010 kondisi pertambangan timah sedang maju pesat dan selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan produksi. Desa Pelangas yang sebagian besar masyarakatnya menambang timah, mengalami dampak dari penurunan produktivitas timah tersebut.

Dengan kondisi peringkat satu lebih sejahtera, urutan kesejahteraan antardesa di Kecamatan Simpang Teritip berdasarkan penghitungan pemetaan kemiskinan dengan menggunakan garis kemiskinan \$2 PPP adalah Desa Mayang, Pelangas, Simpang Gong, Bukit Terak, Rambat, Pangek, Kundi, Berang, Air Menduyung, Ibul, Air Nyatoh, Simpang Tiga, dan Peradong. Urutan kesejahteraan antardesa di Kecamatan Simpang Teritip yang menggunakan GKN berubah pada saat garis kemiskinan yang digunakan adalah \$2 PPP. Namun, umumnya perubahan urutan ini terjadi pada desa-desa yang memiliki tingkat kesejahteraan lebih rendah, bukan pada desa yang kesejahteraannya lebih tinggi.

Perbandingan antara hasil penghitungan pemetaan kemiskinan berdasarkan GKN dengan hasil FGD untuk kondisi tahun 2010 menunjukkan bahwa adanya kesesuaian atau *match* sebesar 0.71, *inconclusive* sebesar 0.21, dan tidak sesuai atau *not match* sebesar 0.09. Dengan kata lain, urutan

kesejahteraan antardesa di Kecamatan Simpang Teritip berdasarkan GKN memiliki korelasi yang tinggi yaitu 0.71 untuk tahun 2010.

Sementara itu, perbandingan antara hasil penghitungan pemetaan kemiskinan berdasarkan \$2 PPP dengan hasil FGD untuk kondisi tahun 2010 menunjukkan bahwa adanya kesesuaian sebesar 0.67, inkonklusif sebesar 0.22, dan tidak sesuai sebesar 0.12. Dengan kata lain, urutan kesejahteraan antardesa di Kecamatan Simpang Teritip berdasarkan garis kemiskinan \$2 PPP memiliki korelasi yang menengah yakni 0.67 untuk tahun 2010.

Tabel 15. Perbandingan Urutan Kesejahteraan Antardesa Hasil FGD dengan Pemetaan Kemiskinan berdasarkan GKN dan Garis Kemiskinan \$2 PPP di Kecamatan Simpang Teritip, 2010 dan 2013

Tahun	Jumlah Desa	N	Rank Correlation	Match		Inconclusive		Not Match	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
GKN:									
2010	13	78	0.65	55	71	16	20	7	9
2013	13	78	0.62	53	68	16	20	9	12
\$2 PPP:									
2010	13	78	0.53	52	67	17	22	9	11
2013	13	78	0.49	50	64	17	22	11	14

Tingkat konsistensi urutan desa antara hasil estimasi pemetaan kemiskinan dengan hasil FGD tergolong menengah, terlihat dari *rank correlation* sebesar 0.65 untuk pemetaan kemiskinan berdasarkan GKN dan sebesar 0.53 untuk pemetaan kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan \$2 PPP. Walaupun konsistensinya menengah, namun jumlah kasus atau pasangan daerah yang sesuai atau *match* cukup besar yakni 53 kasus untuk pemetaan kemiskinan berdasarkan GKN (71%) dan 52 kasus jika berdasarkan garis kemiskinan \$2 PPP (67%) dari masing-masing 78 kombinasi pasangan daerah. Oleh karena itu, berdasarkan perbandingan ini, kondisi kesejahteraan antardesa di Kecamatan Simpang Teritip relatif memiliki kedekatan yang lebih sesuai dengan kondisi kesejahteraan berdasarkan GKN dibandingkan dengan garis kemiskinan \$2 PPP.

Untuk kasus *inconclusive* umumnya terjadi dalam perbandingan antara Desa Air Nyatoh, Berang, Pangek, dan Rambat. Salah satu contoh kasus ini adalah antara Desa Berang dengan Rambat. Meski dalam estimasi peta kemiskinan urutan kesejahteraan di Desa Rambat dengan Desa Berang terbalik dengan urutan kesejahteraan dalam FGD, namun selisih angka kemiskinan antara keduanya masih dalam interval *standard error*. Peserta FGD menempatkan Desa Rambat di posisi paling rendah kesejahteraannya dikarenakan tingkat pendidikan di desa tersebut sangat rendah, rata-rata hanya sampai tingkat SD. Hal ini dikarenakan oleh kondisi akses jalan yang jauh akibat wilayah desa yang berupa pantai dan pesisir sehingga banyak masyarakat yang kesulitan untuk bersekolah. Variabel pendidikan dan infrastruktur jalan memang tidak masuk dalam model estimasi peta kemiskinan.

Kasus *inconclusive* juga terjadi pada desa-desa yang berkaitan dengan Desa Kundi, Bukit Terak, dan Air Menduyung. Berdasarkan wawancara mendalam dengan masyarakat di tingkat desa, Desa Kundi, Desa Air Menduyung, dan Desa Bukit Terak saat ini merupakan hasil pemekaran dari Desa Kundi pada tahun. Dalam temuan FGD terdapat kesamaan karakteristik yang masih sulit dibedakan oleh para peserta dalam mengidentifikasi kondisi desa, terutama bagi desa yang baru saja mekar. Selain itu, berdasarkan wawancara mendalam di tingkat kecamatan, ketiga desa ini

juga merupakan desa yang memiliki sumber daya alam (perkebunan) sawit yang paling banyak jika dibandingkan dengan desa lain. Selain itu dari ketiga desa tersebut saja dapat diperoleh 40 ton sahang/lada. Sehingga memang karena persamaan karakteristik inilah yang membuat ketiga desa ini sulit dibedakan oleh masyarakat peringkat kesejahteraannya.

Dari hasil perbandingan juga terdapat tujuh kasus yang tidak sesuai atau *not match*, salah satunya adalah kasus antara Desa Kundi dengan Desa Mayang. Hasil estimasi menunjukkan bahwa urutan kesejahteraan Desa Mayang lebih tinggi dibandingkan dengan Kundi. Hasil ini sebetulnya sudah sesuai jika melihat dalam FGD bahwa menurut para peserta, penduduk Desa Mayang sebagian besar bermata pencaharian sebagai penambang timah dan jika kita mengacu pada temuan FGD tingkat kabupaten dimana wilayah penghasil timah dianggap yang paling sejahtera. Meski demikian, hasil FGD menunjukkan sebaliknya, dan berdasarkan penelusuran melalui wawancara mendalam yang dilakukan dengan aparat kecamatan dan desa, adanya penurunan dalam hasil timah membuat menurunnya pendapatan sebagian besar masyarakat Desa Mayang. Jadi Desa Kundi yang merupakan desa dengan kondisi pertanian cukup stabil, dianggap memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Desa Mayang.

4.3. Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat

4.3.1. Gambaran Umum Kecamatan

Kecamatan Poto Tano merupakan kecamatan yang berada di bagian paling utara Kabupaten Sumbawa Barat. Kecamatan ini memiliki pelabuhan utama yang juga merupakan pintu masuk utama arus barang dan orang dari Pulau Lombok ke Pulau Sumbawa. Terkait dengan luas wilayah administratif, Kecamatan Poto Tano memiliki luas wilayah sebesar 158.88 km² yang terdiri dari wilayah dataran tinggi (perbukitan), pantai, dan dataran rendah. Hingga saat ini, masyarakat Poto Tano mayoritas beraktifitas di daerah dataran rendah dan pegunungan. Sebagian besar wilayah di kecamatan ini digunakan sebagai lahan pertanian.

Jarak antara Kecamatan Poto Tano dengan Ibukota Kabupaten adalah 26 km dan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 45 menit. Moda transportasi utama warga kecamatan ini adalah sepeda motor. Terdapat angkutan umum yang dapat menghubungkan antara kecamatan ini dengan kecamatan lainnya. Angkutan umum ini adalah bus umum dengan trayek Mataram-Kecamatan Maluk. Selain mengandalkan angkutan umum bis, untuk aktifitas sehari-hari, warga masih banyak menggunakan *Cidomo* (delman dalam bahasa setempat). Pengguna *Cidomo* menurut penuturan narasumber lebih banyak dimanfaatkan oleh ibu-ibu untuk berbelanja di pasar, khususnya bagi yang tinggal di desa-desa terpencil.

Jumlah penduduk Kecamatan Poto Tano pada tahun 2013 adalah sebesar 9,484 orang. Jumlah penduduk sebesar ini hampir tersebar merata di setiap desa. Berikut ini adalah perincian persebaran jumlah penduduk Kecamatan Poto Tano.

Tabel 16. Persebaran Penduduk Kecamatan Poto Tano

No	Nama Desa	Jumlah KK
1	Senayan	1,268
2	Mantar	974
3	Kiantar	846
4	Tambak Sari	684
5	Poto Tano	1,306
6	Kokarlian	1,731
7	Tebo	1,373
8	Tua Nanga	1,292

Sumber: Data Kependudukan Puskesmas Kecamatan Poto Tano

Tabel di atas menunjukkan persebaran penduduk kecamatan Poto Tano. Kecamatan Kokarlian merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak. Meskipun desa lain memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit dari pada desa kokarlian tetapi jumlah penduduk ini tidak terlalu terpaut jauh. Hanya desa Tambak Sari yang terlihat memiliki jumlah penduduk terendah. Jumlah penduduk Desa Tambak Sari adalah hanya sebesar 694 KK. Desa ini memiliki jumlah penduduk yang paling rendah karena desa ini pada awalnya adalah daerah transmigrasi yang tidak berkembang. Daerah ini berfokus pada pengelolaan tambak tetapi gagal sehingga banyak penduduk yang tidak menetap di daerah ini.

4.3.2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Antardesa

FGD Pengurutan Kesejahteraan Desa Kecamatan Poto Tano berlangsung cukup lancar meskipun dilaksanakan pada siang hari. Dari FGD ini, peserta berhasil menyimpulkan ada 6 (enam) indikator utama yang dapat digunakan untuk mengurutkan tingkat kesejahteraan di Kecamatan Poto Tano:

Indikator pendidikan, adalah indikator penentu tingkat kesejahteraan yang pertama. Peserta FGD menuturkan bahwa indikator pendidikan terdiri dari empat aspek utama yaitu 1) tingkat pendidikan, 2) rendahnya akses terhadap pendidikan, 3) akses terhadap fasilitas pendidikan seperti sekolah, dan 4) minimnya pendidikan masyarakat.

Indikator pekerjaan/mata pencaharian, sama seperti indikator pendidikan, indikator ini juga terdiri dari beberapa aspek. Beberapa aspek yang menyusun indikator pekerjaan/mata pencaharian adalah 1) penghasilan, 2) tingkat pengangguran di desa, 3) jenis pekerjaan warga desa, 4) variasi mata pencaharian warga, 5) ketersediaan lapangan pekerjaan, dan 6) status pekerjaan warga yang layak dan berkesinambungan.

Indikator infrastruktur, aspek-aspek yang membentuk indikator ini adalah 1) ketersediaan alat transportasi, 2) akses terhadap jalan, 3) ketersediaan jalan usaha tani, dan 4) kemudahan untuk menjual barang.

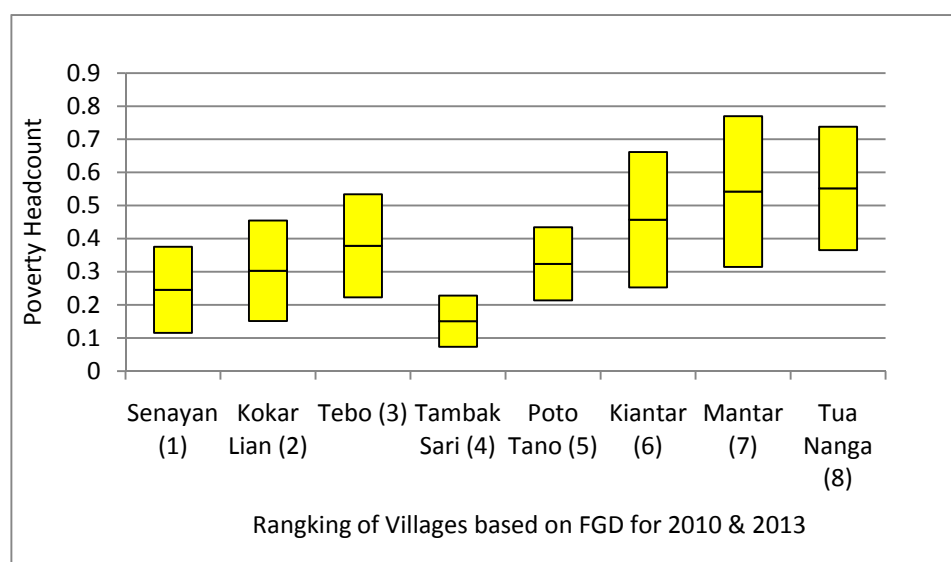
Indikator lahan pertanian, selain infrastruktur, peserta FGD menuturkan bahwa lahan pertanian juga menjadi indikator penting dalam penentuan tingkat kesejahteraan desa. Indikator lahan pertanian terdiri dari dua aspek yaitu 1) ketersediaan lahan pertanian dan 2) kepemilikan luas lahan pertanian. Indikator ini merupakan indikator yang penting karena, menurut peserta FGD, ketersediaan lahan pertanian menjadi vital untuk mendukung kegiatan ekonomi warga yang bergerak di bidang pertanian.

Indikator pelayanan kesehatan, dinilai penting oleh peserta FGD dalam penentuan tingkat kesejahteraan desa di Kecamatan Poto Tano. Peserta FGD lebih menyoroti mengenai akses terhadap sarana kesehatan warga untuk menggambarkan indikator pelayanan kesehatan. Perlu diketahui bahwa meskipun setiap desa di Kecamatan Poto Tano telah memiliki POSKESDES, terkadang masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan. Salah satu faktor yang menyulitkan warga untuk mengakses fasilitas kesehatan adalah jarak antara tempat tinggal dengan POSKESDES yang cukup jauh. Jarak antara rumah warga dengan POSKESDES yang terkadang cukup jauh tidak terlepas pula dari faktor geografis.

Indikator geografis, peserta FGD juga sepakat bahwa faktor geografis merupakan salah satu faktor penentu tingkat kesejahteraan desa. Aspek-aspek yang membentuk indikator geografis adalah 1) keterpencilan, 2) ketersediaan air untuk pertanian dan 3) ketersediaan air bersih. Indikator penentu kesejahteraan selanjutnya adalah lahan pertanian. Mengingat bahwa mata pencaharian utama warga Desa Tambak Sari sebagian besar adalah petani, maka peserta FGD menyepakati bahwa indikator lahan pertanian sangat penting dalam menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk. Indikator lahan pertanian sendiri terdiri dari dua aspek yaitu ketersediaan lahan pertanian dan kepemilikan luas lahan pertanian.

4.3.3. Perbandingan Urutan Kesejahteraan Antardesa

Hasil FGD menyatakan bahwa Desa Senayan adalah desa dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Urutan kesejahteraan desa setelah Desa Senayan secara berturut-turut adalah Desa Kokarlian, Desa Tebo, Desa Tambak Sari, Desa Poto Tano, Desa Kiantar, Desa Mantar, dan Desa Tua Nanga. Desa Senayan dikategorikan sebagai desa dengan tingkat kesejahteraan tertinggi karena Desa Senayan ini terletak di jalan utama dan juga merupakan pusat pemerintahan di Kecamatan Poto Tano. Kegiatan ekonomi di desa ini juga lebih berkembang dibandingkan dengan desa lain. Saat ini, di sepanjang jalan provinsi yang melintasi Desa Senayan, sudah banyak warung-warung makanan yang buka. Geliat ekonomi di desa ini juga semakin terasa karena lahan pertanian di desa ini meskipun tidak terlalu luas tetapi mampu menghasilkan panen dua kali dalam satu tahun (desa lain rata-rata hanya satu kali panen).

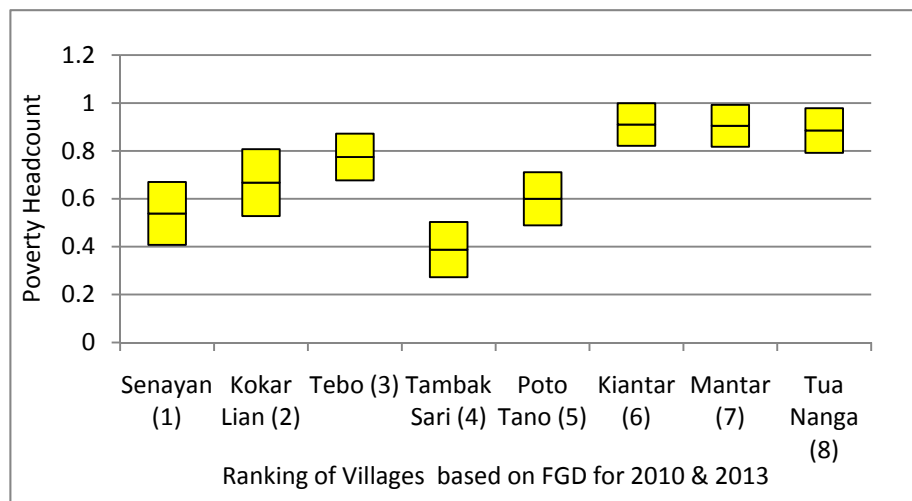


Gambar 11. Perbandingan urutan kesejahteraan antardesa berdasarkan estimasi peta kemiskinan GKN dan FGD di Kecamatan Poto Tano, 2010 dan 2013

Selanjutnya, Desa Kokarlian merupakan desa yang memiliki tingkat kesejahteraan tertinggi kedua setelah Desa Senayan. Faktor yang mendorong desa ini memiliki tingkat kesejahteraan yang cukup tinggi, menurut peserta FGD, adalah kemampuan lahan pertanian Desa Kokarlian untuk menghasilkan panen dua kali dalam setahun. Selain itu, Desa Kokarlian juga memiliki tambang emas yang dimanfaatkan oleh warga sebagai salah satu sumber penghasilan.

Hasil FGD menunjukkan bahwa Desa Tambak Sari berada pada urutan keempat. Hasil ini berbeda dengan hasil estimasi model *Poverty Map* yang menempatkan desa ini pada urutan pertama. Peserta FGD memaparkan bahwa desa ini pada mulanya merupakan desa transmigrasi yang bergerak di sektor tambak. Setelah tambak yang berada di daerah ini berhenti beroperasi sejak tahun 1998 perekonomian warga menjadi berkurang. Selain itu, peserta FGD juga menyatakan bahwa Desa Tambak Sari mendapatkan nilai yang rendah pada dua indikator penentu kesejahteraan. Indikator pertama adalah kondisi geografis. Peserta FGD menggambarkan bahwa ketersediaan air bersih di desa ini sangat buruk. Warga tidak memiliki sumber air minum yang layak sehingga mereka diharuskan untuk membeli air dari perusahaan air setempat. Pada musim kemarau, bahkan warga harus membeli air tidak hanya untuk minum tetapi juga untuk mandi dan mencuci.

Selain pertimbangan mengenai ketersediaan air bersih. Selain mendapatkan nilai rendah pada indikator geografis, Desa Tambak Sari juga mendapatkan nilai rendah pada indikator lahan pertanian. Ketersediaan lahan pertanian di desa ini relatif kecil karena sebagian besar lahan dimanfaatkan untuk tambak yang tidak dimanfaatkan. Selain ketersediaan lahan yang relative kecil, kepemilikan warga atas lahan pertanian juga sangat kecil. Pertimbangan-pertimbangan ini lah yang memberikan dasar peserta FGD untuk memberikan nilai rendah dan menempatkan Desa Tambak Sari di urutan keempat.



Gambar 12. Perbandingan urutan kesejahteraan antardesa berdasarkan estimasi peta kemiskinan \$2 PPP dan FGD di Kecamatan Poto Tano, 2010 dan 2013

Selanjutnya Desa Kiantar, Desa Mantar dan Desa Tua Nanga berada di urutan tiga terakhir berdasarkan estimasi *poverty map* maupun FGD. Ketiga desa ini berada di wilayah yang terpencil dan akses untuk menuju ketiga ini masih cukup sulit. Sebagian besar jalan masih berbatu (makadam) dan tanah yang pada saat dilaksanakan verifikasi dalam keadaan licin. Ketiga desa ini dulunya merupakan satu desa dengan Desa Mantar sebagai desa induk. Hal ini lah yang menyebabkan karakteristik dari ketiga desa ini relatif sama.

Peserta FGD diminta untuk menggambarkan peringkat kesejahteraan desa pada tahun 2013 dan 2010. Seluruh peserta FGD menyepakati bahwa tidak ada perubahan peringkat kesejahteraan desa antara 2010 dan 2013. Peringkat kesejahteraan desa masih sama meskipun terdapat beberapa perubahan yang terjadi di kecamatan. Perubahan-perubahan yang terjadi di Kecamatan Poto Tano berdampak secara merata di setiap desa sehingga setiap desa berkembang dengan kecepatan yang relatif sama.

Tabel 17. Perbandingan Urutan Kesejahteraan Antardesa Hasil FGD dengan Pemetaan Kemiskinan berdasarkan GKN dan Garis Kemiskinan \$2 PPP di Kecamatan Poto Tano, 2010 dan 2013

Tahun	Jumlah Desa	N	Rank Correlation	Match		Inconclusive		Not Match	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
GKN:									
2010	8	28	0.81	24	86	4	14	0	0
2013	8	28	0.81	24	86	4	14	0	0
\$2 PPP:									
2010	8	28	0.64	20	71	6	21	2	7
2013	8	28	0.64	20	71	6	21	2	7

Hasil estimasi *poverty map* dan hasil FGD menunjukkan tingkat kesesuaian yang cukup tinggi. Tingkat kesesuaian antara estimasi *poverty map* dengan hasil FGD dapat ditunjukkan dari nilai *rank correlation*. Semakin tinggi nilai *rank correlation*, dengan nilai maksimal 100%, maka semakin baik tingkat kesesuaian antara hasil FGD dan estimasi *poverty map*. *Rank correlation* antara hasil FGD dengan estimasi *poverty map* menggunakan GKN adalah sebesar 81%. Tingkat kesesuaian pasangan dengan kategori *match* adalah sebesar 86% sedangkan untuk kategori *inconclusive* adalah 14% dan tidak ada pasangan yang berada dalam kategori *not matched*. Di lain pihak, perbandingan hasil estimasi *poverty map* menggunakan garis \$2 PPP dengan hasil FGD sedikit lebih rendah dari pada menggunakan GKN. *Rank correlation* hasil *poverty map* \$2 PP dengan hasil FGD adalah sebesar 64%. Tingkat kesesuaian pasangan dengan kategori *match* adalah sebesar 71% sedangkan untuk kategori *inconclusive* adalah 21% dan 7% untuk kategori *not matched*. Hasil ini berlaku baik pada tahun 2010 dan 2013.

4.4. Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat

4.4.1. Gambaran Umum Kecamatan

Kecamatan Maluku terletak di bagian baratdaya dari Kabupaten Sumbawa Barat. Jaraknya sekitar 30 km dari ibukota kabupaten dan mudah diakses karena dihubungkan dengan jalan aspal cor relatif baik dengan waktu tempuh sekitar 45 menit. Moda transportasi umum yang tersedia adalah bis dengan trayek Maluku – ibukota kabupaten dan Maluku – ibukota provinsi. Untuk menuju ibukota provinsi, tersedia juga kapal cepat milik perusahaan tambang PT.Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang dapat digunakan masyarakat umum. Sementara itu, transportasi umum di dalam kecamatan tersedia ojek motor yang jumlahnya ratusan dan delman.

Di Kabupaten Sumbawa Barat, Maluku termasuk kecamatan kota di samping Kecamatan Taliwang yang merupakan ibukota kabupaten. Hal tersebut terutama karena kecamatan ini merupakan lokasi perusahaan tambang PT. NNT dan menjadi salah satu tujuan wisata pantai. Dengan

kondisi demikian, fasilitas publik di Kecamatan Maluku cukup tersedia antara lain kantor pos, perbankan (terdapat tiga bank), sarana kesehatan (klinik dokter, puskesmas, pustu, dan poskesdes), hotel, rumah makan, dan cafe/karaoke. Maluku merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil, yaitu hanya 92,42 km² atau 5% dari luas total kabupaten dan merupakan kecamatan terpadat dengan jumlah penduduk 12.098 jiwa atau kepadatan 131 orang per km² pada 2011 (Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Angka). Mata pencaharian penduduknya bervariasi, antara lain menjadi petani, karyawan, pedagang, dan PNS/Polri.

4.4.2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Antardesa

FGD yang dilaksanakan di Kecamatan Maluku berlangsung lancar dan berhasil untuk memutuskan 7 (tujuh) indikator yang dapat digunakan untuk mengurutkan tingkat kesejahteraan desa-desa di kecamatan ini.

Indikator kesehatan, diskusi cukup alot untuk memutuskan ketujuh indikator ini. Meskipun demikian, peserta FGD menyepakati bahwa indikator kesehatan merupakan indikator pertama yang dapat digunakan untuk mengurutkan tingkat kesejahteraan desa. Peserta menyatakan bahwa indikator kesehatan bersifat luas dan mencakup beberapa aspek kesehatan lain yang diantaranya adalah 1) kemampuan masyarakat mengakses fasilitas kesehatan seperti puskesmas, dokter praktek dan klinik kesehatan lainnya, 2) ketersediaan fasilitas kesehatan di tingkat desa, 3) ketersediaan fasilitas sanitasi (PHBS), dan 4) kesadaran hidup sehat.

Indikator pendidikan, indikator ini juga terdiri dari beberapa aspek yaitu; 1) tingkat pendidikan penduduk usia dewasa, 2) tingkat kesadaran orang tua terhadap pendidikan, 3) tingkat pendidikan anak usia sekolah, 4) akses terhadap fasilitas pendidikan, dan 5) ketersediaan fasilitas pendidikan.

Indikator pekerjaan, pekerjaan juga menjadi indikator yang dipertimbangkan oleh peserta FGD dalam penentuan peringkat kesejahteraan. Beberapa aspek pekerjaan yang menjadi pertimbangan peserta FGD dalam menentukan peringkat kesejahteraan adalah jenis pekerjaan dan ketersediaan lapangan pekerjaan yang tersedia di setiap desa.

Indikator ekonomi, seperti indikator-indikator sebelumnya, terdiri dari beberapa aspek yaitu 1) tingkat penghasilan keluarga, 2) kepemilikan kendaraan, 3) gaya hidup, 4) tempat tinggal, 5) pakaian, dan 6) mobilitas (frekuensi pulang ke daerah asal).

Indikator pertanian, pertanian menjadi indikator yang penting karena Kecamatan Maluku memiliki wilayah pertanian yang cukup luas. Aspek-aspek penyusun indikator ini adalah 1) kepemilikan lahan, 2) hasil produksi pertanian dan 3) ketersediaan *embung* (fasilitas pengairan).

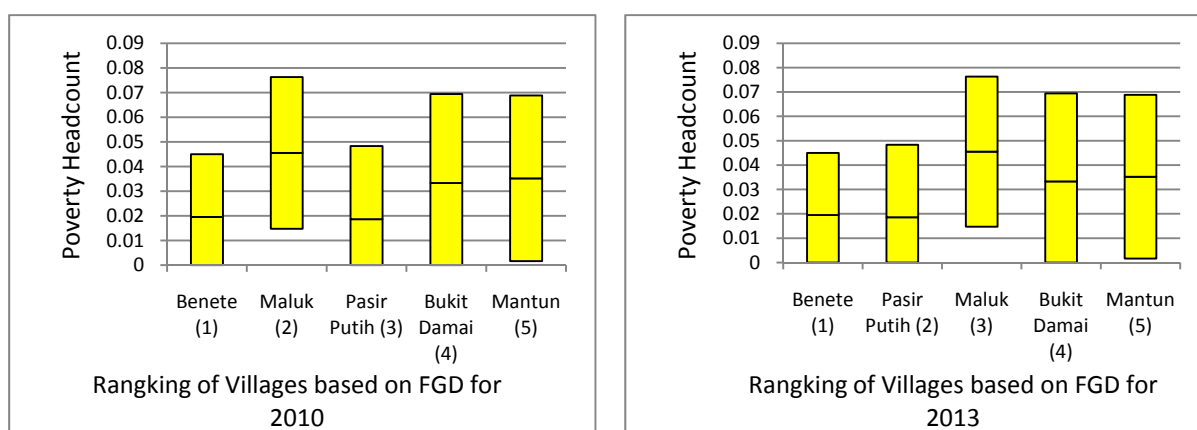
Indikator pasar, peserta FGD menyatakan bahwa pasar dapat dijadikan indikator dalam menentukan urutan kesejahteraan desa. Peserta FGD menuturkan bahwa indikator pasar terdiri dari dua aspek utama. Kedua aspek utama tersebut adalah 1) ketersediaan fasilitas pasar dan 2) kemudahan warga untuk mengakses fasilitas pasar itu sendiri.

Indikator wisata, Kecamatan Maluku merupakan salah satu kecamatan tujuan wisata di Kabupaten Sumbawa Barat. Menilik latar belakang ini, peserta FGD menyatakan bahwa wisata merupakan sektor penggerak perekonomian yang cukup penting di kecamatan ini. Indikator wisata, menurut peserta FGD, terdiri dari dua aspek yaitu 1) ketersediaan fasilitas pariwisata dan 2) kemudahan warga dalam mengakses fasilitas wisata.

4.4.3. Perbandingan Urutan Kesejahteraan Antardesa

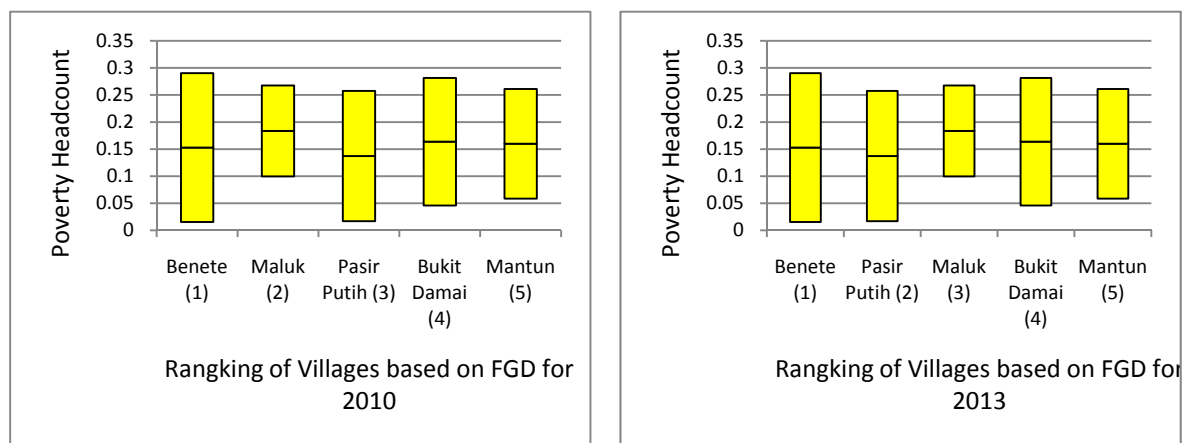
Kecamatan Maluku terbagi menjadi lima desa, yaitu Desa Maluku, Benete, Bukit Damai, Mantun, dan Pasir Putih. Berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya, peserta FGD berkesimpulan bahwa Desa Benete berada di urutan pertama. Desa yang juga merupakan pusat kecamatan ini dinilai paling sejahtera masyarakatnya karena mempunyai areal pertanian yang luas, terdapat fasilitas pengairan (embung) untuk lahan sawah, mempunyai wisata pantai, mempunyai banyak ternak besar, dan penduduknya mendapat jatah lebih banyak untuk menjadi karyawan PT. NNT karena menjadi lokasi parkir kendaraan. Desa Pasir Putih menempati urutan kedua karena merupakan lokasi wisata pantai, terdapat hotel, cafe/karaoke, dan fasilitas praktik dokter. Desa Maluku menempati urutan ketiga karena terdapat pasar yang menjadi tujuan belanja masyarakat di Kecamatan Maluku dan sekitarnya. Desa Mantun berada di urutan terakhir karena tingkat kesadaran penduduk akan pendidikan rendah, lahan pertanian penduduk yang terdapat di desa lain hanya berupa lahan tadah hujan, dan meskipun memiliki pantai, hanya sempit dan tidak terawat.

Urutan desa berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut sedikit berbeda dibanding tahun 2010. Desa Maluku yang sekarang ada di urutan ketiga, sebelumnya ada di urutan kedua. Sebaliknya, Desa Pasir Putih yang sekarang ada di urutan kedua, sebelumnya ada di urutan ketiga. Pergeseran urutan tersebut terjadi karena di Desa Pasir Putih dibangun sarana wisata sehingga meningkatkan kunjungan wisata dan menjamurnya kafe yang sekarang berjumlah 18.



Gambar 13. Perbandingan urutan kesejahteraan antardesa berdasarkan estimasi peta kemiskinan GKN dan FGD di Kecamatan Maluku, 2010 dan 2013

Jika urutan desa hasil FGD dibandingkan dengan hasil perhitungan berdasarkan garis kemiskinan (NPL), kedua hasil urutan ini menunjukkan hasil yang bervariasi. *Rank Correlation* yang membandingkan antara urutan hasil FGD tahun 2010 dengan urutan hasil poverty map dengan menggunakan NPL adalah sebesar 20%. Akurasi kombinasi pasangan sesuai untuk kategori *match* yaitu sebesar 60%, untuk kategori *inconclusive* sebesar 40% sedangkan hasil perhitungan kombinasi tidak menunjukkan adanya kesesuaian untuk kategori *not-match*. Hasil penghitungan rank correlation untuk tahun 2013 justru menunjukkan hasil yang lebih tinggi dari tahun 2010. Hasil rank correlation Kecamatan Maluku pada tahun 2013 adalah sebesar 60%. Dari 10 pasang kombinasi desa 70% diantaranya dalam kategori *match*, 30% untuk kategori *inconclusive*, dan tidak ada yang tidak sesuai.



Gambar 14. Perbandingan urutan kesejahteraan antardesa berdasarkan estimasi peta kemiskinan \$2 PPP dan FGD di Kecamatan Maluk, 2010 dan 2013

Sementara itu, tingkat kesesuaian hasil FGD dengan hasil estimasi berdasarkan \$2 PPP menunjukkan nilai yang lebih rendah, yaitu 50% pada 2013 dan 10% pada 2010. Dari 10 pasang kombinasi desa, pada 2013, 60% kombinasi pasangan dalam kategori *match*, 40% selanjutnya berada dalam kategori *inconclusive*, tidak ada yang tidak sesuai. Pada 2010, kombinasi pasangan yang masuk dalam kategori *match* dan *inconclusive* berimbang, masing-masing 50% dan tidak ada yang tidak sesuai.

Perbedaan urutan hasil FGD dan perhitungan tersebut kemungkinan terjadi karena tingkat kesejahteraan masyarakat antar desa di Kecamatan Maluk relatif sama. Hal ini terlihat dari sempitnya range atau perbedaan proporsi penduduk miskin (range headcount) antar desa yang berkisar antara 0.0255 hingga 0.0308 berdasarkan GKN atau antara 0.084 hingga 0.1376 berdasarkan \$2 PPP. Hasil perhitungan tersebut dikuatkan dengan hasil FGD dan wawancara yang menyatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat antar desa di kecamatan tersebut adalah relatif sama.

Tabel 18. Perbandingan Urutan Kesejahteraan Antardesa Hasil FGD dengan Pemetaan Kemiskinan berdasarkan GKN dan Garis Kemiskinan \$2 PPP di Kecamatan Maluk, 2010 dan 2013

Tahun	Jumlah Desa	N	Rank Correlation	Match		Inconclusive		Not Match	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
GKN:									
2010	5	10	0.20	6	60	4	40	0	0
2013	5	10	0.60	7	70	3	30	0	0
\$2 PPP:									
2010	5	10	0.10	5	50	5	50	0	0
2013	5	10	0.50	6	60	4	40	0	0

Hasil pengamatan terhadap tiga desa studi, yaitu Desa Pasir Putih, Maluk, dan Bukit Damai tidak menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berarti. Ketiga desa tersebut letaknya berdekatan, hanya dipisahkan oleh jalan atau gang, bahkan pusat kegiatan ekonominya cenderung bersatu membentuk satu wilayah semi urban. Hal tersebut terjadi karena sebelum pemekaran dan pembentukan Kecamatan Maluk pada 2007 ketiga desa tersebut ditambah dengan Desa Mantun merupakan satu desa, yaitu Desa Maluk. Karenanya, infrastruktur semua

desa hampir sama, yaitu dilalui jalan aspal cor dengan jalan lingkungan berupa jalan aspal biasa atau jalan perkerasan. Kondisi rumah penduduk juga hampir sama yaitu sebagian besar berupa rumah permanen dengan atap genteng, seng, atau asbes.

4.5. Kecamatan Ujung, Kota Parepare

4.5.1. Gambaran Umum Kecamatan

Kecamatan Ujung merupakan pusat perkotaan Parepare. Terletak di pesisir selat Malaka, topografi Kecamatan Ujung didominasi dataran rendah yang berbatasan dengan pesisir pantai dan juga mencakup sedikit daerah bukit yang berbatasan dengan Kabupaten Sidrap (Sidenreng Rappang). Ujung terdiri dari 5 kelurahan yaitu Lappade, Mallusetasi, Labukkang, Ujung Sabang, dan Ujung Bulu. Kecamatan ujung, dalam klasifikasi setempat, terdiri dari "daerah atas" dan "daerah bawah". Daerah atas merupakan sebutan untuk Lappade yang terletak berbatasan dengan Sidrap dengan topografi perbukitan. Sedangkan daerah bawah terdiri dari 4 kelurahan lain yang terletak di pusat kota. Khusus untuk Labukkang sedikit berbeda karena terletak di pesisir pantai. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir tidak ada perubahan wilayah administratif baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan.

Secara garis besar, kecamatan Ujung merupakan jalur perlintasan antar daerah yang menghubungkan kota Parepare baik dengan kabupaten lain seperti Sidrap dan Pangkep (Pangkajene dan Kepulauan). Kondisi ini membuat aktivitas ekonomi Kecamatan Ujung didominasi 3 sektor utama yaitu, sektor jasa, perdagangan, dan transportasi. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir selalu ada perubahan yang mendukung peningkatan aktivitas 3 sektor tersebut. Seperti pada saat ini akan dibangun Pasar Kuliner (sebelumnya sudah terdapat Pasar Labukkang dan Pasar Senggol), yang akan menjadi pusat kegiatan masyarakat di dekat pesisir pantai Parepare. Sebelumnya Parepare sudah terkenal dengan Pasar Senggol yang merupakan persinggahan barang-barang dari luar pulau dan luar negeri yang dijual dengan harga murah.

Namun demikian, terdapat juga karakteristik khas tiap kelurahan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Daerah atas, yaitu Kelurahan Lappade, merupakan daerah pemukiman utama masyarakat dan memiliki kepadatan penduduk tertinggi. Pemerintah daerah dalam rencana tata ruangnya mempersiapkan daerah tersebut sebagai kawasan industri. Namun hingga sekarang, kawasan yang nantinya dipersiapkan seluas 67 hektar ini, belum berhasil menarik investor atau industri. Industri yang ada merupakan industri kecil yang sifatnya rumahan. Industri kecil ini biasa memproduksi produk seperti keripik, mantou, dan aneka makanan seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Sedangkan kawasan Kelurahan Labukkang, yang terletak di pesisir, terdapat kegiatan perikanan laut, dimana banyak nelayan dengan skala produksi kecil yang tinggal disana. Tiga kelurahan lainnya yang berada di tengah kota didominasi kegiatan jasa dan bisnis yang diwarnai dengan banyaknya Ruko (Rumah Toko), hotel, dan fasilitas masyarakat lainnya. Perubahan yang cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir di daerah pusat kota ini antara lain bertambahnya jumlah hotel dan masuknya bank-bank baru. Kehadiran bank-bank ini sedikit banyak mendorong proses perkreditan, meski hampir sebagian besar fasilitas perbankan dimanfaatkan masyarakat untuk tabungan.

Konsentrasi penduduk terdapat di Lappade, karena memang merupakan daerah pemukiman. Penduduk sebagian besar memang beraktivitas di dalam kota dan tidak berpindah ke kecamatan atau daerah lain. Walaupun demikian penduduk cukup beraga, karena berasal dari berbagai etnis seperti Tionghoa, Makassar, Enrekka, Mandar, dan Bugis sebagai etnis utama. Sebagian besar kegiatan jasa dan perdagangan dijalankan penduduk Tionghoa sedangkan etnis Mandar banyak menjadi nelayan di pesisir.

Peran Ujung sebagai jalur perlintasan dan pusat kegiatan bisnis dan jasa didukung kualitas infrastruktur yang baik. Secara umum Kota Parepare memiliki kondisi jalan aspal yang sangat baik hingga pelosok kelurahan. Demikian pula dengan Kecamatan Ujung, hal ini juga didukung perbaikan kualitas jalan yang terus dianggarkan tiap tahun. Hampir 90% jalan kecamatan sudah diaspal. Transportasi didukung oleh kehadiran *petepete* (angkutan umum warna kuning), becak, dan ojek. Seperti kondisi umum Parepare tidak terdapat moda transportasi berupa bus dalam kota, tetapi Ujung memiliki terminal-terminal singgah bagi bus-bus antar kota.

Fasilitas penduduk masyarakat sudah cukup baik dan tidak banyak perubahan dalam 3 tahun terakhir. Ada 3 Pasar utama yaitu Labukkang, Senggol, dan Kuliner (sedang dalam tahap pengembangan) yang menjadi sentra kegiatan ekonomi. Ujung juga dilengkapi banyak fasilitas umum seperti Kantor Pos (di Mallusetasi) dan perbankan. Salah satu keunggulan Ujung adalah adanya fasilitas perguruan tinggi di Kecamatan Soreang. Terdapat Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR, sebelumnya sekolah keguruan STKIP). Fasilitas kesehatan juga sangat baik dimana terdapat dua Puskesmas dan dua Puskesmas Pembantu (Pustu) yang mendukung kehadiran 2 Rumah Sakit, yaitu RS Fatmawati dan Soemantri (keduanya swasta).

4.5.2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Antardesa

Berdasarkan hasil FGD ditingkat kecamatan, peserta berhasil menyepakati 4 (empat) faktor yang menentukan kesejahteraan di masing-masing kelurahan setempat.

Indikator ekonomi, peserta FGD memasukkan indikator ekonomi yang mencakup tingkat pendapatan, perkembangan jenis usaha, letak wilayah, dan peluang usaha. Jika pendapatan masyarakat semakin tinggi, maka kesejahteraan kelurahan semakin meningkat

Indikator pendidikan, dari hasil FGD masyarakat menentukan bahwa tingkat pendidikan yang semakin baik mampu membuat kesejahteraan masyarakat meningkat. Tingkat pendidikan tidak diukur dari banyaknya fasilitas melainkan juga pendidikan tertinggi rata-rata masyarakat

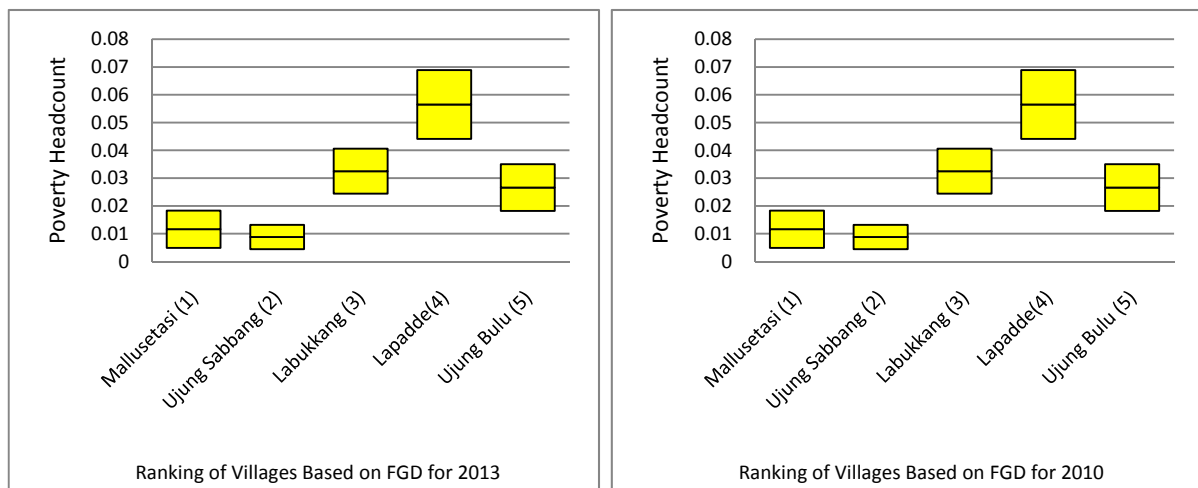
Indikator infrastruktur, meliputi kondisi jalan, ketersediaan drainase, waktu akses, ketersediaan transportasi, keberadaan fasilitas pendidikan, dan pelabuhan

Indikator kesehatan, peserta FGD menyepakati bahwa lingkungan tempat tinggal yang kumuh akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kualitas kesehatan itu sendiri mencakup angka kesakitan, kondisi drainase, umur harapan hidup, tingkat kematian balita, dan kesadaran atau keberadaan informasi terkait akses layanan kesehatan

4.5.3. Perbandingan Urutan Kesejahteraan Antardesa

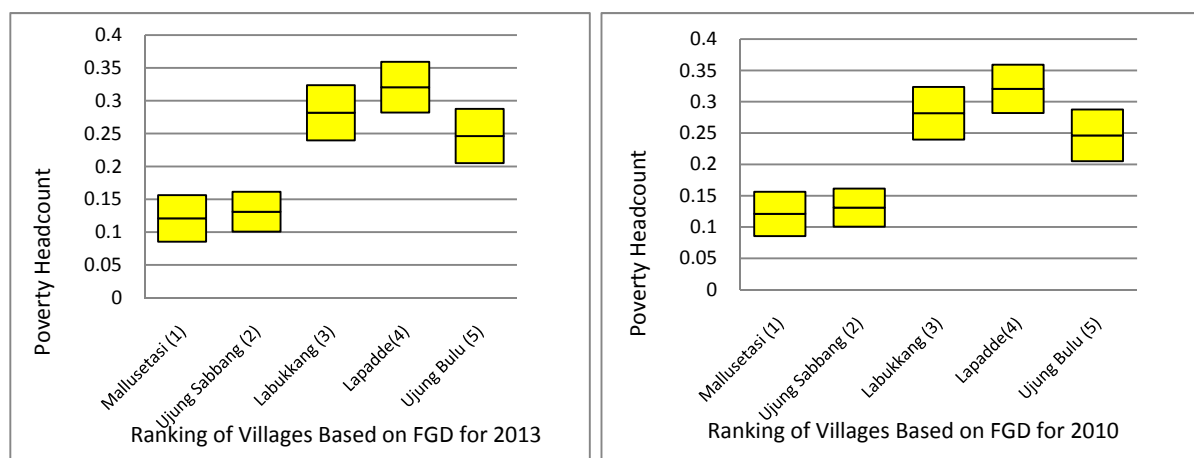
Dari Gambar 15 dan 16, kita mendapatkan gambaran kecocokan antara persepsi masyarakat terhadap perbandingan kesejahteraan antar kelurahan dan hasil perhitungan Poverty Map berdasarkan estimasi Garis Kemiskinan Nasional (GKN) dan \$2 PPP pada tahun 2010 dan 2013. Tingkat korelasi peringkat antara hasil FGD dan perhitungan PovMap di tahun 2013 dengan menggunakan GKN mencapai 0.60, artinya memang ada perbedaan persepsi urutan tingkat kesejahteraan. Jika dilihat melalui *pairwise correlation* yaitu dengan memasukkan *standar error* pada perhitungan, terdapat 70% kasus *matched*, 20% kasus *inconclusive*, dan 10% kasus *not match*. Sedangkan dengan menggunakan garis \$2 PPP, kita mendapatkan angka korelasi yang lebih tinggi yaitu 0.70. Hal ini menunjukkan bahwa kecocokan persepsi masyarakat dan perhitungan lebih baik pada garis \$2 PPP. Dengan menggunakan standar ini, pada analisis *pairwise correlation* ditemukan 80% kasus *matched*, 20% kasus *inconclusive*, dan tidak lagi ditemukan kasus *not matched*.

Jika dilihat pada gambar baik pada kasus GKN dan garis \$2 PPP, ketidakcocokan bersumber pada persepsi masyarakat yang meletakkan Kelurahan Ujung Bulu kurang sejahtera dibandingkan Kelurahan Labbukang dan Lappade. Dari hasil perhitungan, Kelurahan Ujung Bulu ditempatkan pada urutan ketiga dari lima kelurahan. Dalam realitanya, menurut persepsi peserta FGD, ketiga kelurahan ini terletak sangat berdekatan dan memang sama-sama memiliki karakteristik perkotaan yang kuat. Hal ini juga menyebabkan kasus *inconclusive* antara tiga kelurahan, Labukkang, Lappade, dan Ujung Bulu.



Gambar 15. Perbandingan urutan kesejahteraan antardesa berdasarkan estimasi peta kemiskinan GKN dan FGD di Kecamatan Ujung, 2010 dan 2013

Dari kedua gambar tersebut juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan hasil persepsi masyarakat terhadap urutan tingkat kesejahteraan antar kelurahan di tahun 2010. Dalam hal ini, sekali lagi dapat disimpulkan bahwa kecocokan persepsi antara peserta FGD dan hasil perhitungan lebih baik ketika menggunakan garis \$2 PPP. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, rupanya di tahun 2010 masyarakat tetap menganggap Kelurahan Ujung Bulu sebagai kelurahan dengan tingkat kesejahteraan terendah. Dari hasil diskusi dan juga wawancara terhadap tokoh-tokoh masyarakat setempat, kelurahan Ujung Bulu dianggap memiliki banyak penduduk kurang sejahtera karena terdapat banyak sekali pendatang di kelurahan tersebut.



Gambar 16. Perbandingan urutan kesejahteraan antardesa berdasarkan estimasi peta kemiskinan \$2 PPP dan FGD di Kecamatan Ujung, 2010 dan 2013

Para pendatang ini tidak seluruhnya bersifat permanen, justru banyak juga yang bersifat nomaden ataupun musiman. Sifat musiman ini sangat terkait dengan pekerjaan asli para pendatang yang merupakan petani baik sawah ataupun kebun di Kabupaten lain seperti Sidrap dan Pinrang. Para pendatang musiman ini datang dikala musim tanam sudah selesai dan akan kembali lagi ke desa asal ketika musim panen tiba. Ketika tinggal di Parepare, mereka banyak bekerja sebagai tukang ojek, pengayuh becak, ataupun buruh-buruh pelabuhan. Mereka tinggal di tempat-tempat kumuh di daerah perbukitan di kelurahan Ujung Bulu. Keberadaan mereka yang bukan merupakan penduduk tetap acapkali menambah kesulitan dalam pemberitan program bantuan. Kasus banyaknya pendatang ini sangat terkait posisi Ujung Bulu yang strategis di perlintasan jalan poros yang menghubungkan Parepare dengan kabupaten terdekat dan dekat dengan pusat kota. Peserta FGD menganggap jenis pekerjaan juga terbatas, begitu juga dengan infrastruktur.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan masyarakat setempat memang sulit untuk membedakan tingkat kesejahteraan di kelurahan-kelurahan tersebut. Di setiap kelurahan memiliki kantong-kantong kemiskinan tersendiri. Di Kelurahan Ujung Bulu misalnya memang terdapat dua daerah yang menjadi konsentrasi kemiskinan. Dua daerah ini adalah RW 9 dan RW 10, atau lebih dikenal sebagai Panorama dan Lasiming. Di dua daerah tersebut memang masih terdapat rumah panggung yang besar bisa dihuni sampai 20 jiwa. Di kedua daerah ini, karena topografinya yang memang berupa perbukitan, seringkali terjadi kesulitan akses air bersih. Penduduk tidak bisa mengandalkan PDAM semata dan harus memiliki sumber air cadangan. Menurut beberapa narasumber, memang sedikit sulit untuk menyebut para pendatang dengan kerja serabutan tersebut sebagai orang miskin karena mereka pada kenyataannya memiliki sawah dan aset lain yang ada di kampung masing-masing.

Faktor lain yang menyebabkan kelurahan Ujung Bulu dikatakan lebih buruk dari Lappade ataupun Labukkang adalah penilaian indikator yang dipilih oleh peserta FGD. Dari sisi infrastruktur misalnya, Kelurahan Ujung Bulu tidak memiliki jumlah fasilitas pendidikan sebanyak kelurahan lain. Di Ujung Bulu hanya terdapat TK, SD dan SMA, padahal misalnya di Lappade terdapat fasilitas universitas (yaitu UMPAR). Kondisi ini sebenarnya tidak terlalu berdampak karena akses menuju kecamatan lain sangat mudah dan lancar.. Faktor lain adalah kurangnya variasi pekerjaan penduduk. Menurut peserta FGD, pembangunan yang mulai mengarah ke Lappade menciptakan banyak peluang usaha baru apalagi Lappade semakin padat oleh penduduk. Begitu pula dengan Labukkang yang memiliki pasar besar dengan aktivitas pasar yang tinggi. Peluang usaha dan jenis pekerjaan yang bisa ditawarkan di Kelurahan ini cenderung sedikit dan menurut peserta FGD sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk

Tabel 19. Perbandingan Urutan Kesejahteraan Antardesa Hasil FGD dengan Pemetaan Kemiskinan berdasarkan GKN dan Garis Kemiskinan \$2 PPP di Kecamatan Ujung, 2010 dan 2013

Tahun	Jumlah Desa	N	Rank Correlation	Match		Inconclusive		Not Match	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
GKN:									
2010	5	10	0.60	7	70	2	20	1	10
2013	5	10	0.60	7	70	2	20	1	10
\$2 PPP:									
2010	5	10	0.70	8	80	2	20	0	0
2013	5	10	0.70	8	80	2	20	0	0

Secara umum, memang dapat dilihat adanya kesulitan bagi peserta FGD untuk menentukan kriteria pembeda dan menilai perbedaan antar kelurahan di Kecamatan Ujung. Faktor karakteristik perkotaan yang memang secara kasat mata homogen membuat perbandingan lebih sulit. Dari ketiga kelurahan yaitu Ujung Bulu, Lappade, dan Labukkang memang memiliki ciri-ciri yang sangat mirip, baik dari corak perekonomian maupun sosial, sehingga berpotensi menyulitkan perbandingan.

4.6. Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare

4.6.1. Gambaran Umum Kecamatan

Kecamatan Bacukiki sudah ada sejak awal berdirinya Kota Parepare dan merupakan hasil pemekaran wilayah Kecamatan Bacukiki Barat pada tahun 2008. Kecamatan Bacukiki memiliki luas wilayah sekitar 79 km² dan terdiri atas 4 kelurahan, yakni Kelurahan Wattang Bacukiki, Kelurahan Lemoe, Kelurahan Lompoe, dan Kelurahan Galung Maloang. Lahan di Kecamatan Bacukiki mayoritas dimanfaatkan untuk pertanian (sekitar 70%) terutama di daerah Wattang Bacukiki dan Galung Maloang. Sisanya dimanfaatkan untuk pemukiman (terpusat di Lompoe dan Galung Maloang) dan juga tambak di wilayah Wattang Bacukiki.

Sumber daya alam yang dimanfaatkan di Kecamatan Bacukiki adalah padi dan jenis-jenis tanaman kebun seperti kacang tanah, jagung, sayur, pisang, jambu mete, dan jati. Tanaman-tanaman tersebut biasanya ditanam setelah para petani memanen padi. Dari segi luas wilayah, kelurahan yang paling luas adalah Kelurahan Lemoe lalu disusul oleh Wattang Bacukiki. Sepanjang tahun 2010-2013 terjadi perubahan pemanfaatan lahan, dimana pemukiman banyak masuk ke Bacukiki dan memanfaatkan lahan kosong yang masih tersedia. Berdasarkan Rancangan Tata Ruang Wilayah, Pemerintah Parepare mengalokasikan daerah Galung Maloang dan Lompoe sebagai daerah pemukiman. Banyak *developer* pemukiman yang masuk selama 3 tahun terakhir, dan biasanya lahan perkebunan yang dikonversi menjadi wilayah pemukiman.

Akses dari Kecamatan Bacukiki hingga ke pusat kota Parepare dan juga Makassar dapat dikatakan sudah baik. Pusat kota dapat dicapai dengan motor dalam waktu 20 menit, sedangkan untuk ke Makassar banyak angkutan umum yang melintas dan bisa dicapai dalam 3 jam. Jalan lingkungan di wilayah kelurahan sudah cukup baik, namun untuk Kelurahan Wattang Bacukiki kondisi jalan lingkungannya masih merupakan jalan setapak, khususnya di wilayah RW 5. Secara umum kondisi jalan di Kecamatan Bacukiki sudah bagus walaupun beberapa masih ada yang perlu direhabilitasi karena ada kerusakan kecil. Kondisi jalan yang baik ini memudahkan masuknya transportasi umum seperti angkot atau *pete-pete*. Hanya di Kelurahan Wattang Bacukiki saja yang belum terlalu banyak kendaraan umum, padahal para petani sangat bergantung kepada angkot untuk berjualan hasil taninya.

Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk, Kelurahan Lompoe dan Galung Maloang merupakan yang terpadat di Kecamatan Bacukiki karena disana banyak dibangun perumahan. Kelurahan Galung Maloang sendiri merupakan pemekaran dari wilayah Kelurahan Lompoe pada tahun 2008. Jumlah penduduk pendatang di wilayah Kecamatan Bacukiki bisa dibilang cukup banyak, namun jumlah penduduk asli masih jauh lebih banyak dan umumnya para pendatang masih berasal dari Parepare. Masuknya para pendatang ini memunculkan jenis-jenis usaha baru dan meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi penduduk Kecamatan Bacukiki, seperti usaha minimarket Indomaret.

Sarana prasarana dasar di Kecamatan Bacukiki sudah tersedia dengan baik, khususnya untuk listrik dan air. Saluran listrik sudah menjangkau hampir seluruh wilayah Kecamatan Bacukiki, namun tetap ada beberapa rumah yang terlalu jauh untuk dijangkau tiang listrik. Akses air bersih sudah dapat dinikmati oleh 90% warga Kecamatan Bacukiki, namun beberapa wilayah ada yang masih sulit mengakses air bersih, seperti Kelurahan Lemoe dan wilayah Lappa'angi di Wattang Bacukiki karena memang wilayahnya adalah daerah kering. Sehubungan dengan kurangnya akses air bersih di Lemoe dan Wattang Bacukiki, masyarakat disana masih banyak yang belum menggunakan jamban.

Jika ditinjau dari jenis mata pencahariannya, penduduk Kecamatan Bacukiki didominasi oleh petani dan sisanya adalah PNS atau buruh dan tukang ojeg. Sektor pertanian masih menjadi penggerak utama perekonomian di Kecamatan Bacukiki. Terdapat beberapa industri di wilayah Kecamatan Bacukiki, antara lain industri pengolahan limbah dan *balloke* (minuman keras), industri rumahan pengolahan jambu mete, batu bata, dan industri meuble. Industri-industri ini masih berskala kecil hingga menengah dan baru berkembang dalam 2-3 tahun terakhir. Keberadaan industri di wilayah Bacukiki membuka lapangan kerja bagi penduduk usia produktif.

4.6.2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Antardesa

Berdasarkan hasil diskusi dengan masyarakat Kecamatan Bacukiki melalui FGD, telah disepakati beberapa indikator yang digunakan masyarakat untuk menilai tingkat kesejahteraan antar kelurahan di Kecamatan Bacukiki. Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Indikator infrastruktur, yang disepakati peserta FGD sebagai penentu tingkat kesejahteraan kelurahan, meliputi keberadaan sarana pendidikan, kesehatan, sarana air bersih, sanitasi, pasar, komunikasi, tempat tinggal, dan transportasi.

Indikator pendidikan, peserta FGD menganggap pendidikan merupakan indikator penentu kesejahteraan, dan indikator ini meliputi tingkat pendidikan, partisipasi sekolah, tingkat keterampilan, kondisi SDM, dan motivasi.

Indikator pendapatan, aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam pendapatan adalah jenis usaha, kepemilikan aset, kesempatan kerja, pola konsumsi & gizi, serta terpenuhinya kebutuhan sandang & pangan.

Indikator kesehatan, yang dimaksud lebih mengarah pada kondisi kesehatan masyarakat umum, yang meliputi tingkat kunjungan dan keaktifan Posyandu, tingkat kematian ibu & balita, kasus gizi buruk, serta kualitas drainase

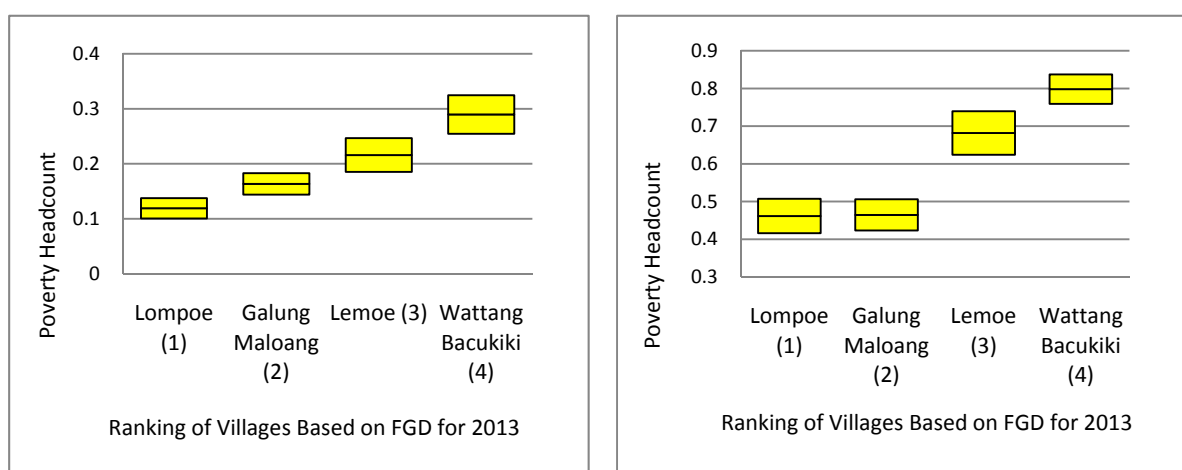
Indikator industri, peserta FGD berpendapat bahwa keberadaan dan variasi jenis industri di kelurahan turut menentukan tingkat kesejahteraan sebuah kelurahan

Indikator pengangguran, turut dipertimbangkan sebagai faktor penentu kesejahteraan, mengingat jika pengangguran di sebuah kelurahan rendah maka kesejahteraan masyarakatnya meningkat

4.6.3. Perbandingan Urutan Kesejahteraan Antardesa

Gambar 17 dan 18 menampilkan perbandingan antara peringkat kesejahteraan antar kelurahan hasil diskusi di FGD untuk tahun 2010 dan 2013 dengan peringkat kesejahteraan hasil Poverty Map baik dengan menggunakan Garis Kemiskinan Nasional (GKN) maupun dengan menggunakan garis kemiskinan \$2 PPP. Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian antara hasil pemeringkatan Poverty Map (baik menggunakan GKN maupun garis kemiskinan \$2) dan juga hasil FGD. Tingkat korelasi antara peringkat hasil FGD dan estimasi Poverty Map mencapai angka tertinggi, yakni 100% (Tabel 4.6). Poverty Map menghasilkan peringkat kesejahteraan antar kelurahan yang sesuai dengan persepsi para peserta FGD untuk tahun 2013.

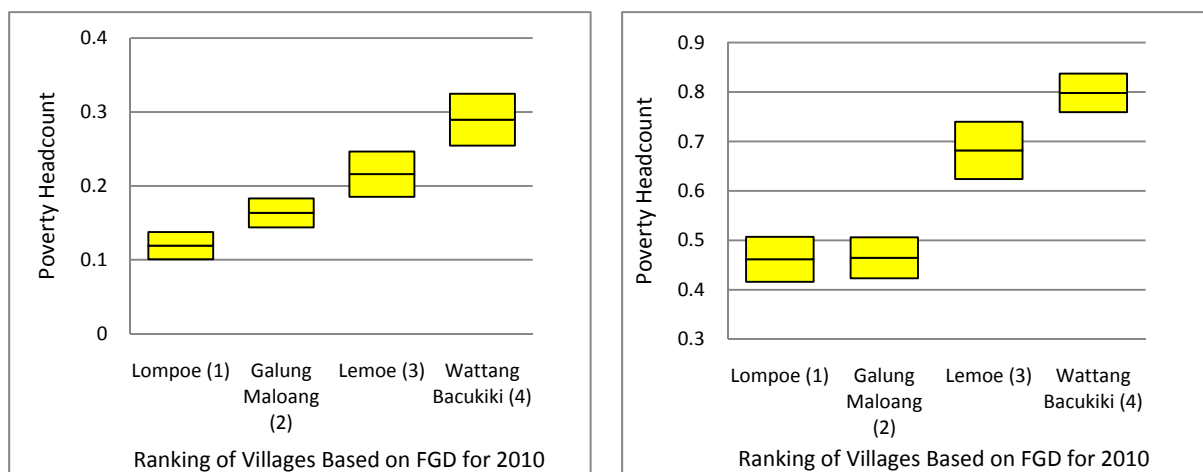
Perbandingan dari keseluruhan 6 pasang kelurahan di tahun 2013 menghasilkan 100% kasus *match*. Hal yang sama juga terjadi untuk perbandingan hasil pemeringkatan kesejahteraan antara Poverty Map dengan FGD untuk tahun 2010. Korelasi hasil FGD untuk tahun 2010 dan Poverty Map mencapai 100%. Perbandingan dari keseluruhan 6 pasang kelurahan di tahun 2010 juga menghasilkan 100% kasus *match*. Secara keseluruhan, hasil korelasi dirangkum dalam Tabel 4.6.



Gambar 17. Perbandingan urutan kesejahteraan antardesa berdasarkan estimasi peta kemiskinan GKN dan FGD di Kecamatan Bacukiki, 2010 dan 2013

Gambar 17 dan 18 juga menampilkan perbandingan antara peringkat kesejahteraan antar kelurahan hasil diskusi di FGD untuk tahun 2013 dengan peringkat kesejahteraan hasil Poverty Map baik dengan menggunakan Garis Kemiskinan Nasional (GKN) maupun dengan menggunakan garis kemiskinan \$2 PPP. Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian antara hasil pemeringkatan Poverty Map (baik menggunakan GKN maupun garis kemiskinan \$2) tahun 2013 dan juga hasil FGD. Tingkat korelasi antara peringkat hasil FGD dan estimasi Poverty Map mencapai angka tertinggi, yakni 100% (Tabel 20).

Poverty Map menghasilkan peringkat kesejahteraan antar kelurahan yang sesuai dengan persepsi para peserta FGD untuk tahun 2013. Perbandingan dari keseluruhan 6 pasang kelurahan di tahun 2013 menghasilkan 100% kasus *match*. Hal yang sama juga terjadi untuk perbandingan hasil pemeringkatan kesejahteraan antara Poverty Map dengan FGD untuk tahun 2010. Selain itu, ditampilkan pula perbandingan antara hasil Poverty Map dan hasil FGD, dimana korelasi hasil FGD dan Poverty Map mencapai 100%. Perbandingan dari keseluruhan 6 pasang kelurahan di tahun 2010 juga menghasilkan 100% kasus *match*. Secara keseluruhan, hasil korelasi dirangkum dalam Tabel 20.



Gambar 18. Perbandingan urutan kesejahteraan antardesa berdasarkan estimasi peta kemiskinan \$2 PPP dan FGD di Kecamatan Bacukiki, 2010 dan 2013

Perbedaan karakteristik antar kelurahan di Kecamatan Bacukiki cukup mencolok dan dapat terlihat secara kasat mata. Karakteristik penghidupan di kelurahan-kelurahan yang termasuk Kecamatan Bacukiki juga dapat teridentifikasi berdasarkan lokasi tempat tinggal, dimana para petani banyak yang berasal dari Kelurahan Wattang Bacukiki, sementara PNS dan guru mendominasi mata pencaharian sebagian besar warga Kelurahan Lompoe dan Galung Maloang. Karakteristik ini terbentuk dengan sendirinya karena banyak perumahan yang dibangun di wilayah Lompoe dan Galung Maloang, sementara di wilayah Wattang Bacukiki masih terdapat banyak sawah yang luas. Model Poverty Map sendiri banyak menggunakan variabel rumah tangga untuk mengestimasi tingkat kemiskinan di Parepare. Variabel rumah tangga banyak dipengaruhi oleh mata pencaharian dalam sebuah rumah tangga, seperti kondisi rumah, kondisi lantai, tingkat pendidikan anggota rumah tangga, dan lain sebagainya. Hal ini menjelaskan keberhasilan model Poverty Map dalam mengestimasi peringkat kesejahteraan antar kelurahan di Bacukiki dengan akurat.

Tabel 20. Perbandingan Urutan Kesejahteraan Antardesa Hasil FGD dengan Pemetaan Kemiskinan berdasarkan GKN dan Garis Kemiskinan \$2 PPP di Kecamatan Bacukiki, 2010 dan 2013

Tahun	Jumlah Desa	N	Rank Correlation	Match		Inconclusive		Not Match	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
GKN:									
2010	4	6	1.00	6	100	0	0	0	0
2013	4	6	1.00	6	100	0	0	0	0
\$2 PPP:									
2010	4	6	1.00	6	100	0	0	0	0
2013	4	6	1.00	6	100	0	0	0	0

4.7. Ringkasan: Perbandingan Kemiskinan Antardesa

Tabel 21 menyajikan ringkasan perbandingan peringkat kesejahteraan antar desa berdasarkan hasil FGD dan hasil pemetaan kemiskinan untuk keenam kecamatan yang menjadi sampel. Korelasi antara hasil FGD dan pemetaan kemiskinan bervariasi untuk keenam kecamatan, dimana Kecamatan Bacukiki menunjukkan hasil pemeringkatan kesejahteraan yang paling konsisten antara FGD dengan Poverty Mapping baik dengan menggunakan GKN maupun garis kemiskinan \$2 PPP. Secara umum terdapat korelasi yang tinggi antara hasil FGD dan Poverty Map untuk pemeringkatan kesejahteraan antar desa di kecamatan baik dengan menggunakan GKN maupun garis kemiskinan \$2 PPP, kecuali untuk Kecamatan Muntok dan Kecamatan Maluk.

Tabel 21. Perbandingan Peringkat Kesejahteraan Antar Desa Berdasarkan FGD dan Poverty Map untuk 6 Kecamatan Sampel, 2010 dan 2013

Kecamatan	Jumlah Desa	N	Rank Correlation		Pair Wise Comparisons of Ranking berdasarkan Poverty Mapping dan					
					FGD Ranking 2010			FGD Ranking 2013		
			2013	2010	Match	Incon-clusive	Not Match	Match	Incon-clusive	Not Match
GKN										
Ujung	5	10	0.60	0.60	70%	20%	10%	70%	20%	10%
Bacukiki	4	6	1.00	1.00	100%	0%	0%	100%	0%	0%
Muntok	7	21	0.32	0.04	43%	14%	43%	48%	24%	28%
Simpang Teritip	13	78	0.62	0.65	68%	20%	12%	71%	20%	9%
Maluk	5	10	0.60	0.20	70%	30%	0%	60%	40%	0%
Poto Tano	8	28	0.81	0.81	86%	14%	0%	86%	14%	0%
Total GKN	42	153			71%	20%	9%	69%	18%	12%
\$2 PPP										
Ujung	5	10	0.70	0.70	80%	20%	0%	80%	20%	0%
Bacukiki	4	6	1.00	1.00	100%	0%	0%	100%	0%	0%
Muntok	7	21	0.18	0.14	48%	14%	38%	53%	14%	33%
Simpang Teritip	13	78	0.49	0.53	64%	22%	14%	67%	22%	11%
Maluk	5	10	0.50	0.10	60%	40%	0%	50%	50%	0%
Poto Tano	8	28	0.64	0.64	71%	21%	7%	71%	21%	7%
Total \$2 PPP	42	153			67%	22%	12%	65%	21%	14%

Berbeda dengan perbandingan antar kecamatan di kabupaten/kota, perbandingan antar desa/kelurahan di kecamatan menunjukkan estimasi kemiskinan berdasarkan GKN memiliki akurasi yang lebih baik dari estimasi kemiskinan berdasarkan GK \$2 PPP. Hal yang sama adalah bahwa tingkat kesesuaian ranking 2010 lebih baik dari tahun 2013.

Hal yang penting untuk dicermati adalah kecamatan yang memiliki RSE tinggi dalam kabupatennya memiliki *rank correlation* dan tingkat kesesuaian (*match*) yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kecamatan yang memiliki RSE rendah di kabupaten yang sama. Untuk itu dalam membaca angka kemiskinan tingkat desa dan kecamatan perlu mempertimbangkan nilai *standard error*.

Dari proses FGD yang dilakukan SMERU, ketidaksesuaian ranking kesejahteraan antara estimasi dengan persepsi bisa terjadi karena adanya kecenderungan peserta FGD untuk terfokus pada satu indikator tertentu. Sebagai contoh, di Kecamatan Muntok telah terbentuk persepsi bahwa daerah kelurahan pasti memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik daripada daerah desa. Persepsi ini cenderung mempengaruhi peserta FGD dalam menganalisis tingkat kesejahteraan antar desa di Kecamatan Muntok. Indikator jarak juga bisa menjadi penentu utama kesejahteraan dimana semakin jauh dari ibukota kabupaten maka daerah tersebut dianggap semakin tidak sejahtera. Penyebab lain dari inkonsistensi peringkat kesejahteraan antara hasil FGD dan peta kemiskinan yakni karakteristik kesejahteraan yang hampir mirip secara kasat mata sehingga menyulitkan peserta FGD dalam mengurutkan desa-desa dalam peringkat kesejahteraan yang diskrit. Sebagai contoh, Kecamatan Maluk memiliki empat desa yang berdasarkan sejarah merupakan hasil pemekaran dari desa yang sama. Secara geografis pun letaknya sangat berdekatan sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar desa-desa tersebut dari segi kesejahteraan. Keadaan ini menyulitkan peserta FGD dalam menyusun peringkat kesejahteraan antar desa yang sesungguhnya.

V. PERBANDINGAN HASIL PEMETAAN KEMISKINAN DAN KLASIFIKASI KEKAYAAN MASYARAKAT

Persepsi masyarakat terhadap tingkat kesejahteraan yang ada di lingkungan mereka berbeda-beda, tetapi secara umum kita dapat menangkap pola-pola umum persepsi masyarakat tersebut. Dalam studi verifikasi ini, dilaksanakan FGD dengan unsur berbagai tokoh masyarakat di desa atau kelurahan untuk memahami persepsi masyarakat setempat mengenai tingkat kesejahteraan di lingkungannya. Dalam studi ini, terdapat 18 desa sampel yang tersebar di 3 kecamatan dan 3 kabupaten/kota yang berbeda. Dengan bantuan aparat desa/kelurahan setempat, pada setiap desa sampel dikumpulkan tokoh-tokoh masyarakat, mulai dari aparat kelurahan dan kantor desa, kader Posyandu, hingga tokoh-tokoh agama. Penentuan peserta FGD sudah mengakomodasi keseimbangan proporsi jenis kelamin dan latar belakang pekerjaan peserta. Para peserta yang hadir merupakan orang-orang yang dianggap sangat mengenal kondisi kesejahteraan masyarakat di desa/kelurahannya. Hasil verifikasi peta kemiskinan menunjukkan bahwa adanya perbedaan persepsi pada masyarakat ketika harus mengelompokkan golongan kesejahteraan di lingkungannya. Perbedaan ini dilandasi juga dari ketidaksepakatan masyarakat dalam menentukan faktor-faktor penentu dalam individu atau rumah tangga untuk mengelompokkan golongan kesejahteraan. Meskipun demikian, terdapat kesamaan dalam faktor-faktor yang disebutkan oleh masyarakat tersebut. Faktor-faktor yang paling sering muncul dari hasil diskusi FGD masyarakat di 18 desa sampel verifikasi poverty map adalah sebagai berikut: (1) penghasilan, (2) pendidikan, (3) kepemilikan aset (dalam hal ini dapat berupa tanah, lahan, ternak, perabot, dan kendaraan bermotor), (4) kondisi rumah, (5) kesehatan, (6) pola makan dan sandang, (7) pola hubungan sosial. Ketujuh hal tersebut merupakan faktor yang paling sering muncul di hasil FGD bersama tokoh-tokoh masyarakat. Di luar faktor-faktor tersebut, beberapa desa/kelurahan memiliki indikator lain yang digunakan secara khas di lingkungan mereka. (selengkapnya lihat Apendiks A).

Secara umum, masyarakat memandang ada 4 kelompok masyarakat berdasarkan golongan kesejahteraannya. Kelompok masyarakat tersebut adalah kelompok sangat miskin/fakir, miskin, menengah, dan kaya. Meskipun muncul dengan istilah-istilah khas daerah yang berbeda, dari 18 kelompok FGD desa, hampir separuh dari desa sampel membagi kelompok masyarakatnya dalam pola golongan tingkat kesejahteraan tersebut. Sedangkan sebanyak 8 desa sampel lainnya membagi golongan tingkat kesejahteraan dalam 3 kelompok, yaitu miskin/fakir, menengah, dan kaya. Sebagian kecil lainnya seperti di Kelurahan Wattang Bacukiki, Kota Parepare dan Desa Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat mengelompokkan masyarakatnya dalam 5 golongan tingkat kesejahteraan. Proporsi masing-masing golongan tingkat kesejahteraan yang ada tiap desa sampel dapat dilihat pada Lampiran B.

Tabel 22. Perbandingan Estimasi Kemiskinan berdasarkan Peta Kemiskinan dan Persepsi Masyarakat, 2010

District/ Subdistrict Village	Urban /Rural	Administrativ e Status	FGD Result (2010)			GKN - Quantitative Poverty Estimate			\$2 PPP - Quantitative Poverty Estimate			
			Poor	Very Poor	Poor & Very Poor	Minim um	Maxi mum	Point Estimat e	Minim um	Maxim um	Point Estimate	
Bangka Belitung - Bangka Barat												
Muntok												
Air Limau	R	Desa	41.0%	9.0%	50.0%	-0.1%	0.7%	0.3%	9.0%	17.8%	13.4%	
Air Putih	R	Desa	21.0%	-	21.0%	0.6%	2.6%	1.6%	19.4%	32.2%	25.8%	
Belo Laut	R	Kelurahan	22.0%	-	22.0%	6.4%	13.6%	10.0%	39.8%	53.5%	46.7%	
Simpang Teritip												
Simpang Gong	R	Desa	23.0%	-	23.0%	0.9%	5.4%	3.0%	29.6%	45.0%	37.3%	
Kundi	R	Desa	14.0%	-	14.0%	3.5%	8.8%	6.0%	40.9%	55.8%	48.3%	
Peradong	R	Desa	50.0%	16.0%	66.0%	14.1%	22.8%	18.0%	67.2%	77.2%	72.2%	
NTB - Sumbawa Barat												
Poto Tano												
Tua Nanga	R	Desa	66%	-	66%	37%	74%	55%	33%	144%	89%	
Kiantar	R	Desa	17%	45%	62%	-12%	106%	46%	82%	100%	91%	
Senayan	R	Desa	65%	-	65%	12%	38%	25%	41%	67%	54%	
Maluk												
Maluk	R	Desa	15%	5%	20%	1%	8%	5%	10%	27%	18%	
Pasir Putih	R	Desa	23%	-	23%	-1%	5%	2%	2%	26%	14%	
Bukit Damai	R	Desa	30%	7%	37%	0%	7%	3%	5%	28%	16%	
Sulawesi Selatan – Parepare												
Bacukiki												
Wattang Bacukiki	R	Kelurahan	56%	8%	64%	25.5%	32.5%	29%	75.9%	83.7%	79.8%	
Lompoe	U	Kelurahan	53%	30%	83%	10.2%	13.8%	12%	41.6%	50.7%	46.2%	
G. Maloang	U	Kelurahan	56%	-	66%	14%	18%	16%	42.3%	50.6%	46.5%	
Ujung												
Lappade	U	Kelurahan	31%	7%	38%	-0.8%	2.2%	1%	28.2%	35.9%	32.1%	
Mallusetasi	U	Kelurahan	28%	15%	43%	0.3%	1.7%	1%	8.55%	15.6%	12.1%	
Ujung Bulu	U	Kelurahan	30%	12%	42%	2.2%	3.8%	3%	20.5%	28.8%	24.63	

Jika membandingkan hasil estimasi masyarakat dengan estimasi peta kemiskinan, dapat dilihat adanya perbedaan yang cukup mencolok. Di tahun 2010 (lihat Tabel 22), terdapat 14 dari 18 kabupaten, dimana proporsi sangat miskin dan miskin jauh melampaui batas maksimal estimasi peta kemiskinan dengan menggunakan Garis Kemiskinan Nasional (GKN). Dalam hal ini, secara arbitrari perbedaan dikategorikan sebagai "jauh melampaui" ketika selisih perbedaan antar

estimasi di atas 20%. Terdapat 2 desa yang memiliki tingkat estimasi masyarakat sedikit melampaui batas maksimal estimasi peta kemiskinan. Hanya ada 2 desa, dimana estimasi hasil persepsi masyarakat berada di bawah batas maksimal estimasi peta kemiskinan. Tidak ditemukan adanya estimasi masyarakat yang berada di bawah batas minimal estimasi peta kemiskinan.

Studi verifikasi ini juga menguji persepsi masyarakat terhadap hasil estimasi peta kemiskinan yang menggunakan standar garis kemiskinan \$2 PPP. Hasilnya, pada tahun 2010 (lihat Tabel 22), terdapat hanya 4 desa/kelurahan saja yang memiliki hasil estimasi persepsi masyarakat jauh melampaui batas maksimal estimasi peta kemiskinan. Terdapat 3 desa/kelurahan yang memiliki hasil estimasi persepsi masyarakat sedikit di atas batas maksimal estimasi peta kemiskinan. Selanjutnya, ada 5 desa/kelurahan yang memiliki hasil estimasi masyarakat yang berada pada rentangan batas minimal dan maksimal estimasi peta kemiskinan. Sebanyak 5 desa/kelurahan memiliki hasil estimasi sedikit dibawah batas minimal hasil estimasi peta kemiskinan. Hanya terdapat 1 desa yang memiliki estimasi hasil persepsi masyarakat berada jauh di bawah batas minimal estimasi peta kemiskinan.

Tabel 23. Perbandingan Estimasi Kemiskinan berdasarkan Peta Kemiskinan dan Persepsi Masyarakat, 2013

District/ Subdistrict Village	Urban /Rural	Administrativ e Status	FGD Result (2013)			GKN - Quantitative Poverty Estimate			\$2 PPP - Quantitative Poverty Estimate		
			Poor	Very Poor	Poor & Very Poor	Minim um	Maxi mum	Point Estimat e	Minim um	Maxim um	Point Estimate
Bangka Belitung - Bangka Barat											
Muntok											
Air Limau	R	Desa	39.0%	7.0%	46.0%	-0.1%	0.7%	0.3%	9.0%	17.8%	13.4%
Air Putih	R	Desa	15.0%	-	15.0%	0.6%	2.6%	1.6%	19.4%	32.2%	25.8%
Belo Laut	R	Kelurahan	19.0%	-	19.0%	6.4%	13.6%	10.0%	39.8%	53.5%	46.7%
Simpang Teritip											
Simpang Gong	R	Desa	44.0%	-	44.0%	0.9%	5.4%	3.0%	29.6%	45.0%	37.3%
Kundi	R	Desa	19.0%	-	19.0%	3.5%	8.8%	6.0%	40.9%	55.8%	48.3%
Peradong	R	Desa	46.0%	17.0%	63.0%	14.1%	22.8%	18.0%	67.2%	77.2%	72.2%
NTB - Sumbawa Barat											
Poto Tano											
Tua Nanga	R	Desa	50%	-	50%	37%	74%	55%	33%	144%	89%
Kiantar	R	Desa	12%	47%	59%	-12%	106%	46%	82%	100%	91%
Senayan	R	Desa	60%	-	60%	12%	38%	25%	41%	67%	54%
Maluk											
Maluk	R	Desa	27%	7%	34%	1%	8%	5%	10%	27%	18%
Pasir Putih	R	Desa	17%	-	17%	-1%	5%	2%	2%	26%	14%
Bukit Damai	R	Desa	26%	5%	31%	0%	7%	3%	5%	28%	16%

Sulawesi Selatan – Parepare

Bacukiki											
Wattang Bacukiki	R	Kelurahan	51%	8%	59%	25.5%	32.5%	29%	75.9%	83.7%	79.8%
Lompoe	U	Kelurahan	42%	20%	62%	10.2%	13.8%	12%	41.6%	50.7%	46.2%
G. Maloang	U	Kelurahan	40%	-	40%	14%	18%	16%	42.3%	50.6%	46.5%
Ujung											
Lappade	U	Kelurahan	22%	2%	24%	-0.8%	2.2%	1%	28.2%	35.9%	32.1%
Mallusetasi	U	Kelurahan	29%	10%	39%	0.3%	1.7%	1%	8.55%	15.6%	12.1%
Ujung Bulu	U	Kelurahan	22%	12%	34%	2.2%	3.8%	3%	20.5%	28.8%	24.63

Dalam kondisi kemiskinan berdasarkan GKN, di tahun 2013 (lihat Tabel 23) terdapat 13 dari 18 kabupaten yang proporsi sangat miskin dan miskin jauh melampaui batas maksimal estimasi peta kemiskinan dengan menggunakan Garis Kemiskinan Nasional. Di sisi lain, terdapat 3 desa yang memiliki tingkat estimasi sedikit melampaui batas maksimal estimasi peta kemiskinan. Terdapat 4 desa, dimana estimasi hasil persepsi masyarakat berada di bawah batas maksimal estimasi peta kemiskinan. Sekali lagi, tidak ditemukan adanya estimasi masyarakat yang berada di bawah batas bawah estimasi peta kemiskinan. Berdasarkan hasil ini, terlihat adanya kedekatan ketika membandingkan hasil estimasi masyarakat dengan hasil perhitungan peta kemiskinan pada tahun 2013. Konsisten dengan kondisi 2010, estimasi masyarakat akan lebih dekat pada estimasi peta kemiskinan apabila hanya dimasukkan unsur golongan sangat miskin.

Sementara dalam kondisi kemiskinan berdasarkan GK \$2 PPP, pada tahun 2013 (lihat Tabel 23), terdapat hanya 2 desa/kelurahan saja yang memiliki hasil estimasi persepsi masyarakat jauh melampaui batas maksimal estimasi peta kemiskinan. Selanjutnya, terdapat 4 desa/kelurahan yang memiliki hasil estimasi persepsi masyarakat sedikit di atas batas maksimal estimasi peta kemiskinan. Terdapat 5 desa/kelurahan yang memiliki hasil estimasi masyarakat yang berada pada rentangan batas minimal dan maksimal estimasi peta kemiskinan. Sebanyak 6 desa/kelurahan memiliki hasil estimasi sedikit dibawah batas minimal hasil estimasi peta kemiskinan. Hanya terdapat 1 desa yang memiliki estimasi hasil persepsi masyarakat berada jauh di bawah batas minimal estimasi peta kemiskinan.

Untuk itu dari perbandingan antara kondisi kemiskinan berdasarkan GKN dengan GK \$2 PPP baik pada 2010 maupun 2013 dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kondisi golongan miskin dan sangat miskin lebih mendekati kondisi masyarakat di bawah \$2 PPP ketimbang di bawah garis kemiskinan nasional.

Dari perbandingan kesejahteraan antar waktu, hasil FGD juga menangkap dinamika yang terjadi dalam golongan-golongan kesejahteraan selama kurun waktu 3 tahun terakhir (tahun 2010-2013) melalui perubahan proporsi masing-masing golongan tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat mengestimasi pada tahun 2010 masyarakat sangat miskin dan miskin terbentang mulai dari 14% di Desa Kundi, Kabupaten Bangka Barat hingga 83% di Kelurahan Lompoe, Kota Parepare. Sedangkan pada tahun 2013, penduduk sangat miskin dan miskin yang diestimasi masyarakat mulai dari 15% di Desa Air Putih, Kabupaten Bangka barat hingga yang tertinggi 63% di Desa Peradong, Kabupaten Bangka Barat. Dari hasil estimasi masyarakat, terdapat sebanyak 8 desa/kelurahan memiliki tingkat kemiskinan 50% atau lebih pada tahun 2010. Di tahun 2013, hanya 6 dari 18 desa/kelurahan yang memiliki tingkat kemiskinan 50% atau lebih. Secara umum, masyarakat di 18 desa sampel memiliki persepsi bahwa adanya perbaikan

kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari penurunan jumlah desa yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dalam kurun waktu dari tahun 2010 hingga 2013.

Sebagian besar desa/kelurahan sampel memang mengalami perbaikan positif dalam artian terjadi pengurangan proporsi golongan sangat miskin dan miskin, yang tentunya diikuti kenaikan proporsi di golongan yang lebih baik. Namun demikian, terdapat pula kasus-kasus dimana justru proporsi penduduk sangat miskin (golongan tingkat kesejahteraan terendah) mengalami kenaikan. Setidaknya terdapat 2 desa yang mengalami dinamika tersebut, yaitu Desa Peradong dan Desa Kundi, Kabupaten Bangka Barat dan Desa Maluk, Kabupaten Sumbawa barat. Di Desa Peradong meskipun terjadi kenaikan jumlah penduduk sangat miskin, tetapi kenaikannya sangat kecil. Masyarakat cenderung memandang terjadi perbaikan kesejahteraan di Desa Peradong. Pada kasus Desa Kundi, terjadi penurunan jumlah kelompok kaya (dalam bahasa setempat *kaye*), yang memicu kenaikan pada 2 golongan kesejahteraan yang lebih rendah yaitu golongan sejahtera (*sederhana*) dan kurang sejahtera (*sare*). Penurunan kesejahteraan di golongan *kaye* disebabkan adanya penurunan hasil timah, dimana daerah ini sangat bergantung pada hasil timah sehingga penghasilan masyarakat cukup fluktuatif. Hal senada juga dialami Desa Maluk dimana perekonomian desa tersebut sangat bergantung pada kegiatan PT Newmont Tbk. Pada tahun 2012, dengan alasan efisiensi, terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari PT Newmont yang sangat mempengaruhi kondisi perekonomian desa. Sementara itu cukup banyak pula terdapat kondisi dimana golongan miskin mengalami kenaikan tetapi lebih disebabkan adanya perbaikan dari golongan sangat miskin ke golongan miskin. Contohnya di Kelurahan Mallusetasi, Kota Parepare. Perbaikan kehidupan masyarakat sangat miskin di Mallusetasi banyak disebabkan maraknya pembangunan usaha baru seperti mini market, bank, dan tempat karaoke yang menciptakan lapangan pekerjaan baik langsung (kebutuhan karyawan) maupun tidak langsung (munculnya usaha pendukung lain seperti ojek). Bantuan pemerintah terutama akses kesehatan yang semakin baik (Jamkesda) juga menjadi alasan perbaikan ini.

VI. KESIMPULAN

Melakukan verifikasi kualitatif atas hasil penghitungan kuantitatif pada dasarnya bukan mengukur benar salahnya penghitungan kuantitatif namun melihat konsistensinya dengan persepsi masyarakat dan menggali lebih dalam informasi untuk analisis kemiskinan di suatu wilayah. Dalam studi verifikasi ini dilakukan perbandingan hasil pemeringkatan kesejahteraan antar kecamatan dalam satu kabupaten dan antar desa dalam satu kecamatan antara hasil FGD dengan hasil estimasi pemetaan kemiskinan melalui analisis *rank correlation* dan *pairwise correlation*. Khusus tingkat desa, dilakukan pula perbandingan tingkat kemiskinan dalam satu desa antara hasil FGD dengan hasil estimasi pemetaan kemiskinan.

Untuk ranking kesejahteraan antar kecamatan, secara rata-rata hasil *rank correlation* dan *pairwise correlation* baik GKN maupun \$2PPP menunjukkan bahwa akurasi pemetaan kemiskinan menurun untuk kondisi 2013, namun angka kesesuaiannya masih di atas 50%. Hal yang sama juga terjadi dalam ranking kesejahteraan antar desa, perbandingan antara kondisi 2010 dengan 2013 menunjukkan tingkat kesesuaian ranking 2010 lebih baik dari tahun 2013. Untuk itu, karena estimasi pemetaan kemiskinan menggunakan tahun 2010 sebagai basis perhitungan, maka dalam penggunaannya saat ini perlu memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi di setiap wilayah yang akan diobservasi.

Variasi nilai korelasi juga perlu menjadi perhatian dimana untuk kabupaten Bangka Barat (baik antar kecamatan maupun antar desa di kecamatan terpilih) memiliki nilai *rank correlation* yang rendah sementara di kabupaten Parepare nilai korelasi di setiap tingkatan cukup tinggi. Rendahnya nilai korelasi atau tingginya ketidaksesuaian dapat disebabkan karena memang ada perbedaan antara persepsi masyarakat dengan model estimasi kemiskinan dalam menentukan indikator-indikator dalam menilai miskin tidaknya suatu wilayah. Model yang digunakan dalam pemetaan kemiskinan bisa jadi kurang menggambarkan karakteristik lokal terkait kesejahteraan di kabupaten tersebut. Dalam proses FGD ada kecenderungan peserta untuk terfokus pada satu indikator tertentu, misalnya dalam FGD di kabupaten terdapat pendapat bahwa wilayah yang memiliki tambang cenderung lebih sejahtera daripada daerah perkebunan. Contoh persepsi lainnya adalah dimana Ibukota kabupaten juga dianggap selalu lebih sejahtera dan memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah sedangkan berdasarkan hasil pemetaan kemiskinan, daerah tersebut ternyata memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Sementara dalam FGD di tingkat kecamatan telah terbentuk persepsi bahwa daerah kelurahan pasti memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik daripada daerah desa.

Penyebab lain dari inkonsistensi peringkat kesejahteraan antara hasil FGD dan estimasi pemetaan kemiskinan yakni karakteristik kesejahteraan yang hampir mirip secara "kasat mata" sehingga menyulitkan peserta FGD dalam mengurutkan desa-desa dalam peringkat kesejahteraan yang diskrit. Sebagai contoh, Kecamatan Maluk memiliki empat desa yang berdasarkan sejarah merupakan hasil pemekaran dari desa yang sama. Secara geografis pun letaknya sangat berdekatan sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar desa-desa tersebut dari segi kesejahteraan. Keadaan ini menyulitkan peserta FGD dalam menyusun peringkat kesejahteraan antar desa yang sesungguhnya. Indikator jarak juga bisa menjadi penentu utama kesejahteraan dimana semakin jauh dari ibukota kabupaten maka daerah tersebut dianggap semakin tidak sejahtera.

Dalam perbandingan antara analisis pemeringkatan kesejahteraan berdasarkan GKN dengan GK \$2PPP, persentase kombinasi pasangan kecamatan yang sesuai untuk GK \$2PPP lebih besar daripada GKN. Namun, perbandingan antar desa/kelurahan di kecamatan menunjukkan estimasi

kemiskinan berdasarkan GKN memiliki akurasi yang lebih baik dari estimasi kemiskinan berdasarkan GK \$2 PPP. Sementara hal lain yang penting untuk dicermati adalah kecamatan yang memiliki RSE tinggi dalam kabupatennya memiliki *rank correlation* dan tingkat kesesuaian (*match*) yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kecamatan yang memiliki RSE rendah di kabupaten yang sama. Oleh karena itu dalam membaca angka kemiskinan tingkat desa dan kecamatan baik itu berdasarkan GKN maupun GK \$2PPP perlu mempertimbangkan nilai *standard error*.

Secara umum dalam FGD di tingkat desa, masyarakat memandang ada 4 kelompok masyarakat berdasarkan golongan kesejahteraannya. Kelompok masyarakat tersebut adalah kelompok sangat miskin/fakir, miskin, menengah, dan kaya. Konsisten dengan kondisi 2010, estimasi masyarakat akan lebih dekat pada estimasi peta kemiskinan apabila hanya dimasukkan unsur golongan sangat miskin. Untuk itu dari perbandingan antara kondisi kemiskinan berdasarkan GKN dengan GK \$2PPP baik pada 2010 maupun 2013 dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kondisi golongan miskin lebih mendekati kondisi masyarakat di bawah \$2PPP ketimbang di bawah GKN.

Masyarakat di 18 desa sampel memiliki persepsi bahwa adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari penurunan jumlah desa yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dalam kurun waktu dari tahun 2010 hingga 2013. Namun demikian, terdapat pula kasus-kasus dimana justru proporsi penduduk sangat miskin (golongan tingkat kesejahteraan terendah) mengalami kenaikan yaitu di daerah yang tergantung pada hasil tambang, dimana setelah penurunan produksi hasil tambang berpengaruh terhadap menurunnya pendapatan masyarakat. Sementara itu cukup banyak pula terdapat kondisi dimana golongan miskin mengalami kenaikan tetapi lebih disebabkan adanya perbaikan dari golongan sangat miskin ke golongan miskin.

DAFTAR ACUAN

- Elbers, et. al. (2002) Micro Level Estimation of Welfare. Policy Research of Working Paper, World Bank.
- World Bank (2007) More than a pretty picture : using poverty maps to design better policies and interventions.
- Tarozzi dan Deaton (2009) Using census and survey data to estimate poverty and inequality for small areas. *The Review of Economics and Statistics*, November 2009, 91(4): 773–792.
- White (2002) Combining Quantitative and Qualitative Approaches in Poverty Analysis. *World Development* Vol. 30, No. 3, pp. 511–522, 2002
- Martin Ravallion (2002) How Can Qualitative Methods Help in Measuring Poverty?. *India: Workshop on Poverty Measurement, Monitoring and Evaluation*, January 11/12/2002
- Suhayo et. al. (2005) Developing a Poverty Map for Indonesia (A Tool for Better Targeting in Poverty Reduction and Social Protection Programs), Book IV : Field Verification, Jakarta: SMERU Research Institute
- Asep Suryahadi et al. (2005) Developing a Poverty Map for Indonesia (A Tool for Better Targeting in Poverty Reduction and Social Protection Programs), Book I : Technical Report. Jakarta: SMERU Research Institute
- BPS (2013) Kota Parepare Dalam Angka 2012
- BPS (2013) Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Angka 2012
- BPS (2011) Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka 2010

Lembaga Penelitian SMERU

Telepon: +62 21 3193 6336

Faks : +62 21 3193 0850

E-mail : smeru@smeru.or.id

Website: [www. smeru. or.id](http://www.smeru.or.id)